Membingkai Lapindo

PENDEKATAN KONSTRUKSI SOSIAL ATAS KASUS LAPINDO (SEBUAH BUNGA RAMPAI)

Anton Novenanto | Bosman Batubara | Abdil Mughis Mudhoffir
Yayan Sakti Suryandaru | Anastasya Andriarti | Rachmat Kriyantono

PENDEKATAN KONSTRUKSI SOSIAL
ATAS KASUS LAPINDO
(SEBUAH BUNGA RAMPAI)

Anton Novenanto (Ed.)

Penerbit Kanisius

Daftar Isi

Menguak Ketertutupan Informasi Kasus Lapindo

Anton Novenanto

Semua berawal dari itikad baik untuk membuka akses informasi atas kasus Lapindo kepada publik luas. Informasi adalah publik, begitulah prinsip yang mendasari penerbitan bunga rampai ini. Usaha mempublikasikan bunga rampai *Membingkai Lapindo* ini merupakan salah satu usaha untuk menyebarluaskan informasi-informasi tentang kasus Lapindo kepada publik.

Di tahun 2010, Walhi Jatim, LHKI Surabaya, dan Posko Korban Lumpur Lapindo melayangkan permintaan informasi tentang penanganan korban lumpur Lapindo pada 13 (tiga belas) badan publik di Jawa Timur. Ada dua jenis informasi yang ingin dikumpulkan melalui kegiatan tersebut: *pertama*, informasi untuk pemulihan kondisi sosial, lingkungan, infrastruktur, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan lain-lain; dan, *kedua,* informasi untuk pencegahan risiko (mitigasi) yang berisi pantauan, identifikasi, dan strategi pencegahan risiko seputar semburan lumpur Lapindo. Dari ke-13 badan publik tersebut hanya lima yang merespons, yaitu: Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS),

Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sidoarjo, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jatim, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo. Dari lima badan publik tersebut, hanya BPLS dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo yang bersedia menerima wawancara langsung terkait informasi seputar bencana lumpur, sementara tiga yang lain hanya memberikan data-data sekunder tentang apa yang sudah mereka kerjakan terkait dengan kasus Lapindo. Sekilas, hikmah dari *Kegiatan Permintaan Informasi* adalah bahwa mengumpulkan, mengelola, mengolah, dan mendistribusi informasi belum ”menjadi tradisi” di kalangan pejabat-pejabat badan publik (Novenanto, 2010). Tak jarang mereka terjebak dalam rutinitas administratif-birokratis yang justru mengesampingkan perihal yang secara substansial mendesak untuk segera dibahas dan ditindaklanjuti. Dalam latar sosial semacam inilah *habitus* informasi publik di Indonesia sedang dibentuk.

Lahirnya Wacana ”Bencana Industri”

Ketertutupan (beberapa menyebut *kebohongan*) informasi publik atas kasus Lapindo diyakini sudah terjadi sejak sosialisasi awal perusahaan yang mengatakan pada warga bahwa lokasi tersebut bukan untuk eksplorasi gas alam, melainkan untuk ”peternakan ayam” (Batubara & Utomo, 2010) atau untuk ”kandang kuda” (Santoso, 2007). Usaha menutup informasi semacam ini dilakukan demi memudahkan mendapatkan persetujuan warga sekitar sebagai salah satu persyaratan mengurus izin usaha di lokasi tersebut. Catatan Batubara & Utomo (2010: 41-42) menyebutkan bahwa pada mulanya kehadiran Lapindo Brantas sempat ditolak di dua desa, yaitu Siring dan Jatirejo, di Kecamatan Porong. Hal itu terjadi pada tahun 2005. Baru pada Maret 2006, akhirnya, dengan bantuan Kepala Desa Renokenongo, Mahmudatul Fatchiyah, Lapindo Brantas berhasil mendapatkan tanah di wilayah Desa Renokenongo dengan harga berkisar antara Rp 60.000,- sampai Rp 125.000,- per meter persegi. Saat itu, tidak satu pun Direksi Lapindo Brantas yang berhadapan langsung dengan warga dalam proses negosiasi tanah untuk eksplorasi gas alam; Mahmudatul mewakili Lapindo Brantas. Bahkan, si pemilik tanah tidak memperoleh informasi tentang siapa yang sebenarnya akan mengelola tanah mereka.

Merunut catatan harian Energi Mega Persada, Lapindo Brantas mulai melakukan eksplorasi di Banjar Panji 1 pada 9 Maret 2006 (Wilson, 2006; Adams, 2006). Ini berarti eksplorasi di Banjar Panji 1 belum genap 4 bulan saat semburan lumpur panas pertama kali muncul pada 29 Mei 2006.[1] Semburan pertama menyembur di wilayah Desa Siring, sekitar 150-200 meter dari Banjar Panji 1. Keesokan harinya, *Kompas* (30 Mei 2006) mengangkat isu di halaman nasional koran ini. *Kompas* mengutip pernyataan Syahdun, mandor pengeboran PT Tiga Musim Mas Jaya, bahwa semburan terjadi akibat aktivitas pengeboran di Banjar Panji 1. PT Tiga Musim Mas Jaya adalah perusahaan subkontrak Lapindo Brantas untuk pengeboran di Banjar Panji 1.

Seiring dengan semburan lumpur yang semakin tak terkendali, pihak-pihak yang memiliki andil di Blok Brantas terkuak. Blok Brantas adalah blok eksplorasi minyak dan gas alam yang membentang dari wilayah Mojokerto sampai lepas pantai di Selat Madura. Banjar Panji 1 hanyalah *salah satu* sumur eksplorasi di Blok Brantas. Berlaku sebagai pemegang konsensi Blok Brantas adalah Lapindo Brantas (50%), Medco Brantas (32%), dan Santos Brantas (18%). Sementara bertindak sebagai operator adalah Lapindo Brantas, anak perusahaan Energi Mega Persada, unit usaha Grup Bakrie untuk eksplorasi minyak dan gas alam.

Wacana ”bencana industri” semakin menguat setelah Medco Brantas mengirim surat berjudul ”Banjar Panji-1 Well Drilling Incident” pada Lapindo Brantas (5 Juni 2006). Dalam surat tersebut Medco menyebutkan bahwa insiden lumpur di Sidoarjo terjadi akibat ”kelalaian besar” *(gross negligence)* dari operator sumur, Lapindo Brantas. Medco menyebutkan bahwa Lapindo ”tidak mengikuti prosedur pengeboran” yang sudah disepakati di awal. Disebutkan dalam surat tersebut, dalam rapat tanggal 18 Mei 2006, Medco sudah memperingatkan pemasangan selubung pengaman *(safety casing)* ketika sumur mencapai kedalaman 8.500 kaki, tapi Lapindo mengabaikan peringatan itu. Pada bulan Agustus 2006, TriTech Petroleum mengirimkan ”Preliminary Report” pada Medco

[1] Ahmady et al. (2010: 164), mengutip pernyataan warga Renokenongo, menyebutkan semburan lumpur sudah terjadi sejak 23 Mei 2006.

Energi Internasional, perusahaan induk Medco Brantas. Perhatian utama dari laporan tersebut adalah ”lepasnya” *(the loss)* sumur Banjar Panji 1. Wacana yang dimunculkan dalam laporan tersebut adalah ”inkompetensi dan kelalaian Lapindo” berdampak pada ”lepas kontrol” terhadap sumur Banjar Panji 1.

Akan tetapi, apa hubungan antara kelalaian Lapindo tersebut dengan semburan lumpur masih misteri sampai Neal Adams Services merilis laporan berjudul ”Causation Factors for the Banjar Panji No 1 Blowout”. Laporan tersebut dikirimkan ke Medco Energi pada 15 September 2006. Dari laporan tersebut, kita menemukan kata kunci yang menghubungkan aktivitas pengeboran dan semburan lumpur, yaitu: *blowout*. *Dictionary of Mining, Mineral, and Related Terms* (American Geological Institute, 1997) menyebutkan sembilan definisi *blowout*, namun definisi yang paling dekat dengan yang dimaksudkan Neal Adams adalah definisi keempat: ”pelontaran air, gas, atau minyak bertekanan tinggi, terkadang tak terduga, dan tak terkontrol dari sebuah sumur bor *(the high-pressure, sometimes violent, and uncontrolled ejection of water, gas, or oil from a borehole)*” (h. 57). Laporan tersebut menulis bahwa penyebab utama *blowout* adalah sebagai akibat dari: ”serangkaian kekeliruan operasional serta kesalahan dan kelalaian. Lapindo melanggar *Well Plan* [rencana pengeboran]-nya sendiri dengan gagal memasangkan *casing* pada kedalaman 6.500 kaki dan juga pada sekitar 9.000 kaki. Pemasangan rangkaian *casing*, dengan penyemenan yang laik, akan mencegah *kick* dan *blowout* yang terjadi selanjutnya.”

Laporan Neal Adams tersebut cenderung membosankan karena menganalisis Laporan Pengeboran harian sejak 9 Maret 2006 (pengeboran dimulai pada pukul 13:30 WIB) sampai 3 Juni 2006. Tentu yang menarik adalah mereproduksi tentang apa yang terjadi di Banjar Panji 1 menjelang terjadinya semburan lumpur. Tanggal 27 Mei 2006, ketika operator mengebor dari 2.771 m sampai 2.813 m,[2] sensor mendeteksi kadar H_2S mencapai 25 ppm. Beberapa kru melanjutkan pengeboran sampai

[2] Laporan Neal Adams menggunakan skala ”feet”, tapi untuk memudahkan pembaca Indonesia digunakan padanan dalam skala ”meter” dengan pembulatan ke atas/bawah menghindari koma.

kedalaman 2.828 m, sementara kru lain dievakuasi ke titik aman. Pada 28 Mei 2006, ketika pengeboran dari 2.829 m sampai 2.834 m dilanjutkan, terjadi *lost circulation*.[3] Operator mulai menarik keluar mata bor sampai 2.591 m – yang dinilai Adams sebagai "keliru", karena *seharusnya* Operator meninggalkan mata bor itu di dalam lubang. Dini hari pada 29 Mei 2006, ketika mata bor ditarik keluar sampai 1.294 m, Operator mendeteksi *well kick* dan berusaha menutup sumur bor. Pada saat yang sama, sensor mendeteksi kadar H_2S mencapai 500 ppm di dalam sumur. Operator berhasil "membunuh" sumur, tapi tak berhasil menarik mata bor keluar dari sumur. Beberapa jam kemudian, gelembung H_2S terdeteksi *di atas* permukaan bumi. Para kru dievakuasi. Keesokan harinya (30 Mei) intensitas dan frekuensi gelembung gas berkurang. Malam harinya, Operator memasukkan semen ke dalam sumur dan gelembung gas berkurang. Hari berikutnya (31 Mei) Operator melanjutkan penyemenan sumur bor, gelembung gas terus berkurang. Namun, pada 1 Juni, air bercampur lumpur terdeteksi mengalir keluar dari daerah di sekitar sumur. Operator mulai mengevakuasi peralatan dari lokasi pengeboran. Pada 2 Juni, Operator mengebor lubang kembali sampai kedalaman 1.078 m. Saat melakukannya, Operator mendeteksi *firing guns*[4] dan keretakan tanah di sekitar sumur. Pada hari berikutnya (3 Juni), Operator mulai membongkar tiang pengeboran, dan laporan harian berakhir.

Laporan Adams menilai bahwa gelembung gas di lokasi pengeboran pada 29 Mei 2006 adalah indikator yang jelas dari sebuah *blowout* bawah tanah. Alih-alih menangani *blowout*, menurut Adams, Operator lebih fokus pada mempertahankan sumur eksplorasi. Laporan menulis, "jika fokus dialihkan pada *blowout*, *blowout* mungkin telah dimatikan." Prioritas Operator adalah bagaimana caranya agar tidak kehilangan sumur eksplorasi dengan menyemen sumur bor. Sementara itu, pengeboran tanggal 2 Juni

---

[3] Lost circulation adalah the condition during rotary drilling when the drilling mud escapes into porous, fractured, or cavernous rocks penetrated by the borehole and does not return to the surface (American Geological Institute, 1997: 320).

[4] Dalam pertambangan, istilah gun berarti a borehole in which the charge of explosive has been fired with no other effect than to blast off a small amount of material at the mouth of the borehole (Ibid., h. 249).

2006 dinilai Adams sebagai ”berbatas tipis dengan pelanggaran kriminal karena mengancam personil, *rig*, dan lingkungan sekitar”.

Dalam ilmu pengetahuan, kebenaran merupakan sesuatu yang sakral untuk dinyatakan. Bagaimanapun juga, produksi pengetahuan merupakan sebuah bukti bahwa kuasa sedang dipraktikkan. Secara kritis, kita bisa menilai bahwa laporan Neal Adams tersebut sebagai laporan yang berpihak pada kepentingan Medco yang berusaha untuk lepas dari tanggung jawab dalam insiden lumpur, dengan melimpahkan kesalahan pada Operator pengeboran, Lapindo Brantas. Akan tetapi, terlepas kepentingan yang melatarbelakangi laporan Adams tersebut, wacana bahwa ”kelalaian Lapindo memasang *casing* telah menyebabkan semburan lumpur” menyebar luas ke dalam opini publik, dan mengendap sebagai sesuatu yang disebut sebagai ”kebenaran”.

Berdasarkan penelusuran dokumen singkat, kita dapat mendeteksi pelbagai upaya Grup Bakrie untuk mengumpulkan bercak-bercak lumpur menjadi satu di rumah keluarga mereka. Pada Maret 2007, Medco International mendivestasikan sahamnya di Medco Brantas pada Grup Prakarsa, yang dijamin oleh Minarak Labuan, unit lain dari Grup Bakrie (Bapepam-LK, 10 Mei 2007). Pada Februari 2008, Energi Mega Persada merilis Surat Edaran tentang konversi piutang Minarak Labuan menjadi saham di Lapindo Brantas. Rupanya, selama itu Lapindo Brantas menerima pinjaman dari Minarak dalam rangka penanganan dampak insiden lumpur di Sidoarjo. Lapindo telah menerima USD 30 juta (sekitar Rp 287 miliar) dari Minarak. Minarak adalah unit usaha Grup Bakrie yang didirikan 8 Maret 1997 di Labuan, Malaysia. Dengan demikian, Lapindo sudah berpindah tangan dari Energi Mega Persada ke Minarak Labuan. Pada akhir 2008, perusahaan minyak Australia, Santos, mentransfer konsensinya di Blok Brantas, juga, pada Minarak Labuan (Santos, 11 Desember 2008). *Dus*, Grup Bakrie menjadi figur utama dalam insiden lumpur ini, begitu ditinggalkan sendiri oleh pemegang konsesi Blok Brantas yang lain. Akan tetapi, dengan demikian, pada saat yang bersamaan, Grup Bakrie telah mengatur kepemilikan tunggalnya di Blok Brantas – melalui Minarak Labuan. Menjadi wajar jika Grup Bakrie lalu menjadi fokus utama dari seluruh wacana terkait dengan bencana lumpur ini. Dalam situasi semacam

itu, menjadi sangat wajar jika Grup Bakrie dengan segala sumber dayanya berusaha untuk membatasi tanggung jawabnya terhadap kerugian yang akan datang dengan cara menggiring wacana ”bencana industri” menuju wacana ”bencana alam”.

MITOS ”KEBEBASAN BERMEDIA” PASCA-ORDE BARU

Salah satu medan pertarungan wacana adalah dengan penguasaan media massa, yang menjadi fokus sebagian besar bab dalam bunga rampai ini.

Pada saat kasus Lapindo terjadi, Indonesia berada dalam transisi dari suatu era otoritarianisme dan masuk dalam terowongan gelap Reformasi. Di masa transisi ini muncul dilema. Pada satu sisi, sisa-sisa warisan era otoritarianisme yang sudah kadung mendarah daging tidak bisa pudar begitu saja, bahkan masih menghantui sampai 10 tahun lebih Soeharto turun tahta pada Mei 1998. Kasus pembunuhan Munir, aktivis HAM, masih menjadi misteri. Usaha pengungkapkan fakta pembantaian massal pasca-Oktober 1965 pun menghadapi pelbagai macam resistensi dari banyak kelompok, khususnya militer. Sementara itu, pada sisi lain, tidak ada yang mengetahui apa yang berada di ujung terowongan gelap Reformasi itu. Selama berjalan di dalam terowongan gelap itu, Indonesia melakukan pelbagai eksperimen di pelbagai sektor: ekonomi, hukum, politik, pemerintahan, masyarakat sipil, dan juga media massa. Sebuah euforia kebebasan setelah lepas dari cengkeraman kuat otoritarianisme.

Pelbagai teori tentang demokrasi modern mengakui peran penting media massa sebagai lembaga sosial yang berfungsi sebagai pengendali arus informasi dalam publik. Bahkan, media massa dianggap sebagai pilar keempat demokrasi, memperkuat *trias politica* (legislatif, eksekutif, yudikatif); namun, seperti lembaga sosial lain di Indonesia pada masa pasca-otoritarianisme, media massa pun tidak lepas dari permasalahan rumit dalam rangka mewujudkan fungsi sosialnya sebagai pengendali arus informasi pada publik. Di masa otoritarianisme ala Orde Baru, media massa berada dalam kontrol kuat negara. Segala bisnis media, dan juga kemudian informasi yang disampaikan melalui media, diatur secara ketat melalui mekanisme hukum yang rumit bernama SIUPP (Surat Izin

Usaha Penerbitan Pers). Pekerja media, secara implisit dan eksplisit, dipaksa pemerintah dan militer untuk melakukan sensor internal. Jika sensor internal tidak terjadi, media akan diberi sanksi serius sampai pada tindakan pencabutan izin terbit (pembredelan), seperti yang terjadi pada *Tempo*, *Detik*, dan *Editor*. Pembredelan media merupakan kisah suram bagi kebebasan pers di Indonesia, suatu momentum pembungkaman kebebasan pers. Kristiawan (2005: 35-36) mencatat modus lain, yaitu mendirikan media yang sahamnya dimiliki oleh pengusaha ”pro-Soeharto”, khususnya di bisnis siaran televisi swasta nasional.

Pasca turunnya Soeharto, Departemen Penerangan ditutup. Hal ini berdampak pada menggeliatnya bisnis media, bahkan mengubah komposisi bisnis media secara dramatis. Pada rentang 1998 dan 2002, Pemerintah telah mengeluarkan izin terbit/siar baru bagi lebih dari 1.200 media cetak, lebih dari 900 radio swasta dan lima televisi swasta (Lim, 2012; Nugroho et al., 2012). Akan tetapi, ibarat keluar dari kandang singa masuk kandang buaya, para pekerja media yang ”merasa” telah merdeka dari cengkeraman politik negara otoriter justru terjebak dalam situasi yang lebih rumit, era ekonomi neoliberal. Media-media tersebut tak ubahnya seperti corong bagi kepentingan para pemiliknya. Kasus *Jakarta-Jakarta* menjadi salah satu contoh menarik untuk menunjukkan kondisi dilematis pekerja media di era Reformasi (Heryanto & Adi, 2001).[5] Awal November 1999, tiga puluh satu staf *Jakarta-Jakarta* mendirikan serikat pekerja media yang untuk pertama kalinya resmi tercatat di Departemen Tenaga Kerja. Serikat pekerja tersebut mulai menuntut beberapa hal yang mereka anggap tidak adil yang dilakukan oleh pihak manajemen. Pada 23 November 1999, *Jakarta-Jakarta* ditutup oleh pemiliknya, KKG. Situasi serupa nyaris terulang pada 2012, ketika beberapa jurnalis *Indonesian Finance Today* berusaha menuntut hak-hak yang belum diberikan oleh

---

[5] Oplah Jakarta-Jakarta, yang berada di bawah Kelompok Kompas Gramedia [KKG], sempat melonjak tajam karena liputan kontroversial tentang pembunuhan massal di Santa Cruz, Timor Timur, 12 November 1991, yang dilakukan oleh militer Indonesia. Pemberitaan yang menyinggung kelompok militer itu membuat manajemen KKG memindahkan tiga redaktur senior yang bertanggung jawab atas berita tersebut ke posisi yang tidak penting di manajemen. Jakarta-Jakarta pun diubah menjadi majalah glossy. Ini salah satu contoh mekanisme kontrol internal dari manajemen terhadap isi pemberitaan media pada era Orde Baru (Heryanto & Adi, 2001).

pihak manajemen dengan mendirikan ”Serikat Pekerja *Indonesian Finance Today*” (Sekar IFT). Modusnya memang tidak menutup *Indonesia Finance Today*, tapi ”merumahkan” 13 dari 22 anggota Sekar IFT per 2 April 2012. Dua minggu setelah itu, jurnalis yang dirumahkan dipanggil ke kantor untuk mendapatkan surat pemecatan.[6] Melihat situasi semacam ini, ”kebebasan pers”, kemudian, perlu dibaca bukan semata dalam kaca-mata masalah bebas menulis berita kritis terhadap pemerintah, tapi juga masalah merdeka sebagai ”buruh” di organisasi bisnis media. Media massa bukanlah semata lembaga sosial yang berfungsi sosial menyediakan informasi kepada publik, tapi sekaligus organisasi bisnis yang tidak bisa lepas dari urusan manajemen permodalan dan akumulasi kapital. Sistem ekonomi neoliberal telah menjerat pekerja media dalam gurita konsekuensi ekonomi pragmatis yang semakin menjauhkan media massa dari fungsi sosialnya. Akibatnya, setelah lepas dari cengkeraman negara otoritarian, kini media massa masuk dalam jebakan kapitalisme neoliberal.

Konsentrasi kepemilikan media di Indonesia merupakan salah satu masalah lain bagi kebebasan pers. Sekalipun ”jumlah” media massa di Indonesia berkembang pesat, namun kepemilikan media semakin hari semakin terpusat pada beberapa kelompok saja. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan di banyak kalangan tentang diversitas ”isi” media. Sementara itu, praktik akuisisi dan merger menjadi strategi yang dianggap wajar untuk bertahan dalam dunia bisnis media di sistem neoliberal ini.[7] Pada 2008 pemilik Lapindo, Grup Bakrie, yang juga mengelola *Vivanews*, *ANTeve*, dan *TVOne*, mengakuisisi *Surabaya Post*. Media massa yang menjadi salah satu harapan publik untuk mendapatkan pelbagai informasi tentang kasus Lapindo, pada saat yang sama, dipertanyakan objektivitasnya.

---

[6] Perbincangan personal dengan Arthur Gideon.

[7] Pada 2011, Elang Mahkota Teknologi (Emtek), pemilik SCTV, membeli Indosiar; sementara itu, pemilik TransTV dan Trans7, Chaerul Tanjung, membeli ”detik.com”, perusahaan media online di Indonesia (Nugroho et al., 2012). Jadi sampai 2012, dunia bisnis media di Indonesia hanyalah medan kompetisi bagi tiga belas konglomerasi besar, ”the league of thirteen” (Lim, 2012).

Mengambil Sikap di Tengah Kontroversi

Dalam ilmu pengetahuan, ”kebenaran” merupakan sesuatu yang sakral, karena produksi pengetahuan merupakan sebuah praktik kuasa. Permasalahan etika menyeruak ketika saya mulai melakukan penelitian tentang insiden lumpur di Sidoarjo: ”kebenaran” versi mana yang perlu saya ikuti? Alih-alih memilih salah satu versi ”kebenaran”, pertarungan kuasa untuk membangun suatu rezim kebenaran merupakan hal lain yang tak kalah menarik untuk dikaji.

Secara teoretik ada beberapa hal yang membenarkan pengambilan fokus kajian semacam itu. Bruno Latour (*Politics of Nature*, 2004) mengajukan pertanyaan cukup serius bagi gerakan ekologi-politik yang sekarang sedang berjuang keras mempertahankan alam. Siapakah yang memberi mandat bagi ”seseorang” untuk bertindak sebagai ”representasi alam” dalam pertarungan politik, demokrasi manusia? Alam tidak pernah bisa berbicara tentang kepentingan politiknya, yang ada adalah ”atas nama alam” *(on behalf of nature)* manusia mencoba bersuara tentang apa yang dibutuhkan oleh alam, demi keberlangsungan hidup manusia yang tinggal di dalamnya. Di era modern, filsuf telah bertransformasi menjadi ilmuwan yang dengan metode ilmiah ”seakan” mempunyai kuasa untuk berbicara tentang apa yang diinginkan oleh alam. Insiden lumpur di Sidoarjo menjadi sesuatu yang secara politis menarik untuk digagas dalam kerangka teoretik tersebut. Pada satu sisi, bagaimana fenomena alam (gunung lumpur) sedang dijelaskan oleh para ilmuwan dengan mengatasnamakan ilmu pengetahuan melalui argumen-argumen yang disusun ”secara ilmiah”. Sementara pada sisi lain, argumen-argumen ilmiah tersebut telah digunakan sebagai senjata untuk mencapai kepentingan atau tujuan tertentu, konstruksi pengetahuan di tengah kontroversi bencana gunung lumpur.

Kasus Lapindo dan pemberitaan tentangnya merupakan contoh unik yang mana pemerintah dan kapital seakan-akan menyatu dalam seorang Aburizal Bakrie, yang pada saat itu duduk sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan tokoh utama dalam Bakrie & Brothers, konglomerasi induk yang memiliki saham terbesar Lapindo Brantas Inc. Opini publik atas keterlibatan Aburizal dalam kasus Lapindo semakin akumulatif seiring terpilihnya dia menjadi Ketua Umum Partai Golongan

Karya (Golkar), dan secara terang-terangan memproklamirkan diri sebagai kandidat Presiden dari Partai Golkar yang bakal bertarung memperebutkan kursi RI-1 dalam Pemilu Presiden 2014. Kasus Lapindo bagaimanapun juga, mau tidak mau, menjadi satu ”pernyataan” yang harus dikelola oleh Aburizal, dan juga lawan politiknya.

Secara umum usaha Grup Bakrie memenangi konstruksi kebenaran tentang bencana gunung lumpur sesuai sudut pandang mereka cukup berhasil, tapi pada saat yang sama keberhasilan itu menandakan pembungkaman da n eksklusi konstruksi alternatif tentang insiden ini. Oleh karena itu, mungkin, intensi penelitian sosial tentang kasus Lapindo adalah mengungkap: bagaimanakah praktik pembungkaman dan eksklusi tersebut dilakukan?

Struktur Bunga Rampai ”Membingkai Lapindo”

Ide penyusunan bunga rampai ”Membingkai Lapindo” ini muncul ketika saya tuntas melakukan kategorisasi atas penelitian-penelitian kasus Lapindo yang didapatkan sebagai salah satu langkah sebelum melakukan tinjauan pustaka. Dalam usaha tersebut, saya membuat satu *folder* dengan nama ”konstruksi sosial” (beberapa *folder* lain, ”geologi”, ”relokasi”, ”dampak”). Beberapa penelitian yang berada dalam *folder* ”konstruksi sosial” menarik perhatian saya, karena secara tidak langsung ditulis oleh beberapa kawan yang sudah saya kenal sebelumnya, dan dengan merekalah saya melakukan korespondensi terkait penulisan disertasi. Saya pun menghubungi beberapa kawan tersebut, menyampaikan gagasan tentang penyusunan bunga rampai ”Membingkai Lapindo” ini dan semua membalas dengan antusias.

Beberapa tulisan tersebut sudah dalam bentuk artikel pendek, seperti naskah oleh Bosman Batubara, Anton Novenanto, dan Yayan Sakti Suryandaru. Meskipun begitu, beberapa revisi harus dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi teraktual insiden Lumpur Lapindo. Batubara menambahkan beberapa paragraf pembahasan artikel terbaru tentang perkiraan umur semburan lumpur. Sementara itu, artikel Novenanto aslinya adalah bahasa Inggris. Awalnya, saya memperkirakan proses penerjemahan akan mudah dan cepat, namun ternyata saya terpaksa menghilangkan dan

menambahkan beberapa hal dari artikel aslinya. Suryandaru juga tidak mengalami kesulitan untuk memodifikasi laporan penelitian dari bahasa akademis menjadi bahasa yang relatif lebih populer. Ketiga naskah ini relatif lebih mudah untuk dituntaskan bentuknya yang sudah pendek.

Naskah yang lain masih dalam wujud laporan penelitian ratusan halaman (kebanyakan adalah naskah tesis/disertasi) tentunya membutuhkan perlakuan khusus. Untuk naskah tersebut, saya meminta masing-masing penulis untuk ”merangkum” naskah asli, dengan memberikan penekanan pada bagian-bagian khusus. Abdil Mughis Mudhoffir, misalnya, menekankan pada Bab 3 dari tesisnya tentang ”pertarungan wacana” atas kasus Lapindo. Anastasya Andriarti awalnya berharap bisa merangkum sendiri naskah tesisnya, namun karena kesibukannya campur tangan dari editor dibutuhkan. Alih-alih merangkum tesis tersebut, Bab 4 bisa dikatakan sebagai artikel baru yang kerangkanya dibangun dari naskah asli, proses produksi wacana di sebuah stasiun televisi swasta milik keluarga Bakrie, dengan beberapa penambahan. Menulis artikel baru juga dilakukan oleh Rachmat Kriyantono. Sekalipun kerangka pikir dasar diambil dari disertasi, namun artikel yang hadir di bunga rampai ini adalah artikel yang berbeda dengan disertasi tersebut. Sebuah narasi tentang bagaimana Lapindo Brantas telah gagal dalam manajemen krisis lumpur di Sidoarjo.

Ibarat sungai, beberapa bunga rampai mungkin berawal dari sumber yang sama untuk kemudian bermuara di pelbagai ujung yang berbeda-beda. Akan tetapi, bab-bab dalam buku ini merupakan anak-anak sungai yang mengalir dari sumber mata air yang berbeda untuk kemudian bertemu dan bermuara dalam sungai besar. Sebagai sebuah bunga rampai, sangat mungkin terjadi repetisi dalam beberapa bab, khususnya tentang uraian masing-masing tentang kronologis kasus Lapindo. Bisa jadi, terdapat perbedaan yang mungkin substansial karena masing-masing penulis menggunakan sumber yang berbeda. Namun, apalah uniknya apabila usaha membingkai Lapindo dilakukan dengan kerangka yang seragam. Justru, keberagaman bingkai para penulis dalam bunga rampai ini adalah kekuatan bagi usaha untuk ”membingkai Lapindo”, sebuah praktik yang membuktikan bahwa peneliti sosial tidak akan pernah bisa ”bebas-nilai” dan selalu berpolitik.

REFERENSI

——, (2006) ”Sumur Gas Bocor, Penduduk Diungsikan,” *Kompas*, 30 Mei 2006.

Adams, N., (2006) *Causation Factors for the Banjar Panji No. 1 Blowout*. Laporan untuk Medco E&P Indonesia, Neal Adams Services (15 September 2006).

Ahmadi, I., Elmy, T., Kuswardono, T., Khalid, K., Nusantara, B.C., & Santoso, V., (2010) *Java Collapse: Dari Kerja Paksa Hingga Lumpur Lapindo*, INSIST Press & Walhi.

Akbar, A. A., (2007) *Konspirasi di Balik Lumpur Lapindo*, Yogyakarta: Galang Press.

American Geological Institute. (1997). *Dictionary of Mining, Mineral, and Related Terms* [2nd Ed.], American Geological Institute in coorperation with the Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, Inc.

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Republik Indonesia. (2007). *Penjelasan Bapepam-LK tentang Hasil Penelahaan Transaski Divestasi PT Medco E&P Brantas oleh PT Medco Energi International Tbk.* (10 Mei 2007).

Batubara, B. & Utomo, P.W., (2010). ”Praktik Bisnis di Banjir Lumpur.” Dalam: B. Batubara & H. Prasetya (Eds.), *Bencana Industri: Relasi Negara, Perusahaan, dan Masyarakat Sipil* (h. 31-84), Jakarta: Yayasan Desantara.

Energi Mega Persada. (2008). Surat Edaran pada Pemegang Saham, (26 Februari 2008).

Heryanto, A. & Adi, S.Y., (2001). ”The Industrialization of the Media in Democratizing Indonesia.” *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International & Strategic Affairs*, Vol. 23(2), 327-356.

Kristiawan, R., (2005). ”Dari Istana ke Pasar: Refleksi atas Sejarah Ruang Publik Kita.” Dalam: S.H. Wibowo (Ed.), *Republik Tanpa Ruang Publik* (h. 25-40), Yogyakarta: IRE Press.

Lim, M., (2012) *The League of Thirteen: Media Concentration in Indonesia.* Laporan Penelitian. Tempe AZ: Participatory Media Lab at Arizona State University [diakses 12 September 2012 http://www.public.asu.edu/~mlim4/files/Lim_IndoMediaOwnership_2012.pdf].

Medco Brantas. (2006, 5 Juni). *Banjar Panji-1 Well Drilling Incident.* Surat pada Lapindo Brantas.

Novenanto, A., (2010). "Kasus Lapindo, Keterbukaan Informasi Publik, dan Peran Media Massa." Paper untuk FGD *Keterbukaan informasi publik dalam Kasus Lapindo* (17 Juli 2010). Surabaya: Walhi Jawa Timur & AJI Surabaya.

Nugroho, Y., Putri, D.A., & Laksmi, S., (2012). *Mapping the Landscape of the Media Industry in Contemporary Indonesia*. Report series: Engaging media, empowering society: assessing media policy and governance in Indonesia through the lens of citizens' rights. Research collaboration of *Centre for Innovation Policy and Governance* and *HIVOS Regional Office Southeast Asia*, funded by Ford Foundation. Jakarta: CIPG and Hivos.

Santos. (2008). "Santos Brantas to transfer interest in Brantas PSC." *Media Release* (11 Desember).

Santoso, V., (2007). "Harga Industrialisasi Sektor Migas. Semburan Lumpur Lapindo sebagai Potret Kelemahan Negara dalam Menghadapi Korporasi Ekstraktif Hidrokarbon." *CSR Review,* (Mei-Juni), 4-9.

Wilson, S., (2006). *Factors and Causes in the Loss of Well Banjar Panji-1*. Preliminary Report for the Directors of Medco Energi International, TriTech Petroleum Consultants Ltd. (14 Agustus 2006).

Perdebatan tentang Penyebab Lumpur Lapindo[1]

BOSMAN BATUBARA

BENCANA LUMPUR LAPINDO adalah sebuah kontroversi, mulai dari penyebutannya hingga mekanisme pemicunya. Dalam penyebutan, kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media massa lebih sering menyebutnya dengan "lumpur Lapindo", sementara kalangan ilmu kebumian lebih sering menyebutnya dengan gunung lumpur "Lusi" (*lu*mpur *Si*doarjo). Perdebatan tentang mekanisme pemicu yang tidak konklusif di tingkatan ahli kebumian menjadi sebuah hal yang sangat krusial karena menjadi alasan bagi kejaksaan untuk tidak menerima kasus ini dari polisi (*Kompas*, 14 Maret 2009). Bab ini akan memetakan pendapat para ahli tentang pemicu terjadinya lumpur Lapindo, dan secara konsisten akan menggunakan penyebutan ini.

Pada konferensi *American Association Petroleum Geologist* (AAPG) di Cape Town, Afrika Selatan tanggal 26-29 Oktober 2008 dilakukan

[1] Tulisan ini pertama kali dimuat di Jurnal Disastrum pada tahun 2009, untuk kepentingan penerbitan ulang penulis melakukan pengeditan dan penambahan informasi.

pemungutan suara untuk menguji pendapat mana yang paling masuk akal. Begitu krusialnya masalah ini rupanya sehingga dalam sebuah forum keilmuan diadakan pemungutan suara untuk menentukan pendapat (yang dianggap) benar. Ini adalah hal langka dan mungkin barangkali baru pertama kali dilakukan. Dalam pemungutan suara itu, sebanyak 42 orang peserta setuju bahwa lumpur Lapindo dipicu oleh kesalahan Lapindo Brantas Inc. pada sumur eksplorasi gas Banjar Panji 1 yang terletak sekitar 200 m di arah timur laut pusat semburan, 3 orang setuju gempa bumi Yogyakarta 27 Mei 2006 sebagai pemicu semburan, dan terakhir, sebanyak 16 orang menyatakan bahwa diskusi belum tuntas (*Kompas*, 31 Oktober 2008; Atmakusumah, 2008). Pasca konferensi Cape Town, di Indonesia, muncul faksi di kalangan pakar kebumian yang menyayangkan cara pengambilan keputusan tersebut. Cara itu dianggap tidak lazim dilakukan dalam dunia ilmu pengetahuan. Biasanya kesepakatan dalam ilmu pengetahuan diserahkan kepada masing-masing pihak yang memiliki ketertarikan, tidak pernah ada kesepakatan melalui pemungutan suara. Sebuah teori biasanya teruji seiring waktu. Akan tetapi dalam kasus Lumpur Lapindo, pemungutan suara dilakukan (Satyana, 2008). Namun, kesepakatan di tingkatan pakar menjadi penting karena itu akan berpengaruh secara politik dan ekonomi. Apabila para ahli memutuskan bahwa letusan lumpur Lapindo dipicu oleh peristiwa gempa bumi Yogyakarta dua hari sebelum letusan terjadi, selanjutnya kelompok ini kita sebut ”kubu gempa”, maka perdebatan akan bergerak ke arah ”Lapindo *tidak* bertanggung jawab terhadap ganti rugi”. Sebaliknya, apabila para ahli sepakat bahwa lumpur Lapindo dipicu oleh aktivitas pengeboran di sumur Banjar Panji 1, selanjutnya kelompok ini kita sebut ”kubu Banjar Panji”, maka perdebatan akan bergerak ke arah ”Lapindo bertanggung jawab terhadap segala kerugian yang ditimbulkan oleh peristiwa ini”. Begitu kira-kira jalan pikirannya secara kasar.

Perdebatan teoritis tentang mekanisme pemicu lumpur Lapindo diawali oleh kubu Banjar Panji melalui makalah berjudul ”Birth of a mud volcano: East Java, 29 May 2006” (Davies et al., 2007). Sejak saat itu beberapa makalah lain bermunculan, yang mana yang terbaru merespons yang sebelum-sebelumnya.

Davies et al. (2007) beranggapan bahwa lumpur Lapindo dipicu oleh aktivitas pengeboran pada sumur Banjar Panji 1. Dari model yang terdapat pada makalah ini, terlihat bahwa sumur Banjar Panji 1 sedalam 2.834 m sudah menembus beberapa formasi batuan (dari atas ke bawah). Formasi Pucangan dan Kabuh, bagian atas Formasi Kalibeng Atas yang merupakan formasi lumpur bertekanan besar *(overpressured mud)* setebal kira-kira 1.000 m dengan beberapa sisipan pasir. Selubung pemboran *(casing)* dengan diameter 33,97 cm berujung pada kedalaman 1.091 m, hanya menutupi tidak sampai setengah lumpur bertekanan besar Formasi Kalibeng Atas. Berikutnya adalah perselingan pasir dan lempung setebal kurang lebih 1.300 m yang masih merupakan anggota Formasi Kalibeng Atas, dan murni ”tanpa *casing*” *(open hole)*. Dari model terlihat bahwa mata bor sudah mencapai Formasi Kujung yang tersusun oleh (juga) *overpressured* batu gamping.

Berdasarkan temperatur material lumpur yang sampai di permukaan sebesar 70-100^0 C, dan dengan asumsi *gradient geothermal* (perubahan temperatur bumi yang berbanding lurus dengan kedalaman) sebesar 25^0 C/km dan temperatur permukaan sebesar 28^0 C, mereka memperkirakan fluida berasal dari Formasi Kujung. Akibat adanya perbedaan tekanan, fluida terus naik melalui lubang bor hingga sampai di lempung bertekanan tinggi pada Formasi Kalibeng Atas. Sepanjang perjalanannya fluida juga mengerosi batuan dinding pada lubang bor hingga menghasilkan campuran lumpur. Selain itu, tingginya tekanan pori juga menyebabkan terbentuknya rekahan hidrolik pada formasi-formasi tanpa *casing* yang dilalui pada sepanjang lubang bor. Diperkirakan rekahan pangkal erupsi kemungkinan terjadi pada Formasi Kalibeng Atas dan mengalami propagasi dari kedalaman 1-2 km hingga ke permukaan. Akibatnya, material lumpur keluar bukan melalui lubang bor. Hipotesis bahwa fluida dan lumpur berasal dari strata yang berbeda, alih-alih berkoeksistensi pada strata yang sama, diperkuat oleh kenyataan bahwa tidak mungkin porositas *overpressured mud* pada Formasi Kalibeng Atas menghasilkan air seperti komposisi material campuran yang sampai di permukaan.

Lebih lanjut, Davies et al. (2007) menyampaikan beberapa alasan bahwa tidak mungkin Lumpur Lapindo dipicu oleh gempa bumi Yogya-

karta dua hari sebelumnya. Alasannya, antara lain: 1) pada saat yang bersamaan tidak tercatat adanya erupsi gunung lumpur *(mud-volcano)* lain di Jawa; 2) gempa bumi mendahului erupsi gunung lumpur selama dua hari, likuifaksi akibat akitivitas seismik biasanya terjadi selama gempa bumi yang memicunya; 3) tidak ada laporan *kick out* (tendangan dari formasi batuan yang ditembus sumur karena perbedaan tekanan) selama dan segera sesudah gempa bumi; dan 4) andai benar bahwa gunung lumpur ini dipicu oleh gempa bumi, maka seharusnya lapisan pasir di bawah *overpressured mud* lebih kondusif untuk mengalami likuifaksi, terutama karena sifatnya yang tak kohesif. Selanjutnya, Davies et al. (2007) menyajikan beberapa alasan pendukung bahwa erupsi Lumpur Lapindo dipicu oleh aktivitas pengeboran pada sumur eksplorasi Banjar Panji 1: *pertama*, pemboran menembus *overpressured mud* yang mudah tererosi, dan diikuti oleh tertembusnya; *kedua*, *aquifer* (batuan sarang yang mengandung air) yang melepaskan air pori dalam volume besar; dan *ketiga*, lubang bor tanpa *casing* sedalam 1,7 km telah menjadi penghubung tekanan antara Formasi Kujung dengan formasi-formasi di atasnya. Bagian akhir makalah itu memperkirakan tentang kemungkinan terjadi "amblesan" *(subsidence)* di sekitar pusat semburan lumpur Lapindo.

Sebagai sanggahan terhadap makalah di atas, maka terbitlah makalah yang berjudul "Triggering and dynamic evolution of the LUSI mud volcano, Indonesia" oleh Mazzini et al. (2007) dari "kubu gempa". Mazzini et al. (2007) membuka paparan dengan preposisi yang sangat teoritis berupa pemaparan posisi lumpur Lapindo pada cekungan sedimenter belakang-busur *(back-arc sedimentary basin)* yang berdekatan dengan kompleks magmatik aktif di sebelah selatannya. Meski tidak menemukan bukti yang mengindikasikan hubungan langsung antara sistem lumpur Lapindo dengan gugusan gunung api di sebelah selatannya, tetapi makalah ini, terutama berdasarkan aktivitas lumpur yang reguler dan temperatur material semburan yang tinggi, menyebutkan bahwa lumpur merefleksikan kenampakan sistem letusan *quasi-hydrothermal*.

Ketika mulai membahas stratigrafi dan batuan yang telah tertembus mata bor terdapat perbedaan yang sangat fundamental antara data yang disajikan oleh Mazzini et al. (2007) dengan Davies et al. (2007). Jika Davies

et al. (2007) menyatakan bahwa mata bor pada sumur eksplorasi Banjar Panji 1 pada kedalaman 2.834 m sudah mencapai Formasi Kujung, maka data yang ditampilkan Mazzini et al. (2007) berbeda. Menurut Mazzini et al. (2007), rekaman *logging* (grafik yang menunjukkan karakteristik sumur, terutama jenis batuan dinding) dan *cutting* (batuan hasil gerusan pemboran) tidak menampakkan adanya bukti bahwa Formasi Kujung telah dicapai. Dengan demikian, dapat dipastikan ini adalah "tikaman yang mematikan" bagi Davies et al. (2007) yang berasumsi bahwa "Formasi Kujung sudah dicapai oleh mata bor."

Setelah membandingkan jenis mineral lempung, biostratigrafi dan *vitrinite reflectivity*, yang dibawa keluar oleh erupsi dan hasil pengeboran pada sumur eksplorasi Banjar Panji 1 sebelumnya, dapat diketahui bahwa sebagian besar material semburan berasal dari interval kedalaman mulai kira-kira 1.615 m sampai dengan kedalaman 1.828 m – meski belakangan ada material yang berasal dari kedalaman melebihi 1.871 m yang diperkirakan berasal dari proses fluidisasi ketika fluida kaya air naik dari bawah. Untuk menjawab sumber fluida yang disebut Davies et al. (2007) berasal dari Formasi Kujung, Mazzini et al. (2007) menampilkan teori dehidrasi. Fluida yang kaya air berasal dari dehidrasi mineral lempung pada kedalaman 1.109 m sampai dengan kedalaman 1.828 m. Terutama karena zona ini sudah terpengaruhi oleh proses transformasi mineral smektit-illit, yang mana hukumnya adalah: 1 m^3 smektit dapat menghasilkan sampai 0.35 m^3 air selama dehidrasi.

Tetapi tak dapat disanggah apa yang diperkirakan Davies et al. (2007) bahwa akan terjadi "amblesan" pada daerah itu menjadi kenyataan. Mazzini et al. (2007) mencatat telah terjadi amblesan berbentuk elips dengan sumbu 7 x 4 km memanjang ke arah SW-NE. Tetapi, Mazzini et al. (2007) malah menggunakan kenyataan ini untuk memperkuat pendapatnya bahwa arah memanjang amblesan searah dengan orientasi patahan regional Watukosek yang keberadaannya ditunjang oleh beberapa fakta: 1) singkapan di Watukosek; 2) pembelokan arah Sungai Porong ketika berpotongan dengan patahan; dan 3) patahan ini juga diduga telah memicu keberadaan beberapa gunung lumpur di region ini – seperti Gunung Anyar, Pulungan, Kalang Anyar, dan Bangkalan – yang semuanya terdistribusi

pada sepanjang patahan regional Watukosek yang diperkirakan. Mazzini et al. (2007) yakin bahwa patahan regional Watukosek telah mengalami reaktivasi dalam hubungannya dengan gempa bumi Yogyakarta dua hari sebelumnya. Bukti-buktinya antara lain: 1) rel kereta api yang meliuk dengan siginifikan ketika berpotongan dengan zona Patahan; 2) kenyataan bahwa sepuluh menit setelah terjadinya gempa bumi Yogyakarta 27 Mei 2006 tercatat terjadi ”hilang sebagian” pada fluida di sumur Banjar Panji 1; dan 3) berkurangnya jumlah produksi gas secara simultan di sumur Carat yang terletak dekat dengan sumur Banjar Panji 1. Jadi, disimpulkan bahwa peristiwa seismik telah memengaruhi sistem aliran fluida regional *(regional plumbing system).* Hal ini oleh Mazzini et al. (2007) dianggap menerus dengan kenyataan bahwa gunung lumpur di Purwodadi juga mengeluarkan lumpur panas setelah gempa bumi Yogyakarta 27 Mei 2006. Selama Desember 2006 dan Januari 2007 situs erupsi baru yang mirip dengan lumpur Lapindo juga lahir di Bojonegoro dan Serang.

Teori yang dibangun oleh Mazzini et al. (2007) ialah gempa bumi Yogyakarta 27 Mei 2006 memicu terbentuknya rekahan yang berasosiasi dengan patahan regional Watukosek pada *overpressured mud* dan menyebabkan fluida bisa naik. Aliran naik fluida menyebabkan terjadinya penurunan tekanan, *depresurisasi,* hingga cukup untuk mengeksolusi CO_2 dari air pori. Depresurisasi dan eksolusi, selain menyebabkan terjadinya eskalasi pada aliran fluida vertikal, juga mampu memobilisasi lumpur. Ketika mencapai kedalaman dangkal, katakanlah 200 m, secara hidrostatis tekanan berkurang dan cairan mulai mendidih hingga menghasilkan letusan air bercampur lempung hitam. Ketiga hal ini (*depresurisasi, eksolusi*, dan *pendidihan secara hidrostatis*) menjadi tenaga yang bisa bertahan lama bagi keberadaan sebuah gunung lumpur.

Makalah ketiga yang terlibat dalam perdebatan ini berjudul ”Did an Earthquake Trigger the May 2006 Eruption of the Lusi Mud Volcano?” ditulis oleh Michael Manga (2007), seorang geolog dari University of California, Berkeley. Dari apa yang disampaikan, makalah ini berada pada ”kubu Banjar Panji”. Argumen-argumen Manga (2007) didasarkan pada kenyataan bahwa erupsi sebuah gunung lumpur merupakan salah satu respons hidrologi bawah permukaan terhadap gempa bumi. Ada hubungan

formulaik antara jarak dari permukaan yang runtuh (lokasi patahan) dengan pemanjangan dan pemendekan pada kerak bumi. Dalam kasus lumpur Lapindo, melalui telaah terhadap hubungan antara jarak-sebuah-respons-hidrogeologi-dengan-episenter-gempa dengan manitude-gempa bumi, Manga (2007) menarik kesimpulan bahwa gempa bumi Yogyakarta yang terjadi dua hari sebelum erupsi Lumpur Lapindo tidak masuk dalam kategori menghasilkan respons hidrologi berupa erupsi gunung lumpur.

Manga (2007) mencatat sebelumnya ada dua gempa bumi (1976 dan 1998) yang lebih besar *magnitude*-nya dan lebih dekat jaraknya dari lokasi lumpur Lapindo tetapi tidak menyebabkan erupsi. Pada umumnya, letusan gunung lumpur tidak dipicu oleh gempa bumi, tetapi oleh penyebab lain seperti kompresi tektonik, migrasi gas atau fluida, atau bahkan gelombang laut yang menyebabkan terjadinya liquifaksi pada sedimen yang tak terkonsolidasi.

Makalah berikutnya berjudul ”The East Java mud volcano (2006 to present): An earthquake or drilling trigger?” oleh Davies et al. (2008), sebagai reaksi terhadap makalah Mazzini et al. (2007). Davies et al. (2008) memetakan tiga faktor yang memicu terbentuknya gunung lumpur di Sidoarjo: 1) gempa bumi Yogyakarta pada tanggal 27 Mei 2006; 2) aktivitas pengeboran Banjar Panji 1 sejauh kurang lebih 200 m dari pusat semburan; dan 3) kombinasi dari keduanya.

Pada bagian awal segera makalah keempat ini mengeliminasi sendiri kemungkinan pertama dan dengan argumen-argumen yang terukur. Ada beberapa argumen kunci. *Pertama*, dengan membandingkan beberapa gunung lumpur yang dipicu oleh gempa bumi, dapat dinyatakan bahwa gempa bumi Yogyakarta tanggal 27 Mei 2006 terlalu kecil secara *magnitude* dan terlalu jauh secara jarak untuk memicu terjadinya letusan. Dalam hal ini, Davies et al. (2008) menggunakan pendekatan yang dipakai Manga (2007): ada beberapa gempa bumi yang lebih besar dan lebih dekat sebelumnya yang tidak memicu erupsi. *Kedua*, perubahan pada tekanan pori karena perubahan tekanan statis akibat gempa bumi dinilai tidak cukup untuk memicu erupsi gunung lumpur. *Ketiga*, dengan melakukan pembandingan gempa bumi yang terjadi sejak tahun 1973-2007, tercatat sepuluh gempa bumi sebelum gempa bumi Yogyakarta tanggal 27 Mei

2006 yang seharusnya lebih layak menjadi pemicu lumpur Lapindo karena kesepuluh gempa bumi tersebut menghasilkan goncangan *(round motion)* yang lebih besar. Contoh utama goncangan paling kuat yang sampai di lokasi lumpur Lapindo adalah akibat gempa bumi pada 14 Mei 1992, dengan jarak kurang dari 50 km. *Keempat*, tidak ada bukti penunjang terhadap konsep yang menyatakan bahwa telah terjadi goncangan berulang yang mengakibatkan perubahan bawah permukaan menuju ke status kritis. Dan, *terakhir*, amplitudo tekanan dinamik yang disebabkan gempa bumi Yogyakarta tidaklah signifikan.

Tentang reaktivasi patahan regional Watukosek, Davies et al. (2008) berpendapat bahwa kehadiran patahan tersebut, meski didukung oleh foto satelit, tidaklah konklusif. Lagi pula, data seismik menunjukkan bahwa ada beberapa patahan di sekitar sumur dengan tanpa bukti bahwa ada satu patahan secara jelas telah berpotongan dengan Banjar Panji 1. Dengan perhitungan perubahan tekanan *coulomb,* Davies et al. (2008) menunjukkan bahwa gempa bumi Yogyakarta menghasilkan besaran yang tak berarti untuk mengaktifkan kembali patahan geser mengiri *(left-lateral fault)*. Bahkan rel kereta yang meliuk, yang dinyatakan Mazzini et al. (2007) sebagai bukti bahwa patahan regional Watukosek telah mengalami reaktivasi, oleh Davies et al. (2008) dinyatakan terjadi setelah beberapa bulan sejak erupsi, bukan pada saat gempa bumi Yogyakarta pada 27 Mei 2006. Dan memang begitulah adanya tentang rel kereta yang meliuk ini.

Lebih detail Davies et al. (2008) membahas tentang aktivitas pengeboran pada sumur Banjar Panji 1. Tampaknya, dalam makalah ini telah dicapai kesepakatan bahwa Formasi Kujung tidak dicapai oleh sumur Banjar Panji 1. Data penting yang dihadirkan oleh makalah ini adalah peristiwa kunci dalam pengeboran sumur Banjar Panji 1 sejak 6 Mei 2006 (sejak *casing* 33,97 cm terpasang) sampai 3 Juni 2006. Data dikompilasi dari rekaman *wellsite*, Lapindo Brantas, dan Tim Investigasi Independen Indonesia.

Faktor *ketiga*, kombinasi antara gempa bumi Yogyakarta 27 Mei dengan aktivitas pengeboran di sumur Banjar Panji 1 segera pula dieliminasi oleh Davies et al. (2008). Ada dua kemungkinan cara gempa bumi Yogyakarta memicu letusan lumpur Lapindo. *Pertama*, gempa bumi

memperlemah batuan pada sekeliling lubang bor dan, *kedua*, gempa bumi sedikit menaikkan tekanan fluida dalam lubang. Untuk menyanggah cara pertama, dari rekaman pengeboran terlihat bahwa tidak ada sesuatu yang istimewa terjadi dalam lubang bor selama gempa bumi. Enam jam setelah gempa bumi terjadi sebuah *mud losses* yang signifikan, tetapi lebih masuk akal bahwa *mud losses* ini disebabkan karena masuk ke dalam rekahan atau batuan berongga seperti Formasi Kujung akibat aktivitas pengeboran itu sendiri, atau karena berat lempung yang terlalu besar. Dan *mud losses* tersebut bisa diatasi. Untuk menyanggah cara kedua, berdasarkan hasil kalkulasi diketahui bahwa tekanan dinamis akibat gempa bumi dapat meningkatkan tekanan pori sebesar 22 kPa, dan nilai ini masih bisa ditolerir karena kebiasaan umum dalam pengeboran adalah tekanan total lumpur pengeboran lebih besar sebanyak 1,38 MPa dibandingkan dengan tekanan pori pada saat pencabutan mata bor.

Dengan demikian, satu-satunya faktor bagi Davies et al. (2008) yang merupakan pemicu terjadinya letusan lumpur Lapindo adalah aktivitas pengeboran pada sumur Banjar Panji 1. Singkatnya, telah terjadi *subsurface blow-out*. Momen kuncinya adalah pada 27-28 Mei 2006. Pasca hilangnya lumpur dalam sumur Banjar Panji 1 diputuskan untuk mengangkat mata bor dan pipa. Pencabutan mata bor dan pipa telah menyebabkan berkurangnya tekanan dalam sumur sehingga memungkinkan fluida dan gas formasi masuk ke dalam sumur dan naik ke permukaan. Metode normal ketika berhadapan dengan kasus seperti ini adalah menghentikan naiknya material dari dalam sumur dengan cara menutup *blowout preventors*. Segera setelahnya, tekanan dalam lubang membesar secara dramatis. Melalui monitoring yang dilakukan tercatat misalnya, tekanan dalam *annulus* (bagian dalam lubang bor yang menjadi tempat sirkulasi fluida pemboran) naik dari 1,27 MPa menjadi 7,27 MPa. Tekanan yang sangat besar di dalam lubang diperkirakan telah menyebabkan terjadinya rekahan pada bagian lubang yang tidak dipasangi *casing* (di bawah kedalaman 1.091 m), dan kemudian rekahan terpropagasi hingga sampai ke permukaan. Dugaan ini diperkuat fakta bahwa pencabutan mata bor sempat macet pada kedalaman 1.293 m. Pada kedalaman sekitar itulah diperkirakan rekahan terbentuk. Sebuah rekahan, yang tentu saja tidak akan terjadi andaikata

casing dalam sumur eksplorasi Banjar Panji 1 dipasang lebih dalam, seperti yang direncanakan sebelum pengeboran.

Informasi yang paling detail soal *casing* di Banjar Panji 1 yang dipasang tidak seperti yang direncanakan ditampilkan dalam makalah berjudul "Triggering of the Lusi Mud Eruption: Earthquake vs. Drilling Initiation" oleh Tingay et al. (2008), yang menampilkan perbandingan skema *casing* yang direncanakan dengan yang terpasang di sumur Banjar Panji 1, menunjukkan perbedaan mencolok. Dalam rencananya, seksi tanpa *casing* di sumur Banjar Panji 1 tidak melebihi 610 m. Akan tetapi, permasalahan dalam lubang seperti tendangan balik minor dari formasi batuan yang dibor dan ketakstabilan lubang bor telah menyebabkan rencana ini berantakan. *Casing* ketiga dan keempat yang berdiameter 16 dan 13 1/8 inci telah dipasang beberapa meter lebih dangkal dari rencana semula. Pemasangan dua set *casing* berikutnya – diameter 11,75 inci yang seharusnya berujung pada kedalaman 1.981 m dan *casing* berdiameter 9,675 inci yang seharusnya sampai pada kedalaman 2.834 m – telah dibatalkan. Akibatnya, sepanjang 1.742 m bagian bawah Banjar Panji 1 berada dalam kondisi "tanpa *casing*" – sebuah kondisi yang sangat rentan terhadap terjadinya tendangan balik dari formasi dan hilangnya sirkulasi lumpur pengeboran.

Makalah kelima berjudul "Mud Diapirs and Mud Volcanoes in Depression of Java to Madura: Origins, Natures, and Implications to Petroleum System" oleh Satyana & Asnidar (2008) yang menyajikan 15 poin yang mengindikasikan bahwa gempa bumi Yogyakarta pada tanggal 27 Mei 2006 berperan signifikan sebagai pemicu terjadinya lumpur Lapindo. *Pertama*, menghilangnya sebagian lumpur di sumur eksplorasi Banjar Panji 1, sepuluh menit setelah gempa bumi. *Kedua*, lumpur menghilang semua dari sumur Banjar Panji 1 setelah beberapa gempa susulan. *Ketiga*, lumpur tererupsikan dua hari setelah gempa bumi. *Keempat*, beberapa erupsi lumpur panas dan air asin paralel dengan arah memanjang struktur patahan utama di area ini. *Kelima*, erupsi lumpur tidak pernah keluar dari sumur Banjar Panji 1.

Keenam, Lumpur Lapindo berada pada zona patahan Watukosek yang pada sepanjang jalurnya ditemukan juga gunung lumpur tidur

(dormant) yang lain, yaitu Kalang Anyar, Pulungan, Gunung Anyar, dan Socah. *Ketujuh*, terbentuknya rekahan sepanjang ratusan meter di sekitar sumur beberapa hari setelah erupsi. *Kedelapan*, penurunan produksi gas di sumur Carat yang terletak dekat Lumpur Lapindo kira-kira bersamaan dengan terjadinya gempa bumi. *Kesembilan*, tiga hari setelah gempa bumi, Gunung Semeru tereaktivasi. *Kesepuluh*, 34 detik setelah getaran utama, gempa bumi Yogyakarta terekam di perairan Ujung Pangkah, dan energinya memengaruhi rekaman seismik yang kebetulan sedang disurvei di sana. *Kesebelas*, propagasi energi gempa bumi Yogyakarta cenderung ke arah timur dan timur laut. *Kedua belas*, data satelit regional memperlihatkan kehadiran patahan mayor dan rekahan dari Yogyakarta sampai Sidoarjo. *Ketiga belas*, adanya korelasi positif antara laju erupsi gunung lumpur dengan gempa bumi lain yang terjadi pada jarak 300 km dari lumpur Lapindo. *Keempat belas*, data *isotop deuterium* menunjukkan bahwa air yang dikeluarkan lumpur Lapindo mengandung fluida magmatis dari kedalaman lebih dari 20.000 kaki, mengindikasikan keberadaan patahan atau rekahan pada batuan dasar. *Kelima belas*, peliukan tiba-tiba pada rel kereta api yang terjadi setelah 27 Mei berada dan pembelokan pada Sungai Porong berada pada satu kelurusan, yaitu pada perpotongan dengan patahan Watukosek. Hal ini mengonfirmasi bahwa patahan Watukosek telah direaktivasi oleh aktivitas seismik.

Menjawab serangan terhadap publikasi ini, ”kubu Banjar Panji” menampilkan makalah dengan judul ”Subsidence and uplift of Sidoarjo (East Java) due to the eruption of the Lusi mud volcano (2006-present)” (Abidin et al. 2008). Makalah ini beranggapan bahwa patahan Watukosek tidak mengalami reaktivasi pada saat terjadinya gempa bumi Yogyakarta 27 Mei 2006. Untuk ini, Abidin et al. (2008) punya dua argumen, yaitu pergerakan patahan Watukosek jelas terjadi setelah bulan Juni 2006, dan liukan pada rel kereta api yang menjadi indikasi patahan Watukosek menunjukkan pergerakan *dextral* (ke kanan).

Setelah mengendap cukup lama, pada awal 2009 ”kubu gempa” mempublikasikan makalah yang berjudul ”Strike-slip faulting as a trigger mechanism for overpressure release by piercement structures. Implication for the Lusi mud volcano, Indonesia” (Mazzini et al. 2009). Secara garis

besar makalah tersebut menginvestigasi mekanisme yang bertanggung jawab terhadap pembentukan struktur-struktur seruakan *(piercement structures)* seperti kompleks hidrotermal dan gunung lumpur pada cekungan sedimentasi dan peranan patahan geser sebagai mekanisme pemicu terjadinya fluidisasi.

Dari hasil penelitian di lapangan, didapatkan data pendukung eksistensi patahan Watukosek yang memanjang SW-NE. Zona Patahan bahkan menerus sampai ke Pulau Madura yang diketahui melalui ekspresi permukaan berupa gunung lumpur Sening dan Bugag. Bukti-bukti lain tentang eksistensi patahan ditemukan sangat banyak, misalnya, *escarpment* Watukosek, orientasi beberapa titik semburan yang terbentuk pada tahap awal letusan lumpur Lapindo (belakangan tertutup lumpur) juga memanjang searah dengan arah memanjangnya Patahan Watukosek, rekahan di sekitar Banjar Panji 1 dengan skala lebar puluhan sentimeter dan panjang ratusan meter dengan arah yang identik NE-SW, dan lain-lain. Penampang seismik yang direkam pada 1980-an memotong lokasi Lumpur Lapindo memperlihatkan keberadaan kompleks *piercement structure* bawah permukaan.

Percobaan analogi di laboratorium yang dilakukan dalam tiga seri memberikan hasil yang menerus bahwa gerusan sekira 1 cm telah cukup untuk memicu terjadinya fluidisasi pada sepanjang zona gerusan. Fluidisasi terjadi secara simultan sesuai gerusan dengan kecepatan yang terlalu cepat untuk diikuti dengan mata telanjang. Lebih lanjut, pemodelan matematis dilakukan untuk mempelajari efek pergerakan sebuah patahan geser berskala regional seperti patahan Watukosek. Pemodelan matematis ini bukan hanya berlaku untuk kasus lumpur Lapindo, tetapi pada semua gunung lumpur yang berasosiasi dengan patahan geser. Percobaan analogi dan pemodelan matematis menghasilkan beberapa kesimpulan, di antaranya: adanya asosiasi geometris antara gerusan dan *piercement sturctures* dan kehadiran tekanan dan tegangan mendukung terjadinya fluidisasi bagi batuan bertekanan besar di bawah permukaan dan letusan pada sepanjang zona gerusan.

Makalah Abidin et al. (2009) ini juga memetakan beberapa momen geologi dalam hubungannya dengan Lumpur Lapindo. Ada dua

terma yang dipakai oleh para penulis, yaitu penyebab (*cause*) dan pemicu *(trigger).* ”Penyebab” merepresentasikan peristiwa geologi yang terjadi, latar geologi, dan kondisi eksternal, sedangkan ”pemicu” adalah tahapan final yang mendahului letusan. Untuk kasus lumpur Lapindo, ada beberapa ”penyebab” yang dicatat oleh makalah ini. *Pertama*, secara keseluruhan cekungan memperlihatkan karakter pengendapan yang cepat. *Kedua*, keberadaan zona penunjaman di sebelah selatan sebagai zona yang sangat dinamis secara tektonik. *Ketiga*, perlapisan sedimen kaya organik yang merupakan sekuen yang sempurna bagi kehadiran hidrokarbon dan ditutupi oleh tudung yang bagus berupa batuan volkaniklastik. *Keempat*, jarak yang dekat dengan kompleks vulkanik Arjuno-Welirang membentuk zona yang secara umum memiliki *gradient geothermal* yang tinggi yang menyebabkan terjadinya transformasi mineral dan geokimia yang biasanya terjadi pada kedalaman besar. Dan, *kelima*, illitisasi mineral lempung yang pada kondisi di cekungan sedimentasi normal terjadi pada kedalaman 2,5-5 km, pada kasus lumpur Lapindo telah terjadi pada kedalaman 1,1 km dan menghasilkan fluida dalam volume yang banyak.

Tentang ”pemicu”, secara umum gunung lumpur terjadi ketika kondisi kelebihan tekanan pada suatu kedalaman cukup untuk menembus lapisan di atasnya. Ketika besaran ini tercapai beriringan dengan pembentukan fluida, rekahan terpropagasi menembus tudung hingga sampai di permukaan. Dalam kasus lumpur Lapindo, selain reaktivasi patahan Watukosek, fakta lain yang mendukung bahwa gempa bumi Yogyakarta 27 Mei 2006 telah memengaruhi sistem ventilasi bumi di Pulau Jawa – dan dengan demikian momen ini dianggap sebagai pemicu semburan lumpur Lapindo – adalah bahwa Gunung Merapi dan Semeru juga memperlihatkan aktivitas yang meningkat. Mereka menutup makalah ini dengan sebuah pernyataan bahwa siginifikansi sumur Banjar Panji 1 dalam erupsi lumpur Lapindo masih merupakan debat yang berjalan, tetapi agak susah untuk menyatakan bahwa Banjar Panji 1 mampu untuk memengaruhi sistem ventilasi bumi pada skala regional.

Satu makalah berjudul ”Modeling study of growth and potential geohazard for LUSI mud volcano: East Java, Indonesia” (Istadi et al. 2009) juga berada di ”kubu gempa”. Makalah ini dibuka dengan kondisi aktual

lumpur Lapindo per Agustus 2008, meliputi lokasi dan posisinya terhadap sumur Banjar Panji 1, laju material erupsi yang dihasilkan dan perdebatan yang masih berjalan seputar mekanisme pemicu. Tentang hal terakhir makalah ini memberikan penekanan mengenai asumsi yang berkembang di kalangan masyarakat luas bahwa lumpur Lapindo dipicu oleh *underground blowout* yang terjadi di sumur Banjar Panji 1. Akan tetapi belakangan, setelah data lapangan dan analisis tekanan pada sumur Banjar Panji 1 diintegrasikan dan dianalisis, disimpulkan erupsi lumpur Lapindo tidak berhubungan dengan sumur Banjar Panji 1. Alasan kunci yang ditampilkan untuk menunjang pendapat di atas adalah: *pertama*, tekanan fluida dalam sumur terlalu kecil untuk merekahkan dinding; *kedua*, tidak ada tekanan yang menerus dalam sumur yang mempropagasikan rekahan hingga mencapai permukaan karena *blowout preventor* dalam keadaan terbuka; *ketiga*, sumur dalam keadaan total terbuka pada saat terjadinya letusan dengan debit 50.000 m^3 $hari^{-1}$, pada jarak sekira 200 m dari sumur. Maka, hal yang paling memungkinkan sebagai pemicu letusan lumpur Lapindo bagi makalah ini adalah reaktivasi sistem patahan Watukosek. Kalau ini yang terjadi, maka letusan lumpur Lapindo tidak dapat dihentikan dan bisa jadi akan kontinyu sampai beberapa dekade.

Ada satu makalah lagi dari kubu gempa dengan judul ”The LUSI Mud Volcano Triggering Controversy: Was it Caused by Drilling?” oleh Sawolo et al. (2009), yang pada intinya, dengan berdasarkan data pemboran seperti laporan harian aktivitas pemboran di Banjar Panji 1, laporan harian geologi, dan laporan harian *mud loggers* mengambil kesimpulan bahwa lumpur Lapindo bukan disebabkan oleh aktivitas pemboran pada sumur eksplorasi gas Banjar Panji 1.

Pada 2011, diskusi masih terus berlangsung meskipun sudah mulai bergeser dari yang tadinya di seputar penyebab dan pemicu ke wilayah dampak dan penanganan. Kubu Banjar Panji kembali menulis satu makalah dengan judul ”Probabilistic longetivity for the LUSI mud Volcano, East Java” (Davies et al. 2011). Dengan mengambil titik tolak batuan karbonat pada kedalaman 2.500-3.500 m sebagai sumber air, makalah ini menyimpulkan bahwa letusan bisa berlangsung sampai 26 tahun. Dan dengan laju amblesan permukaan sebesar 1-5 cm per hari, maka dalam

waktu 26 tahun amblesan yang akan terbentuk di sekitar lumpur Lapindo diperkirakan akan mencapai antara 95-475 m.

Dari penelusuran terhadap publikasi-publikasi ilmiah seperti yang didedahkan di atas, maka kita dapat melihat bahwa sesungguhnya permasalahan lumpur Lapindo adalah sebuah debat keilmuan yang panjang dan mungkin akan masih terus berlangsung jauh ke depan. Kita juga bisa melihat bahwa kasus lumpur Lapindo adalah sebuah lautan data dan karenanya menjadi sebuah narasi yang terbuka. Siapa pun, dengan kepentingan apa pun, berdasarkan teori yang mana pun dan pada akhirnya dengan tujuan apa pun, bisa ”menampilkan” data yang ia butuhkan, menafsirkannya dengan lain cara, dan menampilkan narasi sendiri yang bukan hanya berbeda, tetapi juga sering bertolak belakang dengan narasi selain dirinya.

Referensi

——, (2008). ”Geolog Dunia Yakin Lumpur Tak Dipicu Gempa.” Kompas (31 Oktober 2008), h. 13.

——, (2009). ”Keterangan Ahli Sama, Lapindo Baru Bisa Maju.” *Kompas* (14 Maret 2009), h. 2.

Abidin, H.Z., Davies, R.J., Kusuma, M.A., Andreas, H. & Deguchi, T., (2008). ”Subsidence and Uplift of Sidoarjo (East Java) due to the Eruption of the Lusi Mud Volcano (2006—present).” *Environmental Geology*, Vol. 57, 833-844.

Atmakusumah, F., 2008. ”Voting Lapindo di Negeri Orang.” *MBM Tempo* (9 November 2008), h. 40.

Davies, J.R., Swarbrick, R.E., Evans, J.E. & Mads, H., (2007). ”Birth of a Mud Volcano: East Java, 29 May 2006.” *GSA Today*, Vol. 17, 4-9.

Davies, R.J., Brumm, M., Manga, M., Rubiandini, R., Swabrick, R. & Tingay, M., (2008). ”The East Java Mud Volcano (2006 to present): An Earthquake or Drilling Trigger?” *Earth and Planetary Science Letters*, Vol. 272, 627-638.

Davies, R., Mathias, S. A., Swarbrick, R. E. & Tingay, M. J., (2011). ”Probabilistic Longetivity Estimate for the LUSI Mud Volcano, East Java.” *Journal of the Geological Society*, Vol. 168, 517-523.

Istadi, B.P., Pramono, G.H, Sumintadireja, P. & Alam, S., (2009). ”Modeling Study of Growth and Potential Geohazard for LUSI Mud Volcano: East Java, Indonesia.” *Marine and Petroleum Geology*.

Manga, M., (2007). ”Did an Earthquake Trigger the May 2006 Eruption of the Lusi Mud Volcano?” EOS, Vol. 88(18), 201.

Mazzini, A., Nermoen, A., Krotkiewski, M., Podladchikov, Y., Planke, S. & Svensen, H., (2009). ”Strike-slip Faulting as a Trigger Mechanism for Overpressure Release by Piercement Structure. Implications for the Lusi Mud Volcano Indonesia.” *Marine and Petroleum Geology*.

Mazzini, A., Svensen, H., Planke, S. & Malthe-Sørenssen, A., (2007). ”Triggering and Dynamic Evolution of the LUSI Mud Volcano, Indonesia.” Earth and Planetary Science Letters, Vol. 261, 375-388.

Satyana, A.H. & Asnidar, (2008). ”Mud Diapirs and Mud Volcanoes in Depressions of Java to Madura: Origins, Natures, and Implication to Petroleum System.” Proceedings for Indonesian Petroleum Association (IPA), 32nd Annual Convention & Exhibition, IPA08-G-139.

Satyana, A.H., (2008). ”Laporan Perdebatan Asal Lusi di AAPG Capetown.” Diakses dari http://hotmudflow.wordpress.com/page/2/ pada 30 Oktober 2008.

Sawolo, N., Sutriono, E., Istadi, B.P. & Darmoyo, A., (2009). ”The LUSI Mud Volcano Controversy: Was it Caused by Drilling?” *Marine and Petroleum Geology*.

Tingay, M., Heidbach, O., Davies, R. and Swarbrick, R., (2008). ”Triggering of the Lusi Mud Eruption: Earthquake vs. Drilling Initiation.” *Geology*, Vol. 36, 639-642.

Bab 2

Berebut Kebenaran: Politik Pembentukan Subjek pada Kasus Lapindo[1]

ABDIL MUGHIS MUDHOFFIR

AKHIR OKTOBER 2008 para geolog dari berbagai negara mengadakan konferensi internasional. Pembahasan tentang penyebab semburan lumpur di Sidoarjo merupakan salah satu topik khusus dari puluhan topik dalam konferensi itu. Tahun sebelumnya masalah yang sama juga menjadi pembahasan dalam konferensi serupa, dan pandangan dominan melihat masalah semburan lumpur di Sidoarjo sebagai bencana alam. Tahun 2008 berlangsung dua pertemuan geolog tingkat dunia. Yang pertama diadakan di London dan berlangsung secara tertutup dihadiri oleh 74 ilmuwan tanpa simpulan: masing-masing ilmuwan tetap pada pendapatnya. Pertemuan kedua diadakan di Cape Town, Afrika Selatan, oleh American Association of Petroleum Geology (AAPG) berlangsung secara terbuka dihadiri 1.008 orang, dan hasilnya disimpulkan melalui mekanisme pemungutan suara.

---

[1] Tulisan ini disarikan dari Tesis Pascasarjana Departemen Sosiologi Universitas Indonesia (2008) berjudul Berebut Kebenaran: Governmentality pada Kasus Lapindo, terutama pada Bab 3 dengan beberapa penyesuaian berdasarkan perkembangan terbaru kasus Lapindo.

Hanya 74 orang yang memiliki hak suara dalam konferensi itu. Lebih dari lima puluh persen, yakni 42 orang memandang bahwa menyemburnya lumpur di Sidoarjo disebabkan oleh pengeboran yang dilakukan Lapindo, 3 suara setuju gempa, 13 peserta setuju kombinasi keduanya, dan 16 peserta menganggap diskusi belum tuntas.

Konferensi tersebut membuat beberapa media massa nasional kembali mengangkat topik semburan lumpur di Sidoarjo. Meski hampir semua media mengangkat topik dengan sudut yang sama, namun dengan pemilihan judul, pembuka berita, dan cara penyampaian yang berbeda menggambarkan keberpihakan media tersebut. Sebagian besar media membuat judul dan pembuka berita tentang simpulan akhir konferensi itu, sementara yang lain memberikan gambaran tentang proses sebelum membahas simpulan akhir konferensi itu.[2] Media yang menitikberatkan pada hasil konferensi, *Kompas* dan *Jakarta Post*, memberikan gambaran pada publik bahwa bencana lumpur di Porong disebabkan oleh kesalahan pengeboran, sedangkan media yang menitikberatkan pada proses, Majalah *Tempo*, memberi kesempatan bagi publik menimbang proses terlebih dahulu sebelum menilai sendiri hasil akhir konferensi.

Perdebatan tersebut menggambarkan bahwa produksi pengetahuan yang ilmiah sekalipun merupakan bentuk konstruksi artifisial terhadap fenomena alam. Hal ini tergambar dari konferensi para geolog yang berlangsung di Cape Town dalam membahas sebab semburan, yang keputusannya diambil melalui voting, suatu mekanisme yang politis, bukannya melalui perdebatan yang metodologis. Artinya, alam tidak dibiarkan bicara untuk dirinya sendiri (lih. Latour, 2004 & 2005), yang dengan demikian kebenaran ilmiah tidak lain hanyalah konsensus epistemologis dari para ilmuwan dalam memandang fenomena semburan.

---

[2] Lihat contoh pada berita *Kompas* (31 Oktober 2008) berjudul ”Geolog Dunia Yakin Lumpur Tak Dipicu Gempa” dan *Jakarta Post* (31 Oktober 2008) berjudul ”Geologists Blame Gas Drilling for Indonesia Mud Disaster” merupakan berita yang judul dan pembukanya menggambarkan bahwa konferensi geolog internasional menyimpulkan penyebab semburan lumpur adalah Lapindo, dan simpulan ini menjadi referensi yang legitimate dalam memandang sebab semburan. Majalah *Tempo* (2-8/11/2008) memberi judul ”Voting Lapindo di Negeri Orang” dengan lead berita yang membahas proses voting daripada kemenangan hasil voting merupakan contoh berita yang lebih mempersoalkan proses daripada mencari legitimasi pandangan dalam melihat kasus Lapindo.

Berpijak pada kajian-kajian sebelumnya tentang kasus semburan lumpur, tulisan ini memberikan gambaran dan analisis yang berbeda karena berusaha untuk mengambil posisi tidak terlibat dalam perdebatan para ilmuwan tersebut. Tulisan ini disusun juga tanpa pretensi bersandar pada salah satu pandangan dengan asumsi bahwa setiap pandangan, baik yang diproduksi oleh ilmuwan maupun awam, merupakan bentuk dari konstruksi mereka dalam memaknai fenomena semburan. Oleh sebab itu, tulisan ini justru mempertanyakan asumsi-asumsi yang dibangun oleh aktor-aktor dalam memaknai fenomena semburan, dan menyelidiki bagaimana proses terbentuknya sebuah pandangan yang diyakini sebagai kebenaran ”yang tidak perlu dipersoalkan lagi ”.

Tulisan ini merupakan upaya menggambarkan bagaimana ”klaim kebenaran” dalam memandang kasus semburan lumpur di Sidoarjo diperebutkan oleh berbagai aktor. Klaim kebenaran itu diperebutkan dengan mengonstruksi wacana dan pengetahuan yang dianggap sahih tentang sebab semburan. Namun, persoalannya bukan sekadar terdapat perebutan klaim kebenaran, atau pertarungan wacana dalam memandang semburan, tetapi bahwa setiap wacana memiliki implikasi besar atas konstruksi tentang realitas dan tatanan sosial yang dibayangkan, serta bagaimana tindakan subjek korban dibentuk. Aktor-aktor tertentu memanfaatkan konstruksi pengetahuan tentang semburan sebagai dasar dalam menentukan skema penyelesaian kasus ini.

Merujuk Foucault (1980, 1982a, & 1982b), wacana berkaitan dengan produksi pengetahuan yang tidak lepas dari bagaimana kekuasaan dijalankan. Analisis wacana menjadi penting untuk memahami produksi pengetahuan, kekuasaan, dan implikasinya terhadap politik pembentukan subjek. Wacana menjadi dominan karena adanya aktor-aktor yang mengorganisasikan pengetahuan secara sistematis, sehingga menjadi otoritatif dan *legitimate* dalam menerangkan sesuatu. Wacana itu menjadi dominan juga karena dapat memengaruhi publik, terutama subjek yang berkaitan dengan produksi pengetahuan itu, yang diterima sebagai penjelasan tentang realitas yang tidak perlu dipersoalkan lagi. Tulisan ini menganalisis bagaimana proses pengendapan *(inculcation)* organisasi pengetahuan itu, sehingga diterima sebagai kebenaran dalam menerangkan realitas.

Relasi antara pembentukan rezim kebenaran dengan bagaimana kekuasaan dijalankan dapat dilihat melalui bagaimana aktor-aktor dominan dalam pembentukan wacana mengonstruksi realitas yang dibayangkannya. Saya merujuk konsep ”normalisasi” dari Foucault dalam menggambarkan model relasi kekuasaan yang dijalankan dalam mengonstruksi praktik sosial korban dan tatanan sosial yang hendak diwujudkan. Dalam studi pembangunan, ide *developmentalism* merupakan gambaran mengenai bagaimana tatanan sosial seharusnya dikonstruksi.[3] Agen-agen pembangunan membentuk narasi tentang bagaimana tatanan sosial yang normal yang dapat mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Ini dilakukan dengan terlebih dahulu membuat definisi tentang ”abnormalitas” (e.g. kemiskinan, pengelolaan sumber daya alam yang buruk, pemerintahan yang koruptif), sehingga agenda pembangunan menjadi relevan. Kata kuncinya terletak pada ”problematisasi”.

”Problematisasi” selalu mengandung kehendak mengonstruksi realitas dalam ruang definisi ”normalitas”. Pada kasus Lapindo, definisi normalitas berkaitan dengan konstruksi tentang pemulihan kembali kondisi lingkungan dan kondisi sosial akibat semburan. Aktor-aktor dominan dalam kasus ini masing-masing memiliki definisi ”abnormalitas” tatanan sosial dan lingkungan akibat semburan. Para aktivis memproblematisasikan akibat semburan tidak hanya mencakup ganti-rugi materiil seperti terdapat dalam Perpres No. 14 Tahun 2007, tetapi juga kerusakan lingkungan secara lebih luas yang berdampak pada pertanian, pertambakan, dan kesehatan masyarakat sekitar. Sementara itu, tuntutan korban pada konteks tertentu tidak lebih dari apa yang telah diatur dalam Perpres. Ketentuan ganti-rugi Perpres menurut para aktivis merupakan model ganti-rugi minimalis karena terbatas hanya menyangkut kebutuhan materiil. Kondisi itu mendorong para aktivis mewacanakan pada korban mengenai kerugian yang lebih besar akibat persoalan yang lebih luas dari sekadar tenggelamnya pemukiman penduduk. Para aktivis menghendaki korban tidak hanya menuntut ganti-rugi dalam kerangka skema Perpres tetapi

[3] Pembangunan menjadi isu sentral dalam kajian politik ekologi di dunia ketiga. Lihat Bryant, R. L. & S. Bailey, (1997) Third World Political Ecology, London: Routledge.

juga menuntut pemulihan kondisi lingkungan dan sosial yang lebih luas. Sementara itu, definisi abnormalitas oleh Lapindo terbatas pada rumusan skema Perpres. Lapindo mendukung ilmuwan yang berpandangan bahwa semburan lumpur tidak mengandung zat yang membahayakan kesehatan, sehingga skema *recovery* sebatas pemberian ganti-rugi yang diukur dari tenggelamnya pemukiman warga. Lapindo tidak berkehendak melakukan pemulihan lebih besar seperti yang dituntut para aktivis karena berpegang pada pandangan bahwa semburan lumpur belum tentu berkorelasi dengan aktivitas pengeboran.

Tulisan ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sepanjang tahun 2008 hingga 2009, sehingga saya dapat turut mengamati perubahan-perubahan yang paling menentukan terkait skema ganti-rugi korban. Selama penelitian, saya beberapa kali melibatkan diri dalam advokasi para aktivis yang melakukan pendampingan korban sejak di pengungsian Pasar Baru Porong hingga di Posko Bersama. Sesekali saya larut dalam aktivitas keseharian warga, tetapi dalam banyak kesempatan saya memilih mengambil jarak agar dapat melakukan refleksi atas temuan penelitian. Selain melakukan wawancara dengan berbagai aktor, baik dengan para aktivis, pemerintah, maupun berbagai kelompok korban, saya juga melakukan pengamatan terlibat dalam rapat-rapat koordinasi aktivis maupun dalam beberapa aksi demonstrasi warga. Sementara untuk kepentingan perkembangan kasus terkini saya peroleh dari berbagai media, baik media arus utama maupun media alternatif para aktivis.

Perebutan Kebenaran

Awal masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, oleh berbagai media sering disebut sebagai periode yang banyak terjadi bencana alam; bermula dari kejadian gempa bumi dan Tsunami di Aceh pada tahun 2004, kemudian menyusul gempa Nias yang menelan ribuan korban jiwa dan meluluhlantakkan bangunan serta pemukiman warga. Tidak berselang lama, tahun 2006 kembali terjadi peristiwa serupa, yakni gempa bumi yang melanda Kota Yogyakarta, bagian tengah Pulau Jawa. Kejadian ini terus diikuti rentetan kejadian bencana alam lainnya: meletusnya

Gunung Merapi di Sleman, Yogyakarta, gempa bumi dan tsunami di Pangandaran, dan meletusnya Gunung Kelud di Jawa Timur. Pada tahun yang sama, pada rentang waktu yang berdekatan, di bagian timur Pulau Jawa, di daerah Sidoarjo, terjadi peristiwa menyemburnya lumpur panas dan bercampur gas. Semburan lumpur ini berada di sekitar area eksplorasi migas (sumur Banjar Panji 1) perusahaan pertambangan Lapindo Brantas Incorporation (Lapindo), milik politisi Golkar, Aburizal Bakrie. Perhatian masyarakat pada saat itu masih terkonsentrasi pada upaya penanganan dan pemulihan pasca gempa bumi di Yogyakarta. Namun, lumpur panas yang menyembur sejak dua hari peristiwa gempa bumi Yogyakarta kian hari kian luas menggenangi pemukiman warga, areal persawahan penduduk, dan pabrik. Peristiwa ini akhirnya mengundang perhatian media massa untuk menjadikannya sebagai berita menggantikan pemberitaan gempa Yogyakarta.

Kejadian ini segera menjadi bahan perdebatan para pengamat perminyakan, geolog, dan masyarakat umum, tentang bagaimana lumpur panas bercampur gas dapat menyembur di daerah Sidoarjo. Beberapa geolog, ahli perminyakan, dan pertambangan memandang peristiwa seperti ini umum terjadi di beberapa areal pengeboran. Artinya, menyemburnya gas dan lumpur di areal sumur Banjar Panji 1 merupakan akibat dari eksplorasi migas yang dioperatori oleh Lapindo. Perusahaan ini dilaporkan di beberapa media massa telah lalai memasang ”selubung pengaman” *(casing)* yang menurut prosedur tetap pengeboran seharusnya telah dipasang. Berdasarkan dokumen rapat teknis Lapindo dan rekanan pada 18 Mei 2006, saat pengeboran mencapai 8.500 kaki, PT Medco Energi sebagai pemegang 32% saham Blok Brantas, telah memperingatkan agar Operator blok, Lapindo, untuk segera memasang selubung pengaman berdiameter 9-5/8 inci (Akbar, 2007: 76). Namun, hingga pengeboran mencapai kedalaman 9.297 kaki (sekitar 2.834 meter), prosedur baku pengeboran itu diabaikan. Menurut Akbar, *casing* hanya dipasang sampai kedalaman 3.580 kaki, sisanya lebih dari 5.000 kaki dibiarkan bekerja tanpa *casing* (*Ibid*.). Berdasarkan keterangan mekanik pengeboran PT Tiga Musim Mas Jaya, Syahdun, semburan gas dan lumpur disebabkan pecahnya formasi sumur pengeboran yang terjadi sekitar pukul 04.30 WIB (*Kompas*, 31

Mei 2006). Bor macet saat akan diangkat ke atas untuk mengganti alat. Gas yang tidak bisa naik melalui saluran *fire pit* dalam rangkaian pipa bor pada akhirnya menekan ke samping dan keluar permukaan melalui rawa (Akbar, 2007: 77). Senin dini hari 29 Mei 2006, lumpur menyembur hingga ketinggian 40 meter pada jarak 150 meter dari lokasi pengeboran.

Pandangan para ilmuwan ini tidak membuat Lapindo tinggal diam. Perusahaan ini merespons pandangan tersebut dengan mencari argumentasi yang juga didasarkan keterangan para ilmuwan agar perusahaannya tidak menanggung dampak yang ditimbulkan dari semburan itu. Namun, respons yang terkesan defensif[4] itu justru tidak menghasilkan apa yang diharapkan Lapindo dalam membangun citra pada publik bahwa perusahaan ini tidak bersalah. Alasan Lapindo dengan menyitir argumentasi geolog yang menyatakan kejadian itu berkorelasi dengan gempa Yogyakarta dua hari sebelumnya justru dipandang sebagai argumentasi yang mengada-ada. Menurut Amien Widodo, geolog pada Pusat Studi Bencana, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, (ITS) Surabaya, jika memang karena gempa, *blow-out* bisa dimungkinkan apabila gempa bumi di Porong dan sekitarnya mencapai 6 SR. Kenyataannya, efek gempa yang mencapai Porong dan sekitarnya hanya tinggal 2,2 SR (Akbar, 2007: 78). Artinya, *blow-out* terjadi disebabkan karena kelalaian operator dalam melakukan pengeboran.

Geolog Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), Soffian Hadi, memiliki analisis berbeda akan hal itu. Menurutnya, semburan lumpur merupakan kejadian alamiah biasa di daerah delta dan fenomena semacam itu biasanya disebut sebagai gunung lumpur. Gempa Yogyakarta, menurutnya, memang bukan ”pemicu” *(trigger)* terjadinya semburan lumpur, tetapi punya korelasi dengan terjadinya semburan lumpur. Fenomena alam tersebut, seperti halnya gempa bumi dan gunung meletus merupakan sebuah keharusan sebagai cara bumi menyeimbangkan dirinya. Di Yogyakarta dan Pangandaran dengan struktur tanah yang padat pergeseran lempeng bumi itu mengakibatkan terjadinya gempa bumi dan meletusnya

---

[4] Menurut Rudi Rubiandini, respons Lapindo yang mengemukakan pandangan kegempaan baru muncul belakangan setelah Tim Investigasi Kementerian ESDM yang dipimpinnya menyatakan semburan lumpur berkorelasi dengan pengeboran pada September 2006. Ini menunjukkan bahwa hal itu lebih tampak sebagai reaksi menghindari tanggung jawab daripada sebagai upaya mencari kebenaran ilmiah.

Gunung Merapi, sama seperti kejadian gempa Aceh yang disusul gempa di Nias. Sedangkan di daerah delta Sungai Brantas dengan struktur tanah yang kenyal pergeseran itu mengakibatkan terjadinya gunung lumpur. Artinya, ”penyebab” *(cause)* gunung lumpur menurut Soffian adalah peristiwa alamiah pergeseran lempeng bumi yang terjadi secara periodik. Akan tetapi, proses keluarnya lumpur bersuhu tinggi yang berada di dekat areal pengeboran Lapindo masih memunculkan tanda tanya baginya: ”apakah rekahan keluarnya lumpur itu disebabkan kesalahan pengeboran atau juga terjadi secara alamiah?” Berikut kutipan wawancara dengan Soffian Hadi:

> *Mud-volcano* itu peristiwa di mana fluida lumpur keluar, artinya ada kemungkinan teoritis bahwa ada ”lumpur” yang terjebak di bawah. Ada selat Madura purba di mana di dasarnya diendapkan lumpur, terus di atasnya diendapkan lapisan hasil letusan gunung api. Lumpur itu terjebak antara dasar samudera dengan timbunan gunung api. Karena dia terjebak maka kondisinya sebetulnya padat tapi masih banyak mengandung air. Airnya *nggak* sempat lepas, tersekat, terjebak di situ. Kalau suatu saat dia keluar, artinya lapisan penutup yang menjebak tadi mengalami rekahan supaya lumpur tadi mempunyai jalan keluar. Itu *possibilities* pertama. Ada sebuah rekahan atau jalan. Di sini mulai ada beberapa interpretasi. Yang pertama rekahan itu terjadi di-*guide* oleh kesalahan pengeboran, yang kedua rekahan itu terbentuk secara alami. *Nah*, mana yang terjadi pada kasus ini? Kita sedang melakukan evaluasi terus-menerus untuk meyakini mana yang sesungguhnya terjadi pada kasus ini.[5]

Namun demikian, peristiwa menyemburnya lumpur itu menurut Soffian sebenarnya banyak terjadi dalam tambang migas yang biasanya dipicu oleh pengeboran. Jumlah peristiwa semacam itu bahkan mencapai ratusan hingga ribuan dan semuanya dapat diatasi secara teknis. Berbagai kejadian semacam itu pada akhirnya membuat para ahli perminyakan menyangka semburan lumpur di Porong juga diakibatkan oleh pengeboran. Akan tetapi, menurut Soffian, besarnya volume serta tingginya tekanan dan suhu lumpur yang keluar menunjukkan kejadian tersebut bukan disebabkan oleh *underground blow-out.*

[5] Wawancara dengan Soffian Hadi, 8 Oktober 2008.

> Itu jumlahnya ratusan, ribuan di dunia, dan semuanya bisa diatasi. Yang di sini (di Sidoarjo), orang semula menyangka akibat *drilling*. Tapi kalau kita melihat akibatnya, maka ini tidak *equal* dengan kasus-kasus kesalahan pengeboran tadi. Katakan yang paling parah dalam sistem *drilling* itu di Brunei, sehari cuma mengeluarkan lumpur 8.000 m^3. Sementara di sini hari ini 80.000 – 100.000 m^3. Nah itu bukan *behavior* dari sebuah *undergroud blow-out* lagi.
>
> ... Suhu yang ada di lumpur bor itu cuma 50^0C. Sementara di situ 100^0C. Ada perbedaan suhu, sirkulasi masih jalan, terus 2-3 bulan setelah semburan, lubang sumur ini berhasil dicoba lagi dimasukkan alat pendengar, perekam di bawah, dia tidak merekam adanya gerakan lumpur di bawah dari lubang sumur.
>
> Kompor itu mendidihkan air, airnya mengalir ke permukaan jadi uap, uapnya ketika berjalan itu menggerus lempung-lempung di kiri-kanan saluran, lempung itu yang menjadi lumpur. Nah, kenapa saya tidak setuju ini perilaku *reservoir* karena tidak ada *reservoir* pun di seluruh dunia yang seperti ini. Mana ada orang ngebor terus minyaknya keluar sendiri bertahun-tahun ....[6]

Argumentasi Soffian Hadi dari BPLS tersebut, yang dalam hal ini merepresentasikan ”pemerintah”, secara jelas mengarah pada pendefinisian semburan lumpur sebagai *bencana alam*. Implikasinya, penanganan dan skema pemulihan kondisi lingkungan dan sosial menjadi beban negara. Namun, sikap ini juga tidak diambil secara tegas oleh pemerintah; jika memang bencana alam, maka seharusnya Lapindo tidak ikut menanggung kerugian warga. Sebaliknya, jika semburan lumpur itu kesalahan Lapindo, maka semua skema penyelesaian ganti rugi warga semestinya menjadi tanggung jawab perusahaan.

Sementara itu, Rudi Rubiandini, mantan ketua Tim Investigasi yang kini menjadi Wakil Menteri ESDM,[7] membantah adanya pendapat

---

[6] Wawancara dengan Soffian Hadi, 8 Oktober 2008.

[7] Posisi baru ini tidak membuat Rudi Rubiandini, yang sejak awal bersikap keras terhadap Lapindo, lantas memberi perhatian lebih dalam upaya menyelesaikan kasus Lapindo, yang setidaknya dalam kapasitas dan posisinya adalah memberikan kejelasan dan kepastian ilmiah atas sebab semburan. Ini terlihat dari sejumlah program kerja yang dibuatnya, tidak ada poin tentang penyelesaian kasus Lapindo.

lain yang menyatakan sebagai bukan kesalahan Lapindo. Menurutnya, gunung lumpur *(mud-volcano)* bukanlah ”penyebab” semburan lumpur, tetapi hanyalah ”istilah” untuk menyebut hasil dari proses keluarnya air dari bawah tanah yang menggerus tanah liat yang dilewatinya, sehingga memunculkan lumpur yang menggunung. Dengan begitu yakin, ia juga mengatakan bahwa semburan lumpur itu hanyalah peristiwa teknis biasa yang kerap terjadi dalam pengeboran migas. Karena itu, masalah semacam itu baginya sangat mudah diatasi. Namun, karena tidak ada kemauan dari pemerintah, persoalan itu menjadi berlarut-larut.

> Kalau kami diberi kesempatan, sebentar saja mati itu. Kami sudah buktikan 2008 Desember di Gresik kasus yang sama, mati dalam 4 hari. Itu bukan hal besar, *peanut* itu bagi *enginering* urusannya. Jangan dianggap itu tidak bisa dimatikan ... siapa bilang volumenya besar, tidak sebesar yang diceritakan, malah kadang-kadang mati berhenti. Saya saja masuk ke kawahnya lagi berhenti. Kalau memang volumenya satu juta barel per hari, ibaratnya lumpur yang keluar itu mencapai sejuta drum per hari. Tapi itu tidak. Ketika aliran berhenti, itu malah bener-bener berhenti, cerita sejuta barel itu malah *nggak* ada sama sekali. Adanya asap itu cuma penguapan saja. Jadi itu *peanut* untuk dimatikan, *nggak* ada masalah.[8]

Rudi juga tidak memercayai adanya perdebatan di antara para ilmuwan. Baginya sudah cukup jelas bahwa semburan itu diakibatkan oleh pengeboran Lapindo. Itu juga hasil temuan Tim Investigasi yang disampaikan pada September 2006 kepada Menteri ESDM dan hasil itu juga dijadikan rujukan pemerintah dalam upaya penanggulangan lumpur dengan dikeluarkannya Keppres No. 13 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Penanggulangan Lumpur Panas di Sidoarjo (Timnas PLPS). Yang artinya, semua kerugian masyarakat, pemulihan lingkungan, serta upaya mematikan semburan dibebankan kepada Lapindo. Akan tetapi, sejak saat itu pula mulai muncul pandangan yang menyatakan semburan lumpur di Porong sebagai bencana alam yang berkaitan dengan gempa Yogyakarta. Menurut Rudi, ini merupakan bagian dari upaya Lapindo menghindari tanggung

---

[8] Wawancara dengan Rudi Rubiandini, 12 Agustus 2009.

jawab dengan cara mengulur-ulur penyelesaian dan mengaburkan posisi kasus dengan menghadirkan pandangan lain.

> Perdebatan itu dibuat. Sebelum September 2006 tidak ada perdebatan. Hanya satu penyebab. Sejak September 2006 dibuatlah skenario; di lapangan dihambat, terjadi sabotase agar *relief well* tidak jalan, diklaim uang US$50 juta sudah habis padahal *report*-nya masih 20%. Sejak itu mulai pula dilakukan gerilya; dibuat seminar-seminar membentuk opini, ambil dari luar negeri. Tapi luar negeri juga bukan dari Amerika, Inggris, atau Eropa yang jelas *ngerti* pemboran. *Ngambilnya* dari Kazakhstan yang tidak *ngerti* pemboran. Mereka cuma *ngerti mud-volcano* saja. Jadi sudah terarah. Jadi itu dibentuk seolah-olah ada opini baru, dan dibentuk seolah-olah dua opini itu seimbang. Tetapi ketika masuk ke DPR diarahkan supaya yang muncul di depan mereka itu adalah ahli mereka, jadilah kesimpulan DPR mengatakan itu bencana alam. Tetapi sebelum itu semua saya sudah *denger* dari Pak Menteri sendiri bahwa akan ada skenario bencana alam oleh ketua DPR, tapi akhirnya baru kejadian enam bulan kemudian. Jadi sekarang kalau di media seolah-olah ini semuanya normal, ada dua pendapat sehingga ada begini, begitu itu berarti kita *ngikutin* keinginan Lapindo. Sebetulnya dari awal Lapindo sudah tidak mau memenuhi hak, pembayaran, cuma lagi cari jalan di tengah jalan, makanya diulur-ulur sampai akhirnya keluar SP3. Itu sudah bagian dari skenario.[9]

Di tengah-tengah penghakiman publik terhadap Lapindo atas kasus semburan lumpur ini, Medco Energi Internasional Tbk. sebagai salah satu pemegang saham Lapindo, yang semula mengklaim telah mengingatkan operator pengeboran agar memasang *casing* di kedalaman 8.500 kaki, segera beranjak kaki untuk tidak terlibat lebih jauh dalam kasus ini. Medco menjual konsensi Blok Brantas sebesar 32% pada Prakarsa Group, perusahaan yang masih satu pemilik dengan Energi Mega Persada (pemilik Lapindo Brantas). Perusahaan ini adalah anak perusahaan Bakrie yang bergerak di industri semen. Akbar (2007: 167) menduga, Prakarsa Group berani mengambil risiko membeli saham Medco karena nantinya

[9] Wawancara dengan Rudi Rubiandini, 12 Agustus 2009.

akan memanfaatkan material lumpur sebagai bahan baku semen. Akbar (2007) secara jelas mencurigai adanya konspirasi di balik kasus ini, mulai dari aktor-aktor yang terlibat hingga strategi yang dimainkan. Analisis konspiratif akan muncul ketika terdapat sejumlah fakta yang tidak cukup memadai dalam menggambarkan realitas, namun korelasi fakta-fakta itu terlihat jelas jika dirangkai melalui dugaan-dugaan. Ada beberapa persoalan yang merangsang orang menjadi berpikir konspiratif dalam melihat kasus ini jika melihat pemaparan Akbar, antara lain: (a) lambannya proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, tidak adanya penetapan status atas kasus ini dari pemerintah, proses perizinan yang menyalahi aturan;[10] (b) tidak dipatuhinya aturan pengeboran miring yang seharusnya dilakukan di kawasan Porong;[11] (c) aturan prosedur tetap pengeboran; (d) pembentukan wacana tentang korelasi semburan dengan gempa Yogyakarta; serta (e) status pengusaha-politisi yang melekat pada aktor dalam kasus ini. Akbar menilai berbagai kejanggalan di seputar penyelesaian kasus dan pemenuhan ganti-rugi korban merupakan cara Lapindo menghindar dari tanggung jawab, meminimalisasi kerugian yang harus ditanggung akibat semburan, hingga memanfaatkan adanya peluang keuntungan dalam penyelesaian kasus ini.

Mengendapnya Asumsi Menjadi Kebenaran

Topik tentang asal semburan tidak menjadi perbincangan yang relevan bagi masyarakat korban karena yang penting bagi mereka adalah penyelesaian ganti-rugi, serta bagaimana semburan dapat segera dihentikan. Bagi mereka, cukuplah kasus itu menjadi perdebatan para ilmuwan. Namun, meskipun terkesan apatis mereka umumnya lebih meyakini semburan itu akibat kesalahan Lapindo. Alasannya, jika hal itu didefinisikan sebaliknya sebagai bencana alam, skema penyelesaiannya akan dianggap jauh lebih merugikan warga. "Masa yang namanya Lapindo itu katanya *nggak* bersalah

---

[10] Lihat juga hasil penyelidikan BPK RI (2007) tentang evaluasi proses perizinan Lapindo Brantas.

[11] Kawasan Porong memiliki struktur tanah yang labil yang mengandung resiko besar terjadinya semburan lumpur jika melakukan pengeboran secara vertikal. Lihat Akbar (2007: 78).

itu, *kan* gila itu," tutur seorang warga di pengungsian Pasar Baru Porong. "Ini bukan bencana alam. Ini kesalahan manusia," tambahnya.[12]

Muncul kritik ketika media kembali memublikasikan argumentasi bencana alam sebagai penyebab semburan itu. Kritiknya jelas, dengan tetap berpegang pada keyakinan *drilling-trigger,* menilai bahwa argumentasi bencana alam hanya *akal-akalan* Lapindo memengaruhi publik. Dalam pandangan korban, tidak ada sedikit pun peluang kebenaran pada argumentasi tersebut selain rekayasa kebenaran, dan seolah tidak ada keraguan sedikit pun mengenai adanya korelasi "mutlak" antara kelalaian pengeboran Lapindo dengan munculnya semburan lumpur di Porong. Persoalan ini telah dianggap selesai karena sebagian besar publik meyakini semburan itu berkorelasi dengan kesalahan pengeboran. Dalam perkembangannya, yang lebih dipersoalkan adalah proses penyelesaian ganti-rugi. Setiap kendala dalam proses penyelesaian tersebut dipandang sebagai cara Lapindo menghindari tanggung jawab atau sebagai cara untuk mencari peluang memperoleh keuntungan dari kasus ini. Tidak ada perkara lain selain inkonsistensi komitmen Lapindo dan pemerintah dalam menyelesaikan ganti-rugi.

Mapannya pandangan itu merupakan hasil "inkulkasi" pengetahuan yang dikonstruksi baik oleh media, ilmuwan, maupun pemerintah terutama di awal-awal kejadian. Bahkan, menurut Soffian Hadi, geolog Lapindo pada awal semburan juga meyakini hal itu diakibatkan oleh kelalaian dalam teknik pengeboran.[13] Demikian pula Jusuf Kalla, Wakil Presiden pada saat itu, di hadapan korban di Pasar Baru Porong menunjuk Nirwan Bakrie, Chief Executive Officer Lapindo Brantas Inc., agar tidak lari dari tanggung jawab menyelesaikan ganti-rugi warga. Rentetan kejadian itu memperkuat "asumsi-asumsi" yang pada akhirnya berujung pada "kebenaran ". Kemunculan pandangan lain tentang asal semburan yang mengawali perdebatan para ahli dipandang sebagai upaya mencari-cari pembenaran untuk menghindar dari tanggung jawab.

---

[12] Wawancara dengan P, pengurus Pagar Rekontrak, 13 Mei 2008.
[13] Wawancara dengan Soffian Hadi, 8 Oktober 2008.

Sementara itu, setiap argumentasi memiliki implikasi yang besar dalam soal penanganan dan pemberian ganti-rugi warga. Namun demikian, jauh lebih besar proporsi publik yang berpandangan menghakimi Lapindo. Kesalahan Lapindo sebagai penyebab semburan telah menjadi ”episteme”, rezim kebenaran, dalam melihat kasus lumpur di Porong. ”Episteme” merupakan artikulasi pengetahuan yang menjadi rezim kebenaran dalam kurun tertentu hanya karena terdapat konsensus mengenai hal itu (Foucault, 1970). Sedikit saja seseorang berpandangan berbeda dari yang berlaku umum maka muncul tuduhan konspiratif yang mengorelasikan dengan kepentingan Lapindo. Meski demikian, masing-masing penganut bersikap sama dengan keyakinannya, tidak berusaha memahami bagaimana muncul perspektif yang berbeda. Dalam pandangan Foucault, setiap produksi pengetahuan berkaitan dengan praktik normalisasi, di mana kebenaran menjadi legitimasi bagi berlangsungnya operasi kekuasaan.

Tidak hanya aktor dari kelompok NGO, korporasi juga memiliki kepentingan mengarahkan opini publik atau setidaknya sebagian masyarakat lokal bahwa eksplorasi Lapindo di sumur Banjar Panji 1 belum tentu berkaitan dengan semburan lumpur. Lapindo berpandangan bahwa semburan itu tidak berkaitan dengan kegiatan eksplorasinya tetapi karena dipicu oleh gempa Yogyakarta, dan karena itu perusahaan ini sangat yakin tidak bersalah. Pandangan ini diperkuat oleh para ilmuwan, terutama para ahli geologi, geofisika, dan perminyakan. Beberapa pertemuan ilmiah digelar untuk mendeklarasikan serta memperkuat argumentasi kegempaan itu. Menurut Akbar (2007), pertemuan yang bernuansa pesanan semacam itu bertujuan mengarahkan opini lumpur ke bencana alam murni. Namun, menurut saya, kepentingan Lapindo sebenarnya tidak sampai sejauh itu. Lapindo lebih berkepentingan ”menggugurkan keyakinan publik” atas pandangan yang mempersalahkan perusahaan ini. Kepentingan seperti ini tidak hanya membuat Lapindo harus mencari argumentasi ilmiah yang rasional dan *legitimate* dalam menerangkan penyebab semburan lumpur, tetapi cukup dengan menghadirkan argumentasi tandingan yang terus-menerus dikampanyekan dan didukung para ilmuwan dan media massa. Kepentingannya, bukan hanya agar publik yang semula berpandangan bahwa semburan itu berkaitan dengan eksplorasi Lapindo menjadi

berpandangan kasus itu sebagai bencana alam, melainkan bahwa kedua pandangan itu sama-sama dapat dipandang rasional. Jika sudah demikian, seseorang tidak bisa menyatakan dirinya meyakini pandangan tertentu sebagai yang paling benar karena keduanya memiliki kemungkinan kebenaran. Sementara kepastian status hukum Lapindo terhadap kasus ini juga sangat bergantung pada argumentasi ilmiah dalam memandang penyebab semburan itu.

Ada beberapa keuntungan bagi Lapindo jika masyarakat memandang bahwa kasus ini belum memiliki status hukum. *Pertama,* seseorang yang berpandangan demikian akan melihat bahwa kesanggupan Lapindo memberikan ganti-rugi meskipun status hukumnya belum jelas merupakan bentuk kebaikan kroporasi terhadap masyarakat lokal lebih sekadar sebagai *corporate social responsibilities* (CSR). Seorang pegawai bagian Deputi Operasional BPLS dalam sebuah wawancara menegaskan hal itu.

> ... ini kan masih *debatable*, masalah lumpur ini disebabkan oleh pengeboran atau bukan. Jadi saya bicara bukan dalam konteks saya melakukan pembelaan terhadap satu lembaga atau apa pun, tidak. Tapi mari kita bicara fakta, realita, dan objektif. Sampai saat ini secara hukum Lapindo belum dinyatakan bersalah. Ini perlu dijadikan catatan. Apa pun persepsi orang, apa pun justifikasi orang, yang jelas secara hukum belum ada keputusan apakah Lapindo bersalah. Untuk itu, makanya sangat diskriminatif sekali kalau kita sebagai orang yang tahu permasalahan dari awal menyebutnya sebagai ”lumpur Lapindo ”. Seolah-olah ini karena Lapindo, iya kalau betul. Bisa jadi kalau misalnya Lapindo memukul balik kita, kita bisa dipersalahkan. Itu kan persepsi orang. Kita sebagai orang ilmiah, akademisi saya kira mungkin perlu ditinjau kembali judul itu, penyebutan lumpur Lapindo. sebut saja semburan lumpur di Sidoarjo. Jangan juga lumpur Sidoarjo, lagi-lagi menyalahkan kita. Salah lagi, Sidoarjo menyebabkan lumpur, itu salah juga. Mungkin luapan lumpur atau semburan lumpur lebih etis. Jadi kita tidak mendiskreditkan siapa pun.[14]

[14] Wawancara dengan Bajuri, Deputi Sosial Bapel BPLS, 25 September 2008.

Kedua, dalam soal penyelesaian ganti-rugi, pandangan demikian akan memudahkan Lapindo melakukan negosiasi baik dengan masyarakat maupun dengan pemerintah. Artinya, semua pendapat yang menjadi perdebatan para ahli belum bisa dikatakan sebagai kebenaran. Tidak ada salah satu pendapat yang bisa dijadikan rujukan atas penyelesaian kasus ini. Hanya saja karena masalah ini telah menimbulkan adanya korban yang menderita kerugian, yang harus segera ada penyelesaian ganti-rugi. Kemampuan dan kemauan Lapindo membayar ganti-rugi warga meski status bencananya belum jelas adalah untuk membangun kesan pada publik bahwa perusahaan ini telah menunjukkan kepeduliannya pada masyarakat tak lebih dari sekadar CSR.

Mendefinisikan Semburan, Membentuk Subjek

Dari uraian pada bagian sebelumnya, terdapat dua pandangan dominan dalam mendefinisikan semburan lumpur di Porong yang memengaruhi bagaimana skema penyelesaian ganti-rugi dapat diterima oleh warga. *Pertama*, pandangan yang menyatakan ”Lapindo belum pasti bersalah”. *Kedua*, pandangan yang menyatakan ”semburan lumpur berkorelasi dengan pengeboran Lapindo ”.

Opini tentang ”Lapindo belum pasti bersalah” terkesan kontroversial di kalangan warga, namun sebagian ada yang meyakininya. Biasanya, penilaian demikian lebih implisit tercermin dalam proses-proses negosiasi yang dilakukan warga dengan pemerintah dan Lapindo. Artinya, proses negosiasi itu juga bagian dari bagaimana definisi tentang semburan tersebut dikonstruksi, terutama kepada warga. Ini misalnya tampak dari bagaimana Gabungan Korban Lumpur Lapindo (GKLL) mendefinisikan semburan.

> Ada dua penelitian para ahli. Satu yang mengatakan itu kesalahan Lapindo, yang satu karena gempa Yogya. Nah dua-duanya itu punya reputasi yang sama dari luar negeri, dari Jepang juga, dari sini juga. Yang katanya independen juga bisa dua-duanya analisis itu. *Lha* kita yang *nggak* tahu *yo'opo* ... kalau kita *ya* bagaimana korban lumpur itu cepat terselesaikan. Tergantung tingkat intelejensi, tingkat kecerdasan seseorang, secara umum masyarakat menganggap bahwa Lapindo itu

salah, dan saya juga gitu kalau di luar, *nggak* mau saya mengatakan bahwa Lapindo itu belum tentu salah.

Warga itu ada sebagian yang menganggap bahwa Lapindo penyebab masalah ini, maka Lapindo harus dimusuhi, menurut saya keliru. Jadi beginilah saya pikir Lapindo juga entah *bener* atau tidak tapi *husnudhon* saya tidaklah kejadian ini disengaja, artinya Lapindo sengaja membocorkan supaya lumpur ini keluar terus kemudian biar warga ini ... saya pikir tidak itu. Sebab kalau itu yang terjadi, sangat bodoh menurut saya orang-orang Lapindo kalau misalkan dia ingin menguasai lahan seluas ini saja dengan cara ini terlalu bodoh.[15]

Meski demikian, sebagian besar warga dalam kelompok ini meyakini bahwa Lapindo adalah penyebab terjadinya semburan lumpur di Porong. Namun, pilihan sikap mereka, yang diyakini lebih realistis dalam menimbang skema penyelesaian ganti-rugi, secara implisit melegitimasi pandangan tentang belum tentu bersalahnya Lapindo. Sikap realistis itu tercermin dari bagaimana mereka mendefinisikan hak warga serta bagaimana pilihan-pilihan strategis dalam memperjuangkan hak tersebut. Misalnya, bagi GKLL, hak yang dapat dituntut adalah ganti-rugi materiil atas tanah pekarangan maupun sawah dan bangunan rumah, serta uang jatah hidup dan jaminan sosial lainnya sebagaimana hak yang diperoleh para pengungsi. Tuntutan yang berkaitan dengan ganti-rugi immateriil seperti yang sering diwacanakan oleh para aktivis dianggap kurang realistis bagi mereka.

Patut diketahui, GKLL adalah kelompok pengungsi pertama yang masuk dalam peta area terdampak berdasarkan Perpres No. 14 Tahun 2007. Skema yang menjadi acuan penyelesaian ganti-rugi warga hingga kini, berupa tanah sawah 120 ribu per meter, tanah pekarangan 1 juta per meter, dan bangunan 1,5 juta per meter hingga jatah hidup dan jaminan sosial lainnya, merupakan hasil negosiasi kelompok ini dengan pemerintah dan Lapindo pada awal semburan. GKLL merupakan kelompok korban yang hampir selalu dapat mencapai kata sepakat dalam proses-proses negosiasi

[15] Wawancara dengan KH, Sekretaris GKLL, 7 September 2008.

dengan pemerintah dan Lapindo, meskipun hal itu sering kali dilakukan dengan cukup alot. Artinya, kelompok ini pada konteks tertentu tidak bisa dipandang sebagai objek pasif yang menerima begitu saja kemauan Lapindo. Dalam beberapa kesempatan mereka juga melakukan aksi demonstrasi untuk menekan Lapindo atau pemerintah. Akan tetapi, kesepakatan selalu dapat dibuat karena bagi mereka lebih penting mengompromikan dua kepentingan yang berbeda daripada mempertahankan tuntutan namun mengorbankan kepastian hidup banyak orang.

Hasil-hasil kesepakatan GKLL tersebut juga sering kali dijadikan rujukan oleh kelompok korban lainnya dalam menuntut skema penyelesaian ganti-rugi, mulai dari skema penyelesaian awal hingga munculnya skema Perpres No. 14 Tahun 2007, model pembayaran "*cash-and-carry* 20:80", hingga skema *cash-and-resettlement*.[16] Hal ini juga karena pemerintah dan Lapindo tampaknya selalu menjadikan GKLL sebagai acuan representasi korban; kelompok ini yang dianggap paling terbuka dalam proses perundingan meskipun dalam beberapa kesempatan mereka juga melakukan tekanan dengan berdemonstrasi. Kesan bahwa GKLL begitu mudah melakukan negosiasi dengan Lapindo dan pemerintah memunculkan penilaian bagi sebagian pihak bahwa kelompok ini yang paling mudah diperdaya oleh Lapindo. Bahkan ada yang menilai mereka, terutama para elitenya, merupakan "antek-antek Lapindo" karena banyak kesepakatan yang telah dibuat dianggap merugikan kepentingan korban. Emha Ainun Najib, budayawan asal Yogyakarta yang dalam dua tahun pertama sering menjadi mediator negosiasi kelompok ini dengan Lapindo, juga kerap mendapat hujatan melalui media karena sikap dan pandangannya dianggap terlalu menguntungkan Lapindo dan kurang memperhatikan kepentingan warga. Tuduhan "telah dibayar oleh Lapindo", misalnya, sering pula dialamatkan pada Emha dan pengurus GKLL lantaran sikap mereka yang terlampau kompromistis. Emha memang memiliki pandangan

[16] Skema *cash-and-carry* adalah model penyelesaian ganti-rugi secara tunai, meskipun dalam praktiknya dilakukan pencicilan. Sedangkan skema *cash-and-resettlement* adalah model penyelesaian ganti-rugi tunai untuk 20% pertama, sedangkan sisa 80% diberikan melalui tukarguling tanah dan bangunan. Skema ini terutama diberlakukan untuk tanah non-sertifikat. Ganti-rugi pada konteks ini dalam praktiknya sebenarnya yang terjadi adalah praktik jual-beli.

tersendiri terhadap kasus ini. *Pertama,* menurut Emha, kasus ini belum memiliki status hukum yang memutuskan posisi Lapindo apakah bersalah atau tidak. *Kedua,* persoalan ganti-rugi warga memang harus diselesaikan, tetapi dengan menempatkan kasus ini pada proporsi yang tepat. *Ketiga,* apa yang sudah dilakukan oleh Lapindo dengan memberikan ganti-rugi warga merupakan bagian dari niat baik perusahaan ini untuk tidak lari dari tanggung jawab. Harian *Tribun*, 16 Juli 2008, juga menyitir pernyataan Emha yang dianggap kontroversial terutama bagi kalangan aktivis:

> Mereka yang dibayar 20% saja sudah makmur apalagi kalau sampai sisa pembayaran 80% dibayar. Padahal, apa yang sebenarnya terjadi pada Lapindo, *wong* belum ada yang diputuskan bersalah tapi sudah dibayar ganti-rugi. Ibarat kata, Lapindo itu sudah memberikan *sodaqoh* kepada warga.

Pandangan tersebut sedikit-banyak juga memengaruhi bagaimana GKLL mendefinisikan semburan lumpur yang dianggap ”belum tentu kesalahan Lapindo ”. Ini juga karena Emha menjadi patron mereka. Peran pemerintah yang ambigu serta penyelesaian ganti-rugi yang terus-menerus diulur-ulur oleh Lapindo juga turut mengonstruksi definisi kelompok GKLL terhadap semburan lumpur. Hal ini yang kemudian menghasilkan sikap-sikap kompromistis kelompok ini dalam bernegosiasi dengan pemerintah dan Lapindo. Namun, bagi para pengurusnya, sikap kompromistis itu justru diperlukan untuk memberikan kepastian penyelesaian kasus warga dan hal itu juga biasanya didasarkan atas persetujuan warga. Artinya, dengan pandangan tersebut, kelompok ini melihat yang paling realistis adalah bagaimana Lapindo dan pemerintah memenuhi hasil kesepakatan dalam memberikan ganti-rugi materiil warga. Tuntutan yang lebih dari itu, terkait kerugian immateriil misalnya, seperti soal kesehatan, lingkungan, pendidikan, dan ikatan sosial menurut mereka sulit untuk bisa dipenuhi. Bagi GKLL, mengawal penyelesaian ganti-rugi sesuai skema Perpres saja sulit apalagi jika harus ditambahkan dengan tuntutan yang kurang realistis. Yang menjadi pertaruhan warga adalah bagaimana mereka bisa bertahan hidup jika mereka terus menuntut dengan skema yang justru membuat mereka diabaikan oleh pemerintah dan Lapindo. Sebagian besar warga

juga tidak ingin berlarut-larut tinggal terlunta-lunta dalam pengungsian atau hidup dengan ketidakpastian. Kondisi ini yang membuat munculnya kesepakatan-kesepakatan yang seolah kompromistis dan selalu mengikuti kemauan Lapindo.

> Kita harus pahami bahwa orang-orang ini juga bekerja dan bekerja itu orang-orang Lapindo juga butuh dihormati, butuh *diwongke*. Nah, saya menganggap Lapindo, pemerintah, dan warga ini harus bersinergi dalam rangka mencari sebuah solusi. Tidak akan pernah terselesaikan masalah lumpur ini kalau di antara satu pihak ini saja ingin tidak berbuat sinergis, maka tidak akan pernah terjadi. Warga *ngotot* A, kalau Lapindo tidak mau A akan tidak ketemu. Lapindo ngotot A kalau warga tidak mau tidak akan pernah ketemu. Maka kemudian dicari solusi di mana solusi itu semua menang, sehingga lumpur ini kalau menjadi sebuah musibah lumpur, ini akan menjadi sebuah *barokah*.[17]

Dalam proses negosiasi hingga tercapainya skema *cash-and-resettlement* juga tergambar bagaimana kelompok ini memilih bersikap realistis daripada *ngotot* mempertahankan pilihan yang sulit akan dipenuhi Lapindo.

> ... kalau sementara tadi itu warga minta *ngotot cash-and-carry*, Lapindo minta *ngotot* relokasi karena permasalahannya (*Petok D* dan *Letter C* yang tidak diakui oleh Lapindo) tidak bisa diaktajualbelikan, maka menurut hemat kami bangunan kan *nggak* ada masalah, maka kemudian bagaimana kita ini kita selesaikan dulu yang tidak ada masalah. Mereka sepakat kalau bangunan tidak ada masalah, maka dari diskusi-diskusi antara 25 Mei *sampe* 25 Juni penandatangan MoU itu berkali-kali kita hampir seminggu dua tiga kali pertemuan untuk mematangkan itu. Maka kemudian muncul istilah *cash-and-resettlement* itu. Apa artinya *cash*, jadi kalau tadi itu *cash-and-carry* itu warga minta *ngotot* seperti itu, Lapindo *ngotot* relokasi, kita ambil tengah *cash and* relokasi atau *cash-and-resettlement*. *Cash*-nya apa bangunan, bangunan kan *nggak* ada masalah, maka bangunan harus dibayar sekarang.[18]

---

[17] Wawancara dengan KH, Sekretaris GKLL, 7 September 2008.

[18] Wawancara dengan KH, Sekretaris GKLL, 6 September 2008.

Sikap demikian membuat GKLL menghindari interaksi dengan para aktivis yang dianggap terlampau interventif dalam merumuskan skema penyelesaian, selain bahwa gagasan mereka kerap dianggap kurang realistis bagi korban. Menurut pengurus GKLL, keterlibatan ”orang luar” dianggap sering kali mengacaukan proses-proses negosiasi bahkan mengeksploitasi kesengsaraan korban. Karena itu, mereka lebih memilih melakukan negosiasi sendiri dengan pemerintah dan Lapindo.

> ... saya punya pengalaman, ketika di bulan Juli-Agustus tahun 2006, itu banyak sekali LSM yang turun ... ujungnya saya ditunjukkan oleh Lapindo, LSM tersebut minta bantuan kepada Lapindo sekian juta ... berikutnya dapat dari Pemkab Sidoarjo LSM ini juga ... ini kan namanya menjual kesengsaraan orang lain, sejak saat itu saya tidak terlalu percaya dengan LSM. Lebih baik warga *tak* tangani saja ... saya hanya ngomong begini, oke kasih saya pencet *handphone* saya nomor teleponnya Pak Nirwan; kalau saya bisa *ngomong* halo ini Pak Nirwan ya, kalau iya tak tutup cukup, saya *ngikuti* sampean ...
>
> ... Nah Cak Nun itu pun seperti dengan yang lain waktu itu saya tidak terlalu percaya dengan para politisi, artis, seorang dari luar karena kami sering kali dijadikan objek eksploitasi untuk popularitas mereka ... Tapi Cak Nun beda dengan yang lain, waktu itu Cak Nun *ga* mau disorot wartawan sama sekali, dan bicara dengan saya dia mampu mengomunikasikan dengan Presiden. Nah, waktu itu saya sampaikan kepada pemerintah setempat ya *nggak* logislah, artinya *nggak* ada yang percaya kalau kami bisa ketemu Presiden. Tapi tanggal 24 Juni 2007 *bener* kami ketemu SBY dan kami sampaikan segala permasalahan warga itu sehingga tanggal 25, 26, 27 Juni SBY *ngantor* di Juanda dan saat itulah kemudian titik awal pembayaran 20% dilaksanakan. Maka ketika proses 20% ini dibentuk teman-teman yang menerima 20% ini mengkristal membentuk yang namanya GKLL. Itu sebenarnya terbentuk atas akumulasi dari orang-orang yang diajak Cak Nun pada tanggal 24 Juni ke Jakarta.[19]

---

[19] Wawancara dengan KH, Sekretaris GKLL, 6 September 2008.

Sementara itu, sebagian warga yang memiliki kedekatan dengan aktivis cenderung memilih strategi konfrontatif saat berhadapan dengan Lapindo dan dengan mempertahankan tuntutan skema penyelesaian yang dianggap paling ideal. Mereka di antaranya adalah sebagian besar warga Desa Renokenongo yang menjadi korban semburan lumpur gelombang kedua akibat ledakan pipa gas Pertamina (22 November 2006) dan membentuk kelompok Paguyuban Warga Renokenongo Menolak Kontrak (Pagar Rekontrak). Mereka adalah kelompok penolak uang kontrak rumah lantaran menghindari konsekuensi skema penyelesaian terbaru mengikuti hasil kesepakatan GKLL yang dianggap membodohi korban. Tidak hanya itu, kelompok Pagar Rekontrak juga menolak cara pembayaran ganti-rugi dan tafsiran ganti-rugi dalam Perpres yang dipahami sebagai jual-beli dalam pelaksanaannya. Dengan jual-beli, mereka tidak akan bisa menempati desa asal mereka. Jika memang skema itu bentuk penyelesaian ganti-rugi, seharusnya mereka tetap memiliki aset mereka di desa. Karena itulah mereka menolak skema ganti-rugi Perpes. Skema tersebut juga dianggap terlalu menguntungkan Lapindo, padahal jelas dalam pandangan mereka sumburan lumpur itu mutlak akibat pengeboran. Menurut mereka, ganti-rugi harus diberikan secara tunai 100% yang tidak menyebabkan peralihan hak atas aset yang diganti-rugikan. Selama berbulan-bulan mereka lebih memilih bertahan di pengungsian Pasar Baru Porong sampai ada jaminan kepastian pembayaran ganti-rugi secara *cash-and-carry*. Namun, selama itu pula mereka diabaikan oleh pemerintah dan Lapindo karena tuntutannya dianggap terlalu mengada-ada, padahal sudah ada mekanisme penyelesaian yang telah disepakati dengan GKLL, yang jumlah anggotanya jauh lebih besar dari Pagar Rekontrak. Gubernur Jawa Timur, Imam Utomo, pada April 2008 mengatakan bahwa mereka hanyalah kelompok kecil yang tidak bisa diperlakukan istimewa, karena jika tuntutan mereka terpenuhi akan mengacaukan mekanisme penyelesaian yang telah disepakati kelompok korban lain yang lebih besar.

> Cuma sekarang pikiran kita, yang 600 orang yang selalu dipuja-puja oleh orang-orang itu *lho*, dipuja-puja oleh mereka-mereka yang mengatakan ini ... cuma 600 KK. Padahal yang 11.000 KK sudah mau Perpres. Sudah hampir, sudah 95% menerimanya. Itu yang akhirnya menjadi pikiran

> kita yang 600 KK. Apa kita harus menuruti yang 600 orang sehingga yang 11.000 lainnya harus kembali menuruti seperti ... pasti begitu. Kalau yang 600 korban kita turuti kemauannya, pasti yang 11.000 akan menuntut seperti itu. Sudahlah kita mengikuti Perpreslah, jangan sampai menyalahi Perpres. Nah, yang 600 orang itu selalu dipuja-puja orang. Yang paling menderita. Padahal yang menderita lainnya yang 11.000 itu.[20]

Tidak hanya itu, muncul pula upaya-upaya untuk menggerogoti pertahanan Pagar Rekontrak agar mereka meninggalkan pengungsian. Ini dilakukan mulai dari memberikan iming-iming bonus saat seseorang bisa mengajak warga ikut skema Perpres, membenturkan dengan kelompok pedagang pasar yang juga akan menempati lokasi pengungsian itu, serta dengan mencabut berbagai bentuk bantuan sosial di pengungsian. Kelompok Pagar Rekontrak bahkan pernah bereaksi terhadap upaya pengusiran itu dengan membuat ratusan bambu runcing sebagai alat pertahanan.

Selain itu, cara-cara yang dilakukan oleh kelompok ini agar pemerintah dan Lapindo memenuhi tuntutan mereka adalah dengan melakukan aksi-aksi demonstrasi, mendekati tokoh-tokoh dan institusi publik, serta membangun empati publik agar mereka juga turut dapat memberi tekanan pada pemerintah dan Lapindo. Mereka juga menghindari negosiasi dengan Lapindo karena dianggap akan dapat memengaruhi pilihan-pilihan skema penyelesaian warga. Pilihan strategi semacam ini tidak lepas dari pengaruh pendampingan para aktivis. Dan, hal itu membuat mereka menjadi simbol perlawanan korban Lapindo.

Namun, dua tahun bertahan di pengungsian ternyata tidak kunjung ada kepastian terpenuhinya tuntutan mereka. Itu pun sudah dilakukan dengan menurunkan tensi perlawanan dengan menerima skema ganti-rugi yang dibayar secara dicicil 20:80. Satu demi satu warga pada akhirnya juga meninggalkan pengungsian dan memilih menerima skema yang telah berlaku bagi korban. Menghadapi situasi ini membuat pengurus pagu-

[20] Pernyataan Imam Utomo, Gubernur Jawa Timur, dalam Dengar Pendapat Komnas HAM dengan Pemda Jawa Timur, 28 April 2008.

yuban khawatir kehilangan legitimasi di mata warga karena dianggap tidak dapat memastikan nasib hidup mereka dan pada akhirnya memilih skema penyelesaian yang telah berlaku bagi kelompok GKLL, *cash-and-resettlement.* Pilihan ini menandai babak baru hubungan antara kelompok Pagar Rekontrak dengan para aktivis. Dan, karena telah menerima kontrak mereka mengubah nama menjadi Paguyuban Warga Renokenongo Korban Lapindo (Pagar Rekorlap). Pagar Rekorlap menghakimi para aktivis yang membuat mereka terlunta-lunta karena pilihan sikap yang tidak realistis. Sementara para aktivis menilai pengurus Pagar Rekorlap dianggap terlalu elitis sehingga mudah terpengaruh Lapindo dalam bernegosiasi. Dengan nada menghujat, seorang aktivis mengemukakan demikian: "kenapa dia (pengurus Pagar Rekontrak) melakukan lobi-lobi dengan Minarak (Minarak Lapindo Jaya, anak perusahaan LBI yang mengurusi penyelesaian ganti-rugi korban). Tidak akan menang jika melakukan lobi-lobi dengan Minarak, yang ada justru dia yang dipengaruhi Minarak!" Sementara itu, pengurus paguyuban juga memiliki argumentasi tersendiri mengapa pilihan itu diambil.

> ... dia (menyebut nama seorang aktivis) dulu datang ke saya baik-baik, *mbok* keluar dengan baik-baik. Perbedaan itu sudah biasa saya pikir, dan *nggak* bisa dipaksakan harus mengikuti dia. Berani dia nanggung meyakinkan saya *nek* memang dibayar. Buktinya saya selama dua tahun, mana sih hasilnya, *ndak* ada hasilnya. Yang terakhir *test case* kemaren, saya *ndak* dikasih makan, apa yang bisa diperjuangkan, *nggak* ada. Ya makanya saya dulu terus-terang *aja* dalam tanda kutip membenci dengan temen-temen LSM itu *nggak* ada niatan yang tulus dari hatinya untuk nolong kami, gitu. Pasti dia juga bermain-main di sini ... Kenapa saya sering melakukan lobi-lobi, tidak melakukan demo, karena saya lihat demo itu tidak efektif ... Yang terpenting buat saya, masyarakat ini dalam berjuang selama dua tahun tidak menemukan titik hasil dan kelihatannya *loyo*, dan kalau kami paksakan, pasti habis orang-orang ini.[21]

[21] Wawancara dengan S, Ketua Pagar Rekontrak, 27 Agustus 2008.

Situasi itu membuat para aktivis tidak lagi mendampingi Pagar Rekorlap karena perjuangannya telah dianggap selesai, sama seperti terhadap GKLL. Sudah tertutup kemungkinan bagi kedua kelompok tersebut untuk bisa menuntut dalam skema penyelesaian ganti-rugi yang lebih ideal. Saat itu, para aktivis juga mulai terkonsolidasi dengan membentuk aliansi dengan para korban di bawah sekretariat Posko Bersama Korban Lapindo. Warga yang beraliansi dengan mereka adalah kelompok sempalan GKLL yang tetap mempertahankan skema ganti-rugi tunai, yaitu Gabungan Pendukung Perpres (Geppres) dan Perwakilan Warga Perumtas, serta kelompok di luar peta yang menuntut dimasukkan dalam peta seperti Gerakan Korban Lumpur 3 Desa (Gempur 3D) dan Paguyuban Warga 9 Desa. Kelompok-kelompok inilah, terutama yang di luar peta, yang menjadi sasaran pewacanaan ikhwal ganti-rugi immateriil, tidak sebatas skema ganti-rugi Perpres. Ini tentu saja dengan mengandaikan bahwa semburan lumpur di Porong berkorelasi dengan pengeboran, tanpa keraguan sedikit pun.

Pewacanaan itu dilakukan di antaranya dengan membangun media alternatif, mulai dari buletin, radio komunitas, dan situs internet. Ada tiga jenis topik yang menjadi sorotan utama media yang diproduksi oleh aktivis. *Pertama*, persoalan penyelesaian ganti-rugi warga. *Kedua*, topik tentang perdebatan para ilmuwan dalam memandang penyebab semburan lumpur. Media milik aktivis tidak menampilkan kedua pandangan itu secara berimbang, tetapi berpihak pada pandangan yang melihat semburan lumpur berkaitan dengan eksplorasi Lapindo. Ilmuwan-ilmuwan yang memandang semburan berkorelasi dengan pengeboran menjadi rujukan utama media ini. Sementara ilmuwan dan sumber apa pun yang mengatakan sebaliknya menjadi sasaran kritik. Topik yang *ketiga* adalah tentang dampak yang lebih luas akibat semburan lumpur Lapindo; tidak hanya soal tenggelamnya pemukiman warga tetapi juga soal kerusakan dan pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan warga, dan hak warga atas pemukiman yang layak.

Ketiga topik itu menggambarkan apa yang menjadi kepentingan para aktivis, apa yang mereka perjuangkan, dan realitas macam apa yang hendak mereka konstruksi. Dengan memandang kelompok Paguyuban

Warga 9 Desa sebagai basis massa potensial dalam perjuangan aktivis, para aktivis berusaha mengawal apa yang menjadi kepentingan mereka. Dengan itu pula, kepentingan aktivis untuk mengangkat isu-isu yang diabaikan oleh pemerintah juga dapat menjadi kepentingan kelompok Paguyuban Warga 9 Desa. Artinya, para aktivis berusaha membuka ruang agar bisa mengintervensi korban agar tuntutan warga tidak hanya soal ganti-rugi Perpres atau upaya untuk masuk dalam peta area terdampak, tetapi juga mengangkat masalah-masalah lain yang lebih besar sebagai bagian dari persoalan warga. Berikut adalah pernyataan seorang aktivis dalam rapat internal Posko Bersama.

> Sebetulnya yang krusial itu ada dua. *Pertama*, menyangkut tentang persoalan lingkungan; yang *kedua* soal permintaan pembayaran 80% *cash-and-carry* yang sedang dituntut oleh teman-teman Geppres. ... Mereka yang menuntut 80% *cash-and-carry* ini *mentok* di tingkat menteri, dan mereka akan ke Jakarta untuk meminta kepastian agar 80% dapat direalisasikan. Berbarengan dengan gerakan warga ini, sebetulnya kita bisa mendorong terbawanya arus informasi terkait dengan berbagai macam hal menyangkut tentang persoalan lingkungan. Nah, ini sebenarnya *connect* dengan warga di luar peta areal terdampak. Tapi masalahnya warga di luar peta areal terdampak hingga hari ini memang belum ada yang punya keiginan kuat berbondong-bondong ke Jakarta menyatakan bahwa lingkungan mereka telah rusak dan meminta tanggung jawab negara. Suasana atau psikologi warganya masih sangat berbeda dibandingkan dengan warga yang sekarang menuntut 80%. Oleh karena yang siap dikonsolidasikan adalah Geppres maka isu lingkungan bisa menjadi isu tambahan selain tuntutan pembayaran 80% dalam *cash-and-carry*.[22]

Hal yang sama juga dikemukakan informan I, yang juga seorang aktivis Posko Bersama mengenai apa kepentingan mereka dan realitas macam apa yang hendak mereka konstruksi terhadap para korban.

[22] Pernyataan seorang aktivis (P) dalam rapat Posko Bersama Korban Lapindo, 10 Oktober 2008.

> Kita *nggak* berlebihan untuk *ngitung* akan mengorganisir apa. Paling tidak kita ngasih *guide*-lah bagaimana seharusnya ... Kalau melihat kasus ini jangan hanya soal bagaimana penetrasi tuntutan *basic demand* itu, tapi *scope*-nya lebih diperluas; ada persoalan lingkungan, kesehatan, ada banyak hak-hak korban yang tidak dipenuhi. Kita mencoba meng-*guide* itu.[23]

Usaha untuk mengintervensi perjuangan dan tuntutan warga agar apa yang dibayangkan para aktivis juga menjadi kepentingan korban merupakan bagian dari apa yang disebut sebagai "problematisasi". Melalui problematisasi, para aktivis membentuk subjek korban yang produktif, yang bermanfaat untuk memperjuangkan kepentingan aktivis. Dengan mempersoalkan realitas melalui problematisasi, para aktivis memperoleh justifikasi melakukan intervensi yang efeknya menciptakan subjek korban yang patuh, berguna, dan bermanfaat bagi tercapainya kepentingan tertentu. Ini tampak dalam kolaborasi aktivis dengan kelompok-kelompok korban melalui Posko Bersama. Namun, cara yang digunakan oleh para aktivis dalam membentuk subjek korban yang dikehendaki tidak dengan memaksakan bentuk pilihan tertentu sebagai sesuatu yang harus ditempuh oleh korban. Masyarakat masih memiliki ruang kebebasan yang sangat luas dalam memilih apakah mereka akan mengikuti jalan para aktivis atau tidak. Pada konteks itu, media yang diproduksi oleh para aktivis memiliki peran yang penting dalam proses kepengaturan. Oleh Foucault (1978a, 1978b, & 1990), proses itu disebutnya sebagai *governmentality*.

> Aku *nggak* punya agenda khusus untuk bagaimana warga harus bersikap. Tapi paling tidak yang aku lakukan di sini, ya mengikuti bagaimana warga melihat hal ini. Artinya, aku *nggak* akan melibatkan diri bagaimana warga harus bertindak, bagaimana warga harus mengorganisir diri segala *macem*. Aku akan berposisi sebagai orang yang menyuarakan mereka. Kalau mereka melakukan ini aku akan menyuarakan. Dengan ditambah apa kekurangannya menurut saya. Mungkin hanya sesederhana itu yang bisa aku lakukan. Aku *nggak* punya bayangan bagaimana kemudian kasus ini akan dibawa ke spektrum yang lebih besar.[24]

---

[23] Wawancara dengan I, seorang aktivis Posko Bersama Korban Lapindo, 15 Oktober 2008.

[24] Wawancara dengan I, seorang aktivis Posko Bersama Korban Lapindo, 15 Oktober 2008.

Simpulan

Pada kasus ini, terdapat dua wacana dominan yang berkontestasi dalam ruang publik yang memengaruhi bagaimana kasus ini dilihat dan diselesaikan. Yang menjadi pertanyaan adalah apa pentingnya narasi kebenaran dalam memandang asal semburan bagi para aktor? Foucault dalam *Security, Teritory, Population* (1978b) menyebutkan bahwa tujuan *governmentality* bukan pada populasi atau penduduk, melainkan pada teritori atau kotanya. Subjek tubuh sosial (penduduk) hanya menjadi kendaraan bagi berlangsungnya kekuasaan dan objek pengetahuan. Tujuan utamanya mengendalikan pengaturan teritori, dan tanpa mengontrol kehendak populasi yang berada di wilayah itu, tujuan seperti ini hampir sulit dicapai.

Masyarakat korban dalam kasus Lapindo merupakan objek produksi pengetahuan dan menjadi subjek yang berguna bagi aktor lainnya. Korban yang berpandangan bahwa kasus ini disebabkan oleh kesalahan Lapindo merupakan *governable subject* bagi para aktivis. Aktivis merupakan aktor yang mendiseminasikan wacana itu dalam ruang publik. Dengan korban yang memiliki pandangan demikian, para aktivis dapat memobilisasi mereka dalam mencapai kepentingannya. Namun, dalam kasus ini tidak semua korban yang berpandangan demikian dapat dimobilisasi oleh aktivis. Lebih tepatnya korban dalam kategori ini merupakan subjek potensial yang bisa dikendalikan. Persoalannya, kepentingan aktivis adalah menuntut Lapindo dan pemerintah melakukan pemulihan total atas dampak lingkungan dan sosial akibat semburan ini, sementara tidak semua kelompok korban dapat menginternalisasi kepentingan ini juga menjadi kepentingannya. Bagi korban, kepentingan yang harus didahulukan adalah penyelesaian ganti-rugi materiil berdasarkan skema Perpres. Menuntut dengan skema yang hampir sulit dipenuhi oleh Lapindo sama saja dengan membuat hidup mereka terlunta-lunta dalam pengungsian tanpa kepastian.

Sementara itu, Lapindo melalui geolog dan media massa merupakan aktor yang memproduksi pengetahuan yang memandang bahwa kasus ini belum tentu diakibatkan oleh kesalahan pengeboran. Pandangan ini

juga dilegitimasi oleh sikap pemerintah yang ambigu, di antaranya dengan membuat kebijakan skema penyelesaian yang bertolak belakang, yaitu: Perpres No. 14 Tahun 2007 yang membebankan ganti-rugi pada Lapindo, sedangkan Perpres No. 48 Tahun 2008 yang membebankannya pada APBN. Subjek yang menjadi target kontrol sosial melalui pembentukan rezim kebenaran tentang "Lapindo belum pasti bersalah" adalah kelompok korban dari GKLL. Pandangan ini berimplikasi terhadap model penyelesaian ganti-rugi yang pada konteks tertentu korban dapat selalu menyesuaikan kehendak dan kesanggupan korporasi dalam pemenuhan ganti-rugi.

Wacana dominan yang lain adalah pengetahuan yang diorganisasikan dan diproduksi oleh para aktvis yang meyakini semburan lumpur berkaitan dengan eksplorasi Lapindo. Para aktivis juga bekerja sama dengan geolog dan media massa dalam mengonstruksi pandangan ini agar menjadi *legitimate* dalam menerangkan sebab semburan. Subjek yang dikendalikan adalah korban yang belum tuntas proses penyelesaian ganti-ruginya. Lapindo bersikukuh bahwa tanah non-sertifikat tidak bisa diselesaikan melalui pemberian ganti-rugi tunai, melainkan melalui tukar guling tanah, sedangkan korban dengan berpegang pada risalah menteri-menteri terkait berpandangan bahwa hal itu tidak menjadi soal untuk bisa diganti secara tunai. Para aktivis lebih mendukung korban yang memiliki sikap demikian daripada sebaliknya dengan memandang bahwa ketidaksanggupan Lapindo memenuhinya tidak lain sebagai dalih mengurangi beban tanggung jawab atau mencari peluang keuntungan dalam penyelesaian kasus ini.

Daftar Pustaka

——, (2008). "Geolog Dunia Yakin Lumpur Tidak Dipicu Gempa." *Kompas* (31 Oktober 2008).

——, (2008). "Geologists Blame Gas Drilling for Indonesia Mud Disaster." *The Jakarta Post* (31 Oktober 2008).

——, (2008). "Voting Lapindo di Negeri Orang." Majalah *Tempo*, (2-8 November 2008).

Akbar, A.A., (2007). *Konspirasi di Balik Lumpur Lapindo: dari Aktor hingga Strategi Kotor*, Yogyakarta: Galang Press.

Bryant, R.L. & Bailey, S. (1997). *Third World Political Ecology*, London: Routledge.

Fraser, N., (2003). "From Discipline to Flexibilization? Rereading Foucault in the Shadow of Globalization." *Constellations*, Vol. 10(2), 160-171.

Foucault, M., (1970). *The Order of Things: An Archaeology of The Human Science*, New York: Vintage Books.

——, (1978a). "Governmentality." Dalam Rabinow & Rose (Eds.) (2003).

——, (1978b). "Security, Territory, and Population." Dalam Rabinow & Rose (Eds.) (2003).

——, (1980). *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972-1977.* New York: Phanteon Books.

——, (1982a). "Technology of The Self." Dalam Rabinow & Rose (Eds.) (2003).

——, (1982b). "The Subject and Power." Dalam Rabinow & Rose (Eds.) (2003).

——, (1984). "The Ethics of the Concern of the Self as a Practice of Freedom." Dalam Rabinow & Rose (Eds.) (2003).

——, (1990). *The History of Sexuality: An Introduction* [Vol. 1], New York: Vintage Books.

——, (2003). *Society must be Defended*, UK: Penguin Books.

Hannigan, J., (2006). *Environmental Sociology; Second Edition.* New York: Routledge.

Lemke, T., (2000). "Foucault, Governmentality, and Critique." Paper dalam *Rethinking Marxism Conference,* University of Amherst, (21-24 September 2000).

Latour, B., (2004). *Politics of Nature: How to Bring the Sciences into Democracy*, Cambridge: Harvard University Press.

——, (2005). *Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network Theory,* New York: Oxford University Press.

Li, T.M., (1999). "Compromising Power: Development, Culture, and Rule in Indonesia." *Cultural Anthropology*, Vol. 14(3), 295-322.

——, (2007). *The Will To Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics*, London: Duke University Press.

Mudhoffir, A.M., (2011). "*Governmentality* dan Pemberdayaan dalam Advokasi Lingkungan: Kasus Lumpur Lapindo." *Jurnal Sosiologi Masyarakat,* Vol. 16(1), 49-75.

Rabinow, P. & Rose, N., (Eds.) (2003). *The Essential Foucault: Selections from Essential Work of Foucault, 1954-1984*, London: The New Press.

Lumpur Lapindo Terus Menyemburkan Informasi

Yayan Sakti Suryandaru

Hingga saat ini berita seputar luapan lumpur Lapindo masih menghiasi liputan seluruh media massa di Indonesia. Bahkan, kontinuitas pemuatannya tercatat paling lama dibandingkan dengan peristiwa bencana apa pun yang pernah terjadi di tanah air (tsunami, kebakaran hutan di Kalimantan, gempa bumi Yogyakarta, dsb.). Bahkan, nilai berita konflik antara korban lumpur versus Lapindo Brantas dalam hal ini masih dikedepankan oleh sebagian besar media massa kita. Polemik nilai ganti-rugi, ketidaklancaran mekanisme pembayaran ganti-rugi, penolakan terhadap tawaran relokasi, belum segera dimulainya pembangunan kembali infrastruktur yang rusak (jalan tol Porong-Sidoarjo, jalur rel kereta api, akses jalan raya Porong menuju Malang dan wilayah timur Jatim, dsb.), meluasnya semburan hingga mencapai jalan raya Porong, masih dijadikan tema utama pemberitaan masalah luapan lumpur panas di Porong, Sidoarjo.

Media massa, apa pun bentuknya, memiliki fungsi sebagai penyampai informasi kepada khalayaknya. Untuk itu, media harus memiliki posisi netral dan objektif. Namun, seberapa pun media berusaha objektif, dia

tetap dipengaruhi oleh banyak hal. Termasuk ideologi media itu sendiri. Karenanya, setiap pemberitaan selalu membawa maksud dan muatan yang menyatakan keberpihakan media tersebut terhadap suatu peristiwa serta solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Begitu pula media ketika menyingkapi bencana lumpur Lapindo beserta dampaknya. Berita tentang dampak lumpur panas di Porong merupakan konstruksi dari peristiwa yang sebenarnya terjadi. Berita bukanlah peristiwa itu sendiri. Berita merupakan usaha rekonstruksi kerangka peristiwa yang terjadi. Berita dalam konteks komunikasi massa lebih merupakan inti yang disesuaikan dengan kerangka acuan yang dipertimbangkan agar peristiwa itu memiliki makna bagi para pembacanya.

Proses Menjadi Berita

Sebenarnya pembuatan berita tidaklah sederhana. Proses pemilihan peristiwa yang akan diangkat sebagai berita, proses *gatekeeping* dan *editing* di *newsroom* senantiasa melibatkan banyak individu, bahkan dipengaruhi oleh banyak level di dalamnya. Shoemaker & Reese, dalam bukunya *Mediating The Message* (1996), menggambarkan ada lima level yang bisa berpengaruh pada isi pemberitaan media massa. Mulai dari level individu pekerja media atau wartawan, rutinitas media, organisasi, ekstramedia, dan ideologi (h. 64).

Dalam level individual, dibahas bagaimana peran pekerja media pada isi media. Ada tiga hal yang dilihat oleh Shoemaker & Reese. *Pertama*, latar belakang dan karakteristik individual pekerja media. Ini berkaitan dengan gender, etnis, orientasi seksual, dan latar belakang pribadi yang berkait dengan status sosial-ekonomi, karier dalam kewartawanan, juga termasuk tingkat pendidikan. Faktor karakteristik tersebut akan memengaruhi bagaimana wartawan sebagai komunikator memandang dunia atau realitas di sekitarnya. *Kedua*, sikap *(personal attitudes)*, nilai *(values)*, dan kepercayaan media *(beliefs)*. Sikap politik jurnalis, menurut Shoemaker & Reese, berpotensi memengaruhi isi media. Bagaimanapun subjektivitas politik wartawan acap kali ikut bermain dalam pemilihan isu maupun sudut pemberitaan peristiwa. *Ketiga*, peran profesional dan kerangka etika.

Peranan profesional dan konsepsi tentang etika yang dimiliki pekerja media menurut Shoemaker & Reeses juga memiliki pengaruh terhadap pekerjaan mereka. Bagaimana wartawan mendefinisikan pekerjaan mereka akan berpengaruh pada isi yang mereka produksi. Shoemaker & Reese (1996: 101) melihat sebagian wartawan menganggap diri mereka netral, dan melihat pekerjaan mereka hanya sebagai ”didiminator”, yaitu jurnalis yang baik itu bisa diterima dan dipercaya semua pihak, bukan menguntungkan satu pihak tertentu. Jika ingin memengaruhi cara berpikir orang lain sebaiknya jadi politisi. Tugas wartawan hanyalah mengungkap fakta. Boleh saja bersimpati pada korban atau yang lemah, tetapi tugas utamanya bukan bersimpati, melainkan untuk mengerti.

Pengaruh rutinitas media *(routine)*, pola yang terus-menerus, praktik yang dilakukan berulang-ulang merupakan bentuk yang digunakan pekerja media untuk melakukan pekerjaannya. Menggunakan perspektif Karl Mannheim, ”rutinitas” di sini merupakan seperangkat aturan pada individu pekerja media dalam menjalankan fungsi profesinya. Sebagai contoh, reporter yang telah menguasai cara-cara rutin pemrosesan berita akan menilai profesionalisme mereka dari pertanyaan yang diajukan, bagaimana cara menangani peristiwa yang pelik, bagaimana teknik yang cocok untuk kasus-kasus sensitif, dan sebagainya. Rutinitas di sini dapat diartikan sebagai cara mencapai tujuan, tetapi sering juga diartikan sebagai hal yang sudah dilembagakan menjadi kebiasaan yang dimiliki bersama (Shoemaker & Reese, 1996: 106). Dalam aspek rutinitas ada beberapa hal yang termasuk di dalamnya, antara lain: sumber-sumber informasi yang digunakan, orientasi khalayak yang diperlakukan sebagai konsumen, seperti makna nilai berita, struktur penulisan atau pembuatan berita, cara menarik khalayak, kemudian media sebagai organisasi yang melakukan proses, seperti memahami rutinitas yang berkait dengan struktur organisasi berita, persyaratan yang diterapkan untuk perspektif berita, hubungan rutin dengan media lain, pemberitaan bersama atau yang eksklusif, kemudian sumber-sumber eksternal, seperti bagaimana berhubungan dengan presiden, birokrasi, pakar, dan lain-lain.

Selanjutnya adalah pengaruh organisasi pada isi media. Pada level ini, Shoemaker & Reese berangkat dari pertanyaan: ”bagaimana peran

organisasi, bagaimana struktur organisasinya, dan bagaimana perilaku pemegang kewenangan memengaruhi isi media?" Perbedaan peran organisasi terjadi karena adanya perbedaan struktur internal, tujuan, penggunaan teknologi, pemilikan, kebijakan, maupun pasar yang dituju. Dengan menganalisis level organisasi diharapkan dapat menjelaskan bagaimana keragaman isi media tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh perbedaan-perbedaan yang ada dalam level rutinitas, dan bukan juga karena level individu (Shoemaker & Reese, 1996: 139). Level berikutnya yang berpengaruh terhadap isi media adalah faktor di luar media *(extra-media level)*. Sejumlah faktor seperti hubungan antara jurnalis dengan narasumber berita *(journalist-source relationship)*, pemilihan sumber-sumber berita *(selection of sources)*, kelompok kepentingan *(interest groups)*, *public relations campaigns*, media lain, pemasang iklan dan khalayak, kontrol pemerintah *(government controls)*, undang-undang, kebijakan pemerintah, *marketplace*, dan perkembangan teknologi.

Level yang terakhir adalah pengaruh ideologi pada isi media. Nilai ideologi di dalam media massa bisa diidentifikasi dari nilai dasar sistem masyarakat kita, baik yang berkait dengan sistem ekonomi maupun sistem sosial. Perbedaan nilai-nilai dalam masyarakat itulah yang kemudian menjadi kontrol terhadap media. Stuart Hall menunjukkan kemampuan media untuk mendefinisikan keadaan dan memberikan pada mereka kekuatan ideologi. Jadi sifat dasar ideologi merupakan suatu mekanisme integrasi sosial, dan berhubungan dengan fungsi kontrol sosial media. Media sebagai kekuatan kontrol sosial, mau tidak mau isinya pun harus mencerminkan fungsi itu. Walhasil, media harus ikut menjaga tertib sosial, termasuk kemungkinan penyimpangan *(deviance)*. Cara mengomunikasikan penyimpangan yang terjadi di masyarakat, bagaimana penyimpangan terjadi dalam berita, hingga batas-batas mana media layak memuat atau tidak, semuanya merupakan pembahasan yang berkait dengan ideologi.

Berita adalah komoditas utama media, sehingga lima level di atas sangat berpengaruh terhadap isi pemberitaan media. Selain itu, dalam level sarana kontrol – yang juga oleh Breed (dalam Shoemaker & Reese, 1996:171) disebut dengan *editorial blue penciling*, yaitu *striking out part*

out the story, atau membuang bagian tertentu dari peristiwa yang akan diberitakan. Para reporter dibiasakan untuk menghindari kalimat-kalimat tertentu, ataupun juga tidak memuat fakta-fakta tertentu pula. Hanya saja kebijakan semacam ini tidak dibuat secara eksplisit oleh para eksekutif media.

Atas dasar hal tersebut di atas, riset yang telah dilakukan penulis berusaha mendalami bagaimana konstruksi berita yang dibuat wartawan dalam media massa mampu dibingkai menjadi suatu fenomena yang menarik dan mengarahkan persepsi dan perhatian khalayak tentang realitas sosial yang dikembangkannya. Konstruksi berita yang dilakukan wartawan dilakukan dengan upaya membentuk pesan dengan sedemikian rupa melalui berbagai kemasan *(package)*. Dengan adanya pesan-pesan yang disampaikan khalayak melalui gambar dan kata-kata ataupun grafik diharapkan akan menarik dan diterima oleh para penyimak berita. Penggunaan dan pemilihan kata-kata dan kalimat dalam menyajikan suatu pesan, serta penyertaan foto, grafik, maupun gambar dimaksudkan untuk memperkuat pesan tersebut, sehingga berita yang dihasilkan tidak luput dari bias. Ada banyak kepentingan internal media yang pada akhirnya berpengaruh terhadap bentuk dari pesan itu.

Berdasarkan latar belakang itulah bab ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah kasus lumpur Lapindo dibingkai oleh media massa di Indonesia dalam pemberitaannya. Selain itu, juga untuk mengetahui isu-isu apa sajakah yang muncul dalam media massa berkaitan dengan lumpur Lapindo dalam waktu setelah dua tahun peristiwa semburan terjadi.

Mengendalikan Semburan Informasi

Salah satu daya tarik liputan bencana semburan lumpur Lapindo yang terjadi sejak 29 Mei 2006 lalu adalah *konflik*. Konflik itu melibatkan Lapindo Brantas, pada satu sisi, dan warga korban luberan lumpur, pada sisi lainnya. Termasuk dalam kubu korban ini adalah semua orang yang menjadi terganggu kepentingannya. Mereka adalah pengguna jalan, pedagang, dan pengemudi angkot. Sudah jamak wartawan memberi perhatian pada peristiwa bernuansa konflik: konflik kemanusiaan, ekonomi,

teknis, bahkan politik. Maka, tak heran jika media dengan sukarela menyediakan beribu-ribu halaman dan ribuan jam siarnya untuk berita semburan liar lumpur panas itu. Yang juga jamak adalah ketika para pihak yang terlibat dalam konflik itu berupaya keras keluar sebagai ”pemenang”. Setidaknya untuk memenangkan simpati publik, bahkan simpati pemerintah. Lapindo Brantas tentu saja memiliki cukup modal untuk itu. Didukung oleh industri kehumasan yang canggih, lembaga itu bisa saja memperoleh dukungan media untuk memenangkan opini lewat iklan, pariwara, berita, atau berita mirip-mirip pariwara. Warga korban pun bisa dengan serta-merta memperoleh dukungan media. Naluri wartawan untuk selalu berpihak dan membela yang lemah akan dengan mudah mendorong wartawan untuk memberi porsi pemberitaan lebih besar kepada warga korban. Gejala itu bisa dilihat dari lebih besarnya porsi pemberitaan untuk warga rumahan dibanding warga pemilik pabrik yang sama-sama bernafas dalam lumpur.

Dalam pelbagai forum kajian kehumasan, peran industri humas dalam menangani isu lumpur Lapindo ini menjadi bahan kajian menarik. Ada yang menyebut isu lumpur berkembang liar karena kegagalan lembaga humas; lainnya membela, ”bukan salah humas, tapi isunya memang kelewat besar”. Tak ada satu pun teori kehumasan yang bisa digunakan untuk menangani isu itu. Pendek kata, peristiwa semburan lumpur panas itu benar-benar menyedot energi masyarakat, termasuk energi media.

Bencana lumpur itu, di samping berlangsung dalam kurun waktu panjang, juga terasa melelahkan karena seolah tanpa ujung. Dalam kaitan ini menarik untuk terus menyimak sampai kapan para pihak bisa bertahan, termasuk mencermati daya tahan media untuk tetap berteguh sikap sebagai media. Kita bersyukur belum ada pihak yang menggunakan cara-cara preman untuk memenangkan pertarungan. Di sini media dituntut untuk bersikap ekstra hati-hati ketika meliput aksi warga korban lumpur. Rasa jenuh wartawan yang kelewat sering meliput aksi warga yang ”biasa-biasa saja” boleh jadi mendorong warga untuk beraksi ekstra heboh agar mendapat liputan, misalnya, memblokade jalan utama. Padahal liputan yang kurang bijak atas aksi semacam itu justru akan berbalik menimbulkan perasaan antipati, bukannya simpati, dari masyarakat yang merasa dirugikan

oleh blokade itu. Kejenuhan juga dihadapi wartawan yang meliput dari sisi Lapindo karena informasi yang tak beranjak dari itu-itu saja, selama beberapa tahun. Dengan kata lain, narasumbernya tetap saja.

Dalam peristiwa sebesar semburan lumpur Lapindo, ada peran mulia yang bisa dimainkan wartawan, yaitu menjaga agar masyarakat tidak frustrasi atau putus asa. Memang, dalam batas-batas tertentu, rasa putus asa dan frustrasi itu bisa dipahami karena pelbagai upaya, mulai dari yang rasional sampai yang irrasional, dari ”orang normal” sampai ”paranormal” sudah dilakukan, namun sejauh ini hasilnya nihil. Bahkan korban sudah jatuh, sementara kerugian materiil pun terus bergulir. Liputan mendalam dan menyentuh berbagai aspek kisah tentang warga korban yang cepat bangkit keluar dari lingkaran masalah bisa menjadi inspirasi untuk menekan rasa frustrasi dan putus asa. Dorongan publik lewat liputan media agar gagasan merelokasi jalur kereta api, jalan utama, dan jalan tol Sidoarjo-Porong secara psikologis amat besar pengaruhnya untuk menumbuhkan harapan dan rasa percaya diri masyarakat dari perasaan tidak berdaya dan putus asa.

Media bisa mengingatkan kemungkinan menurunnya *greget* berbagai kalangan dalam mengatasi dampak lumpur yang begitu besar menimpa masyarakat. Memberi perhatian hanya pada liputan konflik antara warga korban dan Lapindo rasanya tak terlalu bijak, meski mungkin memang menarik. Pada dasarnya tak ada pihak yang tak ingin segera keluar dari semburan masalah. Ketika negeri kita sedang dirundung untaian malapetaka yang seolah tak berujung, agaknya bijak juga kalau media merenungkan peran yang sering dilupakan ini: peran mendidik masyarakat. Jangan takut untuk mengakui jangan-jangan justru pers yang telah membentuk perilaku masyarakat yang selalu dibakar semangat saling curiga, mudah tersinggung, gampang dibakar api amarah, tidak toleran terhadap perbedaan, gampang cerai susah rujuk, kehilangan semangat dan asa, takut hidup dan mudah bunuh diri. Agak susah menutupi realitas bahwa dalam menangani kasus semburan lumpur itu warga seperti kehilangan tempat berlindung, bahkan sekadar tempat bersandar. Itu terjadi ketika lembaga eksekutif bekerja lamban, lembaga legislatif bungkam, dan lembaga yudikatif pun lembek; dalam kondisi seperti itu, orang berpaling pada media.

Membingkai Ideologi Media

Isu lumpur Lapindo di media massa di tanah air tidak pernah sepi seiring dengan terusnya luapan lumpur yang juga belum surut. Berbagai isu yang muncul di media massa selama ini lebih mengumpul atau mengelompok dominan pada persoalan pengungsi dan ganti-rugi. Aspek sosial dari luapan lumpur tersebut lebih mewarnai berita daripada persoalan teknis bencana lumpur itu sendiri, sehingga isu yang berkembang mengarah pada persoalan politik. Media mengemas pemberitaan lumpur Lapindo dengan berbagai cara. Adakalanya media massa sendiri mempunyai bingkai atau sudut pandang yang berbeda satu sama lain. Perbedaan ini terkait dengan kepentingan media massa sendiri. Yang menarik, bahkan, media massa yang kepemilikannya mempunyai hubungan erat dengan perusahaan Lapindo sendiri berusaha menghindar untuk menayangkan atau meliput kejadian tersebut. Pada akhirnya keberpihakan media massa dipertanyakan oleh publik.

Hakikatnya institusi media massa mempunyai kebijakan dan ideologi yang berbeda satu sama lain. Kebijakan redaksional masing-masing media massa menentukan arah dan karakteristik berita-berita yang dimuat. Perbedaan kebijakan redaksional yang berbeda inilah yang menyebabkan tingkat atau kadar objektivitas media massa terhadap institusi atau lembaga atau orang yang diberitakan menjadi perdebatan yang krusial tentang profesionalisme media sebagai aparat penunjang proses demokrasi bangsa. Mengapa ada pemberitaan yang merugikan institusi atau lembaga tertentu, tetapi ada juga berita yang mendukung atau memuat pemberitaan yang isinya baik-baik saja tentang institusi atau lembaga yang lain?

Sementara itu, perlu disadari bahwa pemberitaan media massa memengaruhi pikiran, opini, dan citra sebuah institusi atau lembaga atau perorangan di depan khalayak. Jika pemberitaan yang muncul selalu negatif, maka pandangan dan opini publik terhadap lembaga tersebut juga akan negatif. Sebaliknya, jika pemberitaan-pemberitaan itu bernuansa positif, maka yang ada di benak publik pun akan baik. Erving Goffman (1972) telah membuktikan hal ini. Goffman melihat bahwa pesan-pesan yang dibingkai atau dikemas dalam iklan-iklan yang ditelitinya

ternyata secara signifikan memengaruhi citra dan persepsi khalayak terhadap barang atau jasa yang diiklankannya. Goffman sendiri mengaku bahwa efek media massa sendiri terbatas. Dari sinilah Goffman melihat perlunya untuk mengekplorasi lebih jauh bagaimana institusi media (i.e. iklan) menciptakan, memproduksi, dan mendistribusikan pesan-pesan komunikasi dengan bingkai atau kerangka orientasi dan sikap media. Konsep "bingkai" *(frame)* dari Goffman inilah yang kemudian dikenal dan digunakan sebagai metodologi untuk melihat cara-cara media mengemas pemberitaan sebagai komoditas mereka yang dijual kepada khalayak; metode "analisis bingkai" *(frame analysis)*.

Selain itu, bingkai adalah cara memberi interpretasi secara keseluruhan untuk memisahkan fakta. Menurut Entman (1993), bingkai melibatkan "seleksi" *(selection)* dan "penonjolan" *(salience)*. Bingkai mendefinisikan persoalan, mendiagnosa penyebab, membuat penilaian moral, dan menyarankan perbaikan-perbaikan. Bingkai menggunakan "perangkat tekstual" *(textual devices)*, seperti: kata-kata tertentu, frase-frase tertentu, membuat referensi kontekstual tertentu, memilih gambar atau film tertentu, memberikan contoh yang tipikal, atau merujuk pada sumber tertentu. Terdapat beberapa model bingkai: *pertama*, *cognitivist model*, jurnalistik teks memengaruhi pikiran dan kata-kata mereka yang terpengaruh oleh jurnalistik teks; *kedua*, *constructionist model*, jurnalis sebagai penyedia paket-paket interpretatif dari posisi-posisi sponsor (atau sumber) berita; *ketiga*, *critical paradigm*, bingkai sebagai *outcome* dari rutinitas pencarian berita dan nilai-nilai elite.

Berita, secara umum, tidak lahir dari peliputan secara acak dari peristiwa-peristiwa yang ada, melainkan tercipta dari proses seleksi dan konstruksi yang spesifik. Media melakukan proses seleksi dari berbagai realitas ini dengan menonjolkan bagian tertentu dari sebuah peristiwa. "Analisis bingkai" adalah sebuah metode penelitian yang berusaha membongkar bagaimana media menampilkan sebuah peristiwa dalam isi medianya. Tidak sebagaimana "analisis isi" menampilkan unsur-unsur tema dan topik atau fisik tampilan sebuah berita secara kuantitatif, "analisis bingkai" berusaha mendalami lebih jauh cara-cara yang dilakukan oleh media massa dalam "pengemasan" *(packaging)* sebuah persitiwa atau

isu yang beredar di masyarakat. Cara yang dilakukan adalah melalui teknik-teknik naratif atau bercerita yang terorganisir sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan isu atau kejadian yang kontroversial. ”Analisis bingkai” merupakan perangkat ”analisis isi” media yang bertujuan untuk mengungkap sikap, nilai, dan perspektif atau cara pandang media ketika memilih fakta dan menyajikannya sebagai pesan media. Cara pandang ini pada akhirnya menentukan politik atau ideologi media, yang dipandu dengannya media menyeleksi fakta-fakta yang layak dimuat dalam referensi media, dan fakta-fakta yang dihilangkan melalui praktek-praktek bahasa dan kalimat, serta sudut pandang dan cara mengulas isu yang terjadi.

Media pada akhirnya menggunakan caranya sendiri, baik dalam pengemasan dan pembingkaian berita, dan juga mencari dan menggali informasi untuk kebutuhan medianya. Berita sebagai komoditas media yang diperjualbelikan kepada masyarakat menjadi ”rentan” *(fragile)* karena media massa cenderung mengedepankan kebijakan pemilik dan para redaksi medianya dibandingkan idealisme yang ditetapkan dalam visi dan misi masing-masing media massa itu sendiri. Melihat kecenderungan yang dilakukan oleh media massa terhadap isu lumpur Lapindo ada hal-hal berikut yang tampak dari model-model jurnalisme. *Pertama*, kosakata yang digunakan berkaitan dengan isu-isu Lapindo sering kali lebih bernuansa ”malapetaka” dan ”radikalisme”. Artinya, nuansa pemberitaan lebih mengarahkan pada istilah-istilah seperti ”kemalangan”, ”kehilangan”, ”penuntutan”, ”perusakan”, ”pemblokiran”, dan sejenisnya. Bukannya kosakata seperti ini tidak baik, atau tidak benar, tetapi dengan menggunakan istilah tersebut media menyajikan gambaran atau potret objek yang ”terlepas” dari persoalan yang sebenarnya. Selain itu, dengan pemilihan bahasa yang demikian, media sekaligus menyulut api dalam suasana yang masih menjadi perdebatan ini. *Kedua*, narasi dan cara bertutur media kepada khalayak lebih sekadar menceritakan kasus-kasus perusakan, penutupan jalan, protes, pemberontakan, dan semacamnya yang dilakukan oleh rakyat Porong korban Lapindo. Cara bertutur seperti ini tidak menarik simpati, bahkan cenderung ditinggalkan oleh pembaca pers itu sendiri.

Ketiga, cara media mengungkap fakta-fakta tidak lagi bisa ditengarai dengan opini media yang muncul. Artinya, fakta-fakta yang dimuat media sering kali tidak diperoleh dari hasil investigasi dan penelitian yang cermat, melainkan dari sumber-sumber yang juga ”katanya” atau merujuk dari sumber yang lain. *Keempat*, pemilihan narasumber berita yang digunakan atau dirujuk oleh media dalam kasus lumpur Lapindo yang paling dominan adalah dari perusahaan Lapindo sendiri dan pemerintah. Sumber-sumber itu dipilih, yang pada akhirnya tidak menyelesaikan masalah, karena kedua pihak itu sama-sama mempertahankan diri atau cenderung defensif pada sikapnya masing-masing, sehingga tidak memberikan solusi. *Kelima*, siapa atau apa yang sering diliput. Dalam kasus ini lebih banyak liputan dilakukan pada protes-protes korban lumpur Lapindo daripada usaha-usaha yang harus dilakukan untuk menyelesaikan persoalan yang harus segera dientaskan. Siapa yang diliput menjadi tidak ada lagi karena media tidak mampu memfokuskan pemberitaannya. Namun, tidak semua media massa melakukan ini. Ada media yang berani untuk mengambil sudut pandang yang berbeda. Memang harus ditentukan, apakah objek pemberitaan adalah korban, negara, lumpur Lapindo, perusahaan, atau objek lain secara tegas.

Keberpihakan Media

Salahkah media berpihak? Tidak salah media massa berpihak. Namun, dalam hal ini ada yang harus ditekankan. Selama ini ada dua perdebatan pandangan. Pada satu sisi, media dituntut untuk objektif, tidak boleh berpihak pada salah satu kelompok atau golongan atau grup tertentu. Dalam kasus-kasus pertikaian, konflik, perseteruan atau semacamnya, memang media harus objektif. Hal ini karena efek yang ditimbulkan dari pemberitaan jika tidak objektif akan membahayakan khalayak. Pada sisi lain, ada yang berpendapat bahwa media tidak perlu objektif, bahkan harus membela salah satu pihak atau kepentingan. Pada konteks ini, jika isu-isu yang diberitakan berkaitan dengan bencana yang mana pihak yang ”kalah”, atau korban, akibat bencana itu (perang, bencana alam, dll.) harus diangkat ke permukaan dimaksudkan untuk menarik simpati khalayak sekaligus mem-

berikan harapan untuk penyelesaian masalah. Dalam pandangan kedua ini, pihak-pihak yang lemah memang harus dikedepankan untuk tujuan korban, bukan untuk tujuan dari negara atau pihak-pihak berseteru lainnya. Dalam pemberitaan tentang kasus lumpur Lapindo, media massa bisa mengambil posisi pada pendapat kedua ini.

Yang tak kalah pentingnya dari bingkai media adalah efek yang ditimbulkan kepada khalayak. Dengan kata lain, apakah yang diberitakan media juga sama dengan sikap yang dimiliki oleh khalayak terhadap isu tersebut. Efek bingkai akan berpengaruh pada cara khalayak bersikap dan bertindak terhadap persoalan yang ada. Ketika informasi disuplai oleh media berita dari sumber-sumber tertentu, berita akan diterima khalayak dengan bangunan bingkai yang sesuai dengan tujuan sumber dan tidak pernah objektif. Bingkai berita dapat memengaruhi bingkai khalayak *(possible effect)*. Lewat pengemasan beritanya bisa memperlihatkan motif atau sikap media, seperti: *motive* (menyelamatkan, memperjuangkan, mengkritik); *report tone* (emosional/*human*, netral/*technical*); *characterization* (tragedi, bencana, kesengajaan); *news sources* (sumber berkuasa, mengontrol arus informasi, pengaruh ekstra-media); orientasi (strategi mendapatkan keuntungan kampanye atau konfliktual melawan objektivitas substansi peliputan); dan aktor (kepentingan narasumber dan organisasi media, jurnalis, dan khalayak).

Sebagian Media "Menghakimi" Lapindo?

Menggunakan analisis bingkai, saya melihat bagaimana media mengonstruksi peristiwa lumpur Lapindo. Peristiwa yang diangkat media dianggap bukan sesuatu yang *taken for granted.* Wartawan dan media dipandang secara aktif membentuk realitas. Artinya, dalam penelitian bingkai, titik persoalan terletak pada bagaimana realitas dikonstruksi oleh media. Atau, bagaimana media membingkai peristiwa dalam konstruksi ideologi tertentu. Dalam pembingkaian, perhatian diarahkan pada bagaimana sebuah peristiwa dibingkai. Pada penelitian yang dilakukan penulis mengenai pemberitaan seputar luapan lumpur, dengan pisau analisis bingkai yang dilakukan adalah melihat bagaimana keenam harian:

Kompas, *Media Indonesia*, *Seputar Indonesia*, *Jawa Pos*, *Surya*, dan *Surabaya Post* membingkai kasus tersebut, menemukan beberapa bingkai yang menarik.[1]

Bingkai labelisasi semburan lumpur

Dalam berita mengenai persoalan seputar semburan lumpur, media massa memiliki kebijakan masing-masing yang berbeda antara satu dengan yang lain. *Jawa Pos*, *Surya*, dan *Seputar Indonesia* cenderung tidak konsisten dalam melabeli peristiwa semburan lumpur. Tiga harian ini terkadang menyebut sebagai ”lumpur Lapindo” namun terkadang juga menyebut ”lumpur” (saja) atau ”lumpur Sidoarjo”. Sementara *Kompas* secara konsisten menyebut sebagai ”lumpur Lapindo”. *Media Indonesia* lebih sering menyebut sebagai ”lumpur Sidoarjo”, namun ada kalanya masih menyebut ”lumpur Lapindo”. Harian *Surabaya Post* secara konsisten menyebut hal ini sebagai ”lumpur Porong”. Pelabelan ”lumpur Lapindo” berkonotasi penghakiman atas Lapindo Brantas sebagai pihak yang bertanggung jawab atas luapan lumpur. Sedangkan label ”lumpur Porong” atau ”lumpur Sidoarjo” berkonotasi seolah-olah *netral* (tidak menuduh atau menyalahkan siapa yang menjadi penyebab luapan lumpur) dan hanya menunjukkan lokasi peristiwa ini terjadi, di Porong atau di Sidoarjo.

Bingkai ”ganti-rugi” bagi korban luapan lumpur

Dalam berita mengenai ganti-rugi bagi korban lumpur, *Jawa Pos*, *Surya*, *Kompas,* dan *Seputar Indonesia* mengembangkan bingkai yang sama. Pilihan bingkai yang berbeda dikembangkan oleh harian *Media Indonesia* dan *Surabaya Post*. *Jawa Pos, Surya, Kompas*, dan *Seputar Indonesia* membingkai Lapindo telah mengingkari komitmen sehingga menimbulkan amarah warga. Rangkaian peristiwa mulai dari demo korban lumpur di Jakarta, runyamnya perumahan Kahuripan Nirvana Village, hingga skema ganti-rugi oleh keempat media itu dibingkai sebagai bagian dari

[1] Riset ini didanai Yayasan TIFA dilakukan selama 6 bulan sekitar bulan Juni-Desember 2008. Selain melakukan analisis bingkai, program ini juga memproduksi newsletter dua mingguan 12 halaman dan didistribusikan kepada masyarakat korban semburan lumpur. Isinya selain hasil analisis framing, juga feature seputar kehidupan warga korban.

”pengingkaran komitmen Lapindo” pada korban lumpur. Korban lumpur adalah pihak yang lemah, yang hanya ditaburi janji-janji oleh Lapindo dan kemudian diingkari. Skema ganti-rugi *cash-and-carry* yang sebenarnya sudah selaras dengan Perpres No. 14 Tahun 2007 ternyata diingkari oleh Lapindo dengan model *cash-and-resettlement*, bahkan kemudian cicilan dibayarkan dalam angsuran yang semakin merugikan korban lumpur. Demo dan protes yang dilakukan warga merupakan upaya mereka sebagai kelompok teraniaya dalam memperjuangkan hak-hak mereka.

Sementara itu, *Media Indonesia* dan *Surabaya Post* mengembangkan bingkai yang berbeda. Dalam konsepsi dan konstruksi dua media tersebut, Lapindo Brantas dianggap sebagai pihak yang berpegang pada komitmen dan bertanggung jawab. Pembangunan Kahuripan Nirvana Village dipandang *Surabaya Post* sebagai bentuk komitmen Lapindo yang menguntungkan korban lumpur, bahkan *Media Indonesia* berani mengklaim bahwa korban lumpur merasa puas dan senang dengan keberadaan Kahuripan Nirvana Village. Realitas mengenai ganti-rugi yang digiring Lapindo menjadi model angsuran, bagi dua media ini dikonstruksikan sebagai hal yang terpaksa dilakukan Lapindo Brantas karena terkena dampak krisis ekonomi global.

Bingkai komitmen pemerintah dan kinerja BPLS

Dalam berita mengenai komitmen pemerintah dan kinerja BPLS, *Jawa Pos* dan *Kompas* mengembangkan bingkai ”pemakluman” terhadap kinerja BPLS, misalnya, dalam konstruksi mengenai upaya BPLS menormalisasi Sungai Porong. Meski belum dianggap maksimal, BPLS dalam konsepsi *Jawa Pos* dan *Kompas* telah melakukan berbagai upaya yang tetap perlu dihargai. Sementara itu, bagi *Surabaya Post, Surya*, dan *Seputar Indonesia* kinerja BPLS dipandang tidak maksimal, gagal, dan hanya menghambur-hamburkan uang. Terkait komitmen pemerintah, empat media (*Jawa Pos, Surya, Seputar Indonesia*, dan *Kompas*) memilih bingkai yang sama, yaitu pemerintah tidak serius menangani bencana lumpur. Hal ini didukung penggunaan metafora ”pemerintah berpangku tangan”; pemerintah bukan saja dianggap tidak serius, namun juga menyerah dan hanya mengembalikan kepada alam, tanpa ada upaya mencari solusi untuk me-

redam semburan lumpur. Dua media lain, *Media Indonesia* dan *Surabaya Post* mengambil pilihan untuk tidak memuat berita tentang tema ini.

Bingkai dua tahun setelah semburan

Dalam berita mengenai kondisi daerah yang terkena semburan lumpur, *Jawa Pos, Surya, Kompas*, dan *Seputar Indonesia* mengembangkan bingkai yang sama. Kondisi di Porong disebut oleh empat media tersebut sebagai "memprihatinkan dan menyisakan banyak persoalan" (infrastruktur rusak, tempat usaha harus tutup karena terendam lumpur). Sementara itu, pilihan bingkai yang sangat kontras dikembangkan oleh harian *Surabaya Post* dan *Media Indonesia*. Menurut *Surabaya Post*, proses ganti-rugi telah berjalan dan kondisi warga cukup baik. Yang menarik, *Media Indonesia* membingkai bahwa Porong kini menjadi kawasan wisata yang potensial mendatangkan keuntungan bagi warga.

Bingkai status hukum Lapindo

Dalam berita mengenai status hukum semburan lumpur, *Jawa Pos* mengembangkan bingkai bahwa kasus ini belum final. Kritik terhadap proses hukum yang panjang dan berbelit-belit digunakan *Jawa Pos* untuk mendukung konstruksi bahwa "ada yang tidak beres" dalam persoalan ini, sehingga penetapan status hukum semburan lumpur ini pun menjadi terkatung-katung. Sementara liputan tentang hasil konferensi geologi sedunia, *Jawa Pos* mengonstruksi beritanya dengan bingkai bahwa semburan lumpur memang disebabkan oleh aktivitas Lapindo Brantas. Sebaliknya, *Surabaya Post* dan *Media Indonesia* mengembangkan bingkai bahwa Lapindo "tidak bersalah" dalam kasus semburan lumpur. Apa yang sudah dilakukan Lapindo dengan memberikan ganti-rugi kepada korban lumpur merupakan "kebaikan hati" semata. *Surabaya Post* dan *Media Indonesia* juga memuat berita mengenai hasil konferensi geologi dan secara implisit menyebut bahwa semburan lumpur terjadi karena fenomena alam, bukan karena kesalahan PT Lapindo.

Dari empat bingkai di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua bingkai besar yang saling bertentangan. *Pertama*, Lapindo harus bertanggung jawab terhadap kasus semburan lumpur dan dampak yang

ditimbulkan *(Jawa Pos*, *Kompas*, *Surya*, dan *Seputar Indonesia)*. Aksi-aksi warga, tuntutan terhadap model ganti-rugi yang ditawarkan Lapindo, bagi empat media tersebut hanyalah ekses. Solusi ganti-rugi Lapindo justru merugikan warga dan tidak sesuai dengan Perpres yang sudah ditetapkan. Bingkai kedua *(Surabaya Post* dan *Media Indonesia)* yang muncul adalah "Lapindo tidak bersalah" dalam insiden ini karena semburan lumpur terjadi akibat peristiwa alam yang tidak terhindarkan. Meskipun begitu, Lapindo tetap bertanggung jawab dengan memberi ganti-rugi yang menguntungkan warga, bahkan disebutkan juga bahwa kawasan semburan berpotensi menjadi kawasan wisata yang dipandang menguntungkan warga.

Bagaimana Langkah ke Depan?

Bab ini telah menguraikan bahwa terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan oleh media maupun pemerintah dan sebagai penyempurnaan kajian ini lebih lanjut. Saya melihat perlunya dibentuk *media center*. *Media center* ini berfungsi sebagai pusat informasi yang memasok kebutuhan informasi bagi kebutuhan masyarakat, media massa, ataupun pihak-pihak lain yang membutuhkan. *Media center* menjadi penyeimbang informasi sehingga data atau informasi yang diterima publik lebih beragam. Tanpa *media center*, pasokan informasi hanya berasal dari media massa yang boleh jadi masing-masing memiliki kepentingan ideologi.

Bagi media massa, meskipun tidak memiliki keberpihakan baik pada Lapindo maupun pada warga korban lumpur, namun cara wartawan mencari berita, memilih fakta dan narasumber, hingga menulis berita, memiliki konsekuensi atau efek berita. Sudut pandang yang dipilih, fakta yang ditonjolkan, hingga pemilihan narasumber, semua bukanlah "bebas nilai", apalagi kebetulan. Oleh karena itu, penggunaan bahasa juga perlu diperhatikan efek atau dampaknya. Dari wawancara dengan beberapa pakar media, saya melihat media perlu lebih memberi perhatian pada dampak sosial dari semburan lumpur. Beberapa hal yang tidak cukup banyak diangkat oleh media massa yang diteliti, seperti: a) kisah-kisah warga korban lumpur yang sukses bangkit dari tragedi lumpur, fakta kisah sukses warga yang ulet dan berupaya untuk keluar dari kesulitan dapat memberi se-

mangat pada korban lumpur dan menginspirasi untuk bangkit, tidak sekadar mengeluh atau protes tanpa solusi; b) kondisi perempuan dan anak-anak korban semburan lumpur, baik secara fisik maupun psikologis, perjuangan kaum perempuan bangkit dari kesulitan hidup pasca-tragedi lumpur, dampak semburan lumpur bagi pendidikan anak-anak; dan c) bagi media-media nasional hendaknya memberikan perhatian yang lebih besar untuk persoalan lumpur karena bencana lumpur – meskipun tidak disebut sebagai ”bencana nasional” – adalah peristiwa yang mengakibatkan jatuhnya ribuan korban dan membawa dampak serius pada perekonomian masyarakat Porong dan Jawa Timur pada umumnya.

Tentunya, perlu penelitian lebih lanjut seputar luapan lumpur, baik penelitian untuk media cetak, elektronik, maupun media *online*. Hingga saat ini berita seputar persoalan semburan lumpur masih terus muncul, sebab lumpur itu sendiri hingga saat ini masih terus menyembur. Berbagai persoalan yang ditinggalkan juga masih belum tampak solusinya, seperti: kerusakan infrastruktur, dampak sosial, kondisi Sungai Porong yang dipenuhi lumpur, ganti-rugi korban lumpur yang belum juga tuntas, hingga status hukum kasus luapan lumpur. Persoalan-persoalan ini perlu dikawal terus oleh media, sebagai salah satu alat kontrol sosial, sekalipun media massa juga perlu dikontrol oleh publik agar tidak memberikan informasi yang menyesatkan karena intervensi kepentingan dari pihak-pihak tertentu.

Referensi

Entman, R. M., & Rojecki, A., (1993). ”Freezing Out the Public: Elite and Media Framing of the U.S. Anti-nuclear Movement.” *Political Communication,* Vol. 10(2), 151-167.

Goffman, E., (1972). *Frame Analysis: Essays on the Organization of Experience,* New York: Harper and Row.

Shoemaker, P. & Resse, S.D., (2006). *Mediating The Message: Theories of Influences on Mass Media Content*. London: Longman Group.

Kasus Lapindo di Balik Layar "Tivi Merah"

ANASTASYA ANDRIARTI & ANTON NOVENANTO

PADA TAHUN 1999, sutradara film legendaris *All The President's Men* (1977), Michael Mann, membesut sebuah film berjudul *The Insider* yang diangkat dari kisah nyata di balik produksi program *60 Minutes* di stasiun CBS pada pertengahan tahun 90-an. Secara garis besar, film tersebut merupakan kisah perjuangan seorang Lowell Bergman (Al Pacino), produser program *60 Minutes*, dalam memperjuangkan berita tentang industri rokok di Amerika. Diceritakan, Lowell berhasil mewawancarai Jeffrey Wigand (Russell Crowe) yang baru saja dipecat dari sebuah perusahaan rokok besar di Amerika. Setelah melalui proses negosiasi yang panjang, Bergman berhasil meyakinkan Wigand untuk berani bersaksi sebagai *whistle-blower* tentang bahaya adiktif nikotin dari rokok.

Konflik utama film itu muncul ketika wawancara khusus presenter *60 Minutes*, Mike Wallace (Christopher Plumer), dengan Wigand dilarang tayang oleh manajemen CBS. Dari penelusurannya, Bergman mengetahui pemilik CBS berencana menjual sahamnya pada seseorang yang juga memiliki saham di bisnis rokok. Pemberitaan tentang bahaya adiktif nikotin dinilai manajemen bakal berdampak pada rencana penjualan

saham CBS. Alih-alih menayangkan wawancara dengan Wigand secara utuh, CBS melakukan sensor dan editing internal tanpa seizin Bergman. Sebagai produser, Bergman merasa berkepentingan untuk menyampaikan ”informasi yang dianggapnya penting bagi semua orang” – bahwa rokok itu adiktif. Berbekal jejaring dengan sesama rekan jurnalis di media lain, Bergman mulai melakukan sebuah aksi tersembunyi untuk menyerang manajemen media tempatnya bekerja dengan mengangkat skandal ”sensor internal” oleh manajemen CBS pada media lain, *The New York Times*. Setelah *The Times* mengangkat skandal itu sebagai editorial, CBS pun akhirnya menayangkan segmen wawancara Wigand secara utuh tanpa sensor. Informasi yang dianggap Bergman penting bagi semua orang akhirnya disiarkan.

Film tersebut merupakan kisah heroik *duo* Wigand (*whistle-blower* dari industri rokok) dan Bergman (jurnalis dalam struktur ekonomi-politik organisasi media). Kehadiran dua aktor dari dua struktur yang berbeda menyebabkan struktur politik yang lebih besar, negara, harus kebakaran jenggot. *The Insider* merupakan sebuah pembuktian dari apa yang pernah dikatakan Anthony Giddens sebagai ”agensi” dan ”strukturasi” (lih. Giddens, 1984). Asumsinya, agensi bisa mengubah struktur karena dia memiliki ”sumber daya”, yaitu: ”moralitas” dan ”kuasa”. Wigand dan Bergman adalah aktor yang mendayagunakan diri sebagai ”agensi” dalam upayanya melakukan ”strukturasi” dalam bisnis rokok, dalam organisasi media, dalam struktur politik, dan yang terpenting, dalam opini publik.

Bab ini memfokuskan pada bagaimana para jurnalis (agensi) di sebuah stasiun televisi berita *memperlakukan* kasus Lapindo. Bab ini disusun dalam susunan sebagai berikut: diawali dengan pemaparan ”teori strukturasi” sebagai kerangka melihat bagaimana relasi struktur-agensi di sebuah organisasi media massa. Setelah penjelasan teoretik, bab ini membahas kondisi struktur bisnis pertelevisian di Indonesia secara umum. Secara khusus, kami membahas tentang struktur ekonomi-politik ”tivi merah” dalam memproduksi berita tentang bencana lumpur panas di Sidoarjo. Pemilihan ”tivi merah” sebagai organisasi media dan ”kasus Lapindo” sebagai subjek bahasan kami adalah karena ”tivi merah” memiliki afiliasi dengan Lapindo Brantas Inc. – perusahaan yang diyakini publik telah

menyebabkan insiden lumpur di Sidoarjo. Pembahasan lalu masuk pada paparan tentang karakter dan strategi para jurnalis ”tivi merah” dalam memproduksi berita tentang insiden lumpur panas itu. Kami melihat, para jurnalis (agensi) dalam (struktur) ”tivi merah” bukanlah individu pasif yang menuruti apa kata pemiliknya; justru dalam diri merekalah pertentangan kuat antara ”yang ideal” *(das Solen)* dan ”yang nyata” *(das Sein)* mewujud nyata dibandingkan jurnalis di media lain. Kami mengusung gagasan bahwa jurnalis (sebagai agensi) tidak hanya memiliki kuasa untuk ”memilih” fakta mana yang akan direpresentasikan kembali dalam beritanya, tapi dia juga memiliki kuasa untuk ”membuang” fakta — yang sekalipun memiliki nilai berita tinggi — namun dianggap dapat membahayakan bagi struktur organisasi media tempatnya bekerja. Kami juga memasukkan analisis kritis terhadap sebuah ”paket berita” tivi merah tentang kasus Lapindo. Alih-alih mengatakannya sebagai penjinakan nalar kritis, proses eksklusi tersebut merupakan produk dari kreativitas para jurnalis saat melakukan strukturasi terhadap struktur organisasi di media tempat mereka bekerja.

Aktor, Agensi, Struktur, Strukturasi

Dalam sosiologi, teori mengenai tindakan seakan terbelah menjadi dua: ”kubu strukturalis” dan ”kubu eksistensialis”. Kubu strukturalis melihat tindakan individu tak lebih dari cerminan struktur sosial. Dengan kata lain, struktur merupakan determinan bagi segala tindakan sosial. Pandangan ini digagas oleh Karl Marx yang melihat struktur ekonomi sebagai determinan dalam analisis tindakan sosial. Emile Durkheim memperkuat determinasi struktur atas individu. Individu adalah bagian dari masyarakat. Individu bertindak karena struktur sosial *memaksanya* untuk bertindak. Sementara itu, kubu eksistensialis melihat individu sebagai aktor yang memiliki kapasitas transformatif dan memiliki kehendak bebas yang bisa jadi tidak sejalan dengan struktur yang melingkupinya. Sebagai mahluk sosial, individu tidak dilihat sebagai sesuatu ditentukan oleh struktur namun, mengikuti Max Weber dan Georg Simmel, aktorlah yang *menentukan arah*

bagi struktur sosial. Anthony Giddens muncul sebagai penengah dalam dikotomi struktur-aktor dengan memunculkan konsep "agensi".

Konsep "agensi" sedikit berbeda dengan konsep "individu" atau "aktor". Bagi Giddens, struktur sosial bukanlah sesuatu "yang mati", namun terus berubah akibat dari dinamika dari para agensi di dalamnya. Agensi merupakan aktor yang hidup dalam struktur yang secara aktif menggunakan sumber daya *(resources)* yang dimilikinya untuk melakukan "strukturasi" atas struktur yang sudah ada *(rules)*. Giddens melihat strukturasi sebagai konsekuensi dari relasi antara struktur dan agensi. Pada satu sisi, struktur tidak bisa bertahan tanpa keberadaan agensi yang mereproduksinya dalam kehidupan sosial. Praktik sosial para agensi pun, pada sisi lain, tidak bisa keluar dari struktur tempatnya berada. Bahkan tindakan yang menyimpang dari struktur *(devian)* hanya bisa dilakukan, justru, ketika ada standardisasi tindakan yang sesuai pada struktur.

Dalam konteks lembaga media, pertentangan terjadi antara "kubu radikal", yang melihat jurnalis bekerja dalam struktur tertentu yang ditentukan oleh organisasi media tempatnya bekerja, pada satu sisi, dan, pada sisi lain, "kubu liberal" melihat jurnalis sebagai agen bebas yang berhak menentukan sikapnya secara independen sekalipun mereka hidup dan bekerja dalam struktur organisasi media tertentu. Produser *60 Minutes*, Bergman, menempatkan dirinya melampaui perannya sebagai seorang agensi *di* CBS, tapi juga sebagai seorang agensi dalam struktur sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat, untuk mencapai hakikat profesionalitas seorang jurnalis, menyebarkan informasi yang menurutnya penting diketahui bagi semua orang. Akan tetapi, peran jurnalis, sebagai agensi di sebuah organisasi media, tidaklah selalu seperti Bergman di CBS yang digambarkan sebagai jurnalis yang terus gigih berjuang untuk menyampaikan yang menurutnya "penting untuk disampaikan pada publik". Media merupakan sebuah ruang publik yang dibatasi oleh "ruang" dan "waktu". Berita yang diterbitkan atau disiarkan harus berada dalam ruang dan waktu tertentu. Dalam keterbatasan itu, memberitakan "sesuatu" tentu bukannya tanpa konsekuensi karena penyajian *suatu* realitas berarti pula eksklusi fakta lain dari ruang publik tersebut. Enam puluh menit menyajikan sebuah wawancara eksklusif dengan Wigand berarti pula mengabaikan kehadiran pem-

bahasan tentang isu lain yang mungkin juga dibutuhkan oleh publik, *tapi* tidak dianggap penting oleh produser.

Teori strukturasi Giddens menginspirasi Marshall Scott Poole dalam menggagas teori strukturasi adaptif (dlm. Griffin, 2006: 262). Poole menerapkan teori strukturasi Giddens dalam ruang lingkup yang lebih kecil, yaitu kelompok komunikasi — sekumpulan orang yang berkumpul dalam latar belakangnya masing-masing untuk mewujudkan sesuatu. Poole ingin membuktikan teori Giddens dengan melihat pada persoalan bagaimana agensi dan struktur saling berinteraksi. Poole menemukan dua konsep (”aturan” dan ”sumber daya”) untuk menjelaskan bagaimana agensi dan struktur itu saling berinteraksi dalam lingkup organisasi yang kecil, bukan masyarakat yang abstrak dan luas yang sempat disinggung Giddens melalui konsep ”moralitas”, ”komunikasi”, dan ”kuasa”.

”Sumber daya”, bagi Poole, merupakan aspek inheren dalam agensi karena di situlah segala hal yang menjadi atribut dari agensi bisa didayagunakan untuk memengaruhi atau mengontrol aksi anggota suatu kelompok, dan kemudian memengaruhi atau mengontrol aksi kelompok tersebut. Sumber daya itu bisa berwujud seperti posisi dalam struktur sosial, jaringan komunikasi, pergaulan, hingga latar belakang akademis dan lingkungan yang membentuk agensi. Sementara itu, ”aturan” dimaksudkan sebagai segala proposisi yang mengindikasikan hal-hal yang wajib diikuti, serta tolok ukur baik atau buruk yang diacu para anggota dalam suatu kelompok. Aturan lebih sering jarang ditulis namun menjadi semacam kumpulan kebijaksanaan praktis yang menjadi acuan para anggota kelompok untuk mencapai tujuan kelompok tersebut. Dalam lingkup sumber daya (yang dimiliki para agensi) dan aturan (dari suatu struktur yang menjadi acuan bagi para anggotanya), Poole melihat interaksi antara agensi dan struktur terjadi dan berkembang, sehingga struktur tidaklah paten dan kaku, melainkan selalu dinamis. Variabel sumber daya agensi tersebut memunculkan dominasi satu agensi atas agensi lain demi melakukan strukturasi terhadap struktur yang eksis menuju struktur baru yang sesuai dengan kepentingan agensi dominan tersebut. Poole (dlm. Griffin 2006: 262) menyebutkan agensi dengan sumber dayanya melakukan proses strukturasi secara sadar terhadap aturan yang sudah ada menuju suatu

aturan (struktur) baru yang menurut mereka lebih baik untuk diikuti. Meskipun begitu, Poole menilai perkembangan dalam satu kelompok tidaklah satu arah sebagai akibat dari agensi-agensi dalam sebuah struktur melakukan pola interaksi yang tak dapat diprediksi.

Lebih lanjut, menggunakan perspektif kritis, strukturasi bukanlah sebuah proses yang sepenuhnya netral. Strukturasi tidak bisa lepas dari nilai-nilai politis, dan selalu terikat pada nilai-nilai tersebut. Maksudnya, strukturasi akan selalu menjadi sebuah proses yang timpang karena cenderung menguntungkan agensi tertentu dan merugikan agensi lain. Entah tujuannya adalah memperkuat atau menggoyahkan struktur, gerak strukturasi amat bergantung pada kreativitas para agensi yang bekerja dalam sebuah struktur. Untuk memahami proses strukturasi dalam ”tivi merah”, perlulah kita mendapatkan gambaran tentang struktur media di Indonesia, dan posisi ”tivi merah” dalam struktur tersebut.

Struktur Ekonomi-Politik ”Tivi Merah”

Bisnis televisi berita, seperti juga bisnis media yang lain di Indonesia, telah terjebak dalam sistem ekonomi persaingan bebas global (Nugroho et al., 2012). Secara makro sosiologis, bisnis televisi di Indonesia pasca Orde Baru ditandai dengan maraknya praktik akuisisi dan merger yang berujung pada sentralisasi kepemilikan media televisi pada beberapa konglomerasi media saja. Hal ini dinilai beberapa pihak sebagai sebuah ancaman bagi diversitas atau keberagaman bingkai dan isi berita televisi. Sebuah paradoks bagi melonjaknya jumlah stasiun televisi dibandingkan pada zaman otoritarian Orde Baru. Dalam iklim semacam inilah, ”tivi merah”[1] bersiaran.

Tivi merah mengambil identitas sebagai televisi berita, yang adalah barang baru bagi permirsa Indonesia. Televisi berita merupakan barang

[1] Istilah ”tivi merah” muncul dari ungkapan banyak kawan aktivis maupun jurnalis yang berusaha untuk ”tidak sebut merk” dalam forum diskusi ilmiah maupun perbincangan sehari-hari. Istilah ”tivi merah” diambil karena memang perusahaan televisi tersebut mengambil warna merah sebagai warna yang mendominasi atribusinya (logo, seragam, dan aksesoris lainnya). Selain ”tivi merah”, juga muncul istilah ”tivi biru”, ”tivi hitam”, dsb.

baru bagi pemirsa televisi Indonesia. Alih-alih menawarkan hiburan pada publik dan menyisipkan beberapa jam alokasi waktu untuk berita, televisi berita secara khusus hanya menghadirkan liputan berita sepanjang hari. Jika kita mengintip sejenak sejarah dunia pertelevisian di Indonesia, maka televisi berita di Indonesia baru muncul saat Media Televisi Indonesia memperoleh izin siaran pada "tivi biru", 25 Oktober 1999. Tivi biru merupakan anak perusahaan Media Grup, kelompok bisnis media di bawah pimpinan Surya Paloh, yang juga mengelola surat kabar *Media Indonesia* dan *Lampung Post*. Mulanya, tivi biru bersiaran 12 jam sehari. Baru sejak 1 April 2001, tivi biru bersiaran 24 jam, dan sekitar sepuluh tahun tivi biru mendominasi berita televisi di Indonesia.

Pada 2008, pesaing baru televisi berita lahir pada Kamis, 14 Februari 2008: "tivi merah". Karni Ilyas, yang membidani kelahiran tivi merah, menyebutnya sebagai "televisi *news, sport*, dan *entertainment*", dengan komposisi program berita mencapai 70%, dan sisanya adalah gabungan program olahraga dan hiburan. Karni melihat tivi merah bukanlah sebagai televisi berita murni, melainkan diharapkan menjadi gabungan dari beberapa stasiun televisi *Fox*, *ESPN*, *Star Sport*, serta *AXN* sekaligus. Masih menurut Karni, terobosan tivi merah adalah pemberitaan interaktif antara studio di Jakarta dengan biro-biro di pelbagai kota di Indonesia secara langsung *(live)*. Tujuannya tak lain adalah untuk aktualitas pemberitaan. Pemirsa dijanjikan untuk segera mengetahui apa yang terjadi, saat itu juga. Selain *hard news*, juga mempersiapkan program *feature*, *indepth reporting*, *investigative reporting*, dan *talkshow*.[2]

Pada masa otoritarian Orde Baru, media cenderung menjadi pelayan bagi pemerintah; media menghadirkan realitas yang diinginkan oleh pemerintah. Media massa tidak mampu menjadi entitas yang otonom dalam

---

[2] Dibandingkan dengan televisi hiburan, televisi berita bukanlah bisnis yang menguntungkan. Sejak awal kemunculannya, rating televisi berita sulit untuk bergeser dari posisi juru kunci. Pemirsa Indonesia cenderung lebih memilih "tayangan hiburan" (termasuk informasi tentang dunia hiburan atau infotainment) daripada tayangan berita dan informasi. Meskipun begitu, rating televisi berita melonjak tajam secara periodik, misalnya, ketika Pemilihan Umum 2009. Pemirsa membutuhkan berita dan informasi pada periode-periode tertentu yang hanya paling mudah didapatkan dari televisi berita. Pada saat pengumuman kandidat calon presiden dan calon wakil presiden pada Mei 2009, rating televisi berita tersebut melonjak tajam, sampai 24% dibandingkan televisi non-berita.

memberi layanan informasi pada publik secara merdeka. Meskipun media sering dianggap tidak sepakat dengan penguasa, pelbagai aturan hukum pers membelenggu kemerdekaan para pekerja pers. Ancaman terburuk bagi yang melanggar aturan tersebut adalah pembredelan. Namun, iklim tersebut berubah seiring dengan turunnya Soeharto pada Mei 1998. Di tengah menggeliatnya kembali bisnis media seiring rezim politik otoritarian runtuh, *Bakrie & Brothers* membuka divisi baru (i.e. divisi media) di bawah bendera Visi Media Asia (Viva), yang merupakan perusahaan induk yang mengintegrasikan organisasi bisnis media di bawah kelompok usaha *Bakrie & Brothers*. Viva menaungi dua stasiun televisi nasional dan portal berita *Vivanews*.[3]

Anindya Bakrie, putra sulung Aburizal Bakrie dan Tatty Murnifitriati Bakrie, presiden direktur sekaligus CEO Visi Media Asia, merupakan figur penting dalam Viva. Anindya yang bekerja di *Bakrie & Brothers* sejak 1997 itu memiliki posisi di pelbagai unit usaha perusahaan keluarga tersebut. Anindya merupakan Direktur Utama Bakrie Telecom (operator CDMA *Esia*). Bersama teman kuliahnya di Stanford Graduate School of Business, California, Anindya mendirikan Capital Manager Asia Pte. Ltd., Singapura, dan menjabat sebagai *chief operating officer*. Anindya juga aktif sebagai *chairman* Bakrie Untuk Negeri, *vice president* Telekomunikasi, Teknologi Informasi dan Media, Kadin Indonesia (2008-2013), dan anggota *board of advisor* Asia Pasific Media Forum (2003-sekarang). Perjumpaan Anindya dengan bisnis media dimulai sejak 2002 ketika menjabat presiden direktur dan CEO di Cakrawala Andalas Televisi *(Anteve)* hingga 2009. Untuk membenahi divisi pemberitaan *Anteve*, Anindya merekrut Karni Ilyas, orang nomor satu di *Liputan 6*, *SCTV*. Karni diangkat sebagai direktur pemberitaan. Setelah mengganti sebagian lini menengah redaksi, kualitas berita *Anteve* membaik, sementara itu untuk pembenahan program hiburan, manajemen mengadopsi program *StarTV*.

---

[3] Selain itu, Bakrie & Brothers juga memiliki andil di sejumlah media di Surabaya, seperti ArekTV dan Harian Surabaya Post. ArekTV merupakan televisi lokal Surabaya, berdiri sejak 1 Januari 2005. Jangkauan siarnya melingkupi Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Bangkalan, Lamongan, Gresik, Mojokerto. ArekTV disiarkan melalui frekuensi 48 UHF. Surabaya Post adalah surat kabar yang didirikan oleh keluarga Azis yang kolaps sejak kematian Toeti Azis.

Selain *Anteve*, Viva juga mengelola ”tivi merah” setelah melalui transaksi pada level elite bisnis. Pada 9 Agustus 2002, pengusaha dan mantan Menteri Tenaga Kerja, Abdul Latief mendirikan *Lativi*. Pada 2006, Capital Managers Asia (CMA), perusahaan investasi milik *Bakrie & Brothers* — pemilik 80 persen saham *Anteve* — menalangi lebih dari Rp 200 miliar sebagian hutang Latief pada Bank Mandiri (total hutang Latief mencapai Rp 450 miliar). Latief terjungkal dalam kepemilikan saham *Lativi* pada 2007 ketika Anindya bersama dengan Erick Thohir (Direktur Utama Harian *Republika*) dan Rosan P. Roslani (kini Direktur Utama Berau Coal Energy, anak perusahaan *Bakrie & Brothers*) sepakat berkongsi membeli *Lativi* untuk mendirikan tivi merah. *Lativi* pun bersalin nama menjadi ”tivi merah” tepat pada 14 Februari 2008, dan menjadi stasiun televisi pertama yang diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari Istana Presiden. Anindya menjabat sebagai Presiden Komisaris dan *Chairman,* sementara Erick Thohir menjabat sebagai Direktur Utama. Pada awalnya, Viva memiliki 49% saham tivi merah, diikuti Redal Semesta dengan saham sebesar 31%, dan 20% saham sisa dimiliki investor asing. Pada Maret 2008, Viva membeli 10% saham Good Response dan 10% saham Promise Result. Dengan demikian, Viva memegang 69% andil tivi merah, sementara Redal Semesta memegang sisanya (31%).

Posisi tivi merah dalam kasus Lapindo cukup rumit karena afiliasinya dengan Lapindo Brantas Inc., perusahaan yang dituduh publik sebagai penyebab insiden lumpur di Sidoarjo; tivi merah dan Lapindo Brantas berada dalam payung konglomerasi yang sama, *Bakrie & Brothers*.

Karakter Agensi ”Tivi Merah” di Tengah Bencana Lumpur

Selama ini analisis bingkai *(frame analysis)* cenderung melihat pada apa yang (sudah) menjadi berita, baru kemudian analisis bergerak pada ranah hipotetik kritis untuk menjawab mengapa fakta-fakta tersebut ditayangkan dan bagaimana fakta-fakta tersebut dibingkai sedemikian rupa. Proses menjadi non-berita tidak selalu lebih singkat daripada proses menjadi berita. Proses eksklusi bisa saja terjadi di tatanan sangat awal, yaitu proses perencanaan berita. Pada tahapan ini, jelas proses menjadi

non-berita akan singkat karena pada tahapan selanjutnya (penggalian data, produksi, dan siaran) para agensi tidak perlu repot-repot untuk mengelola ”sumber daya” dan melirik ulang pada ”aturan” yang berlaku. Akan tetapi, rupanya unsur *magnitude* inheren dalam insiden lumpur panas di Sidoarjo yang membuat setiap media di Indonesia, termasuk tivi merah, untuk mengabaikan fenonema yang tidak biasa ini.

Karakter para jurnalis di tivi merah cukup unik. Sebagai stasiun televisi yang relatif baru, namun harus menyajikan berita berkualitas, komposisi jurnalis di tivi merah disusun oleh individu-individu yang pernah bekerja di organisasi media yang lain, baik media cetak maupun elektronik. Para jurnalis itu belum tentu berasal dari satu organisasi media yang sama. Tentu, latar belakang semacam ini membawa sebuah problem baru bagi budaya organisasi di tivi merah karena di dalam masing-masing jurnalis, sadar atau tidak, terbiasa dengan aturan dari organisasi media sebelum masuk ke tivi merah. Sangat mungkin bila aturan itu terbawa dalam iklim kerja di tivi merah. Akan tetapi, tak jarang justru aturan dari organisasi sebelumnya itulah yang menjadi sumber daya yang khas sehingga pihak manajemen tivi merah sengaja merekrut orang-orang itu. Proses rekrutmen Karni Ilyas oleh Viva merupakan salah satu buktinya. Karni memiliki sumber daya yang cukup kuat akibat dia dianggap sukses dalam membentuk dan dibentuk oleh aturan jurnalistik televisi *Liputan 6, SCTV*. Viva pun memberi Karni otoritas untuk melakukan strukturasi terhadap dua stasiun televisi yang dikelolanya, salah satunya adalah tivi merah. Namun Karni bukanlah satu-satunya *agensi* yang melakukan strukturasi di tivi merah karena tivi merah terdiri dari ratusan jurnalis yang memiliki sumber daya beragam dan dibentuk oleh aturan-aturan yang bisa jadi saling bertentangan satu sama lain. Mulai level reporter di Sidoarjo, perwakilan di Surabaya, sampai produser dan pemimpin redaksi di Jakarta diisi oleh individu-individu yang memiliki sumber daya di atas rata-rata jurnalis kebanyakan.[4] Yang perlu kita ingat, jurnalis tivi merah bukanlah sekelompok individu yang pasif, melainkan agensi yang aktif untuk bermain-main *dalam* dan *dengan* struktur yang ada.

---

[4] Data dalam bagian ini disusun dari hasil wawancara dan pengamatan terhadap beberapa jurnalis di tivi merah. Demi alasan etika, nama informan sengaja ditiadakan.

Sekalipun berasal dari latar belakang pendidikan yang tidak selalu jurnalistik, namun para jurnalis tivi merah jelas adalah individu yang terlibat di dunia media sejak sebelum mereka masuk di tivi merah. Seorang jurnalis menyatakan bahwa profesi jurnalis dipilihnya karena cara berpikir kritis yang inheren dalam profesi tersebut. Baginya, jurnalis merupakan profesi luar biasa yang bisa didayagunakan untuk menghancurkan tirani kekuasaan. Ada jurnalis lain yang menyatakan bahwa menjadi jurnalis adalah ”sebuah kecelakaan” karena setelah lulus kuliah dia hanya memiliki keterampilan fotografi yang bisa dijualnya untuk bekerja, sehingga masuk ke dunia televisi merupakan sebuah kecelakaan yang lain lagi akibat ”gambar diam” yang dihasilkannya kurang diapresiasi oleh media-media yang lain, beralih menekuni ”gambar gerak” merupakan pilihan rasional baginya karena pada waktu itu masih langka yang terampil dengan gambar gerak. Dari dua kelompok jurnalis tersebut, kita mendapatkan dua contoh yang ekstrem. Pada satu sisi, ada jurnalis yang memang memiliki motif kuat dalam memilih profesi sebagai jurnalis. Profesi jurnalis dipilih karena pilihan rasional kritis dan memiliki ambisi untuk memperbaiki kehidupan sosial. Sementara pada sisi lain, ada jurnalis yang masuk menjadi jurnalis karena kecelakaan akibat tidak ada opsi lain baginya untuk menghidupi diri. Variasi ”motivasi menjadi jurnalis” memberikan warna tersendiri bagi karakter dan tentunya dinamika dalam aturan ruang redaksi tivi merah.

Dari hasil pengamatan dan wawancara, para jurnalis tivi merah kebanyakan membangun identitas profesi sebagai jurnalis dari pengalaman bekerja di media lain, sebelum masuk ke tivi merah. Bahkan, identitas itu diperoleh dari pengalaman mereka bekerja di beberapa media. Oleh karena itu, menjadi wajar ketika gambaran ”jurnalis ideal” bagi para jurnalis di tivi merah pun variatif. Merupakan sesuatu yang manusiawi ketika ada jurnalis tivi merah yang bekerja semata atas motif pragmatis ekonomis, namun sebenarnya bimbang, bahkan mungkin antipati ketika menghadapi intrik-intrik internal organisasi. Ada juga kelompok jurnalis yang bekerja demi kepuasan batin menjalani profesi sebagai seorang jurnalis ketika kariernya di tempat kerja sebelumnya ”sudah mentok” dan satu-satunya pilihan yang ada adalah pindah ke tivi merah, yang menawarkan tanggung jawab lebih besar. Selain itu, terdapat kelompok kecil jurnalis yang secara

ekonomi sudah mapan, tanpa harus bekerja sebagai jurnalis. Satu-satunya alasan rasional mereka terikat dengan tivi merah adalah mengangkat status sosial di lingkungan sosialnya dengan "jaket jurnalis" yang dimilikinya. Pada titik ini, jenis keterikatan para jurnalis tivi merah ternyata cukup beragam menurut motivasi memilih profesi jurnalis dan alasan berlabuh di tivi merah. Dalam situasi semacam ini, bagaimana para jurnalis tivi merah memperlakukan kasus Lapindo?

Kasus Lapindo rupanya bukan satu-satunya berita yang melibatkan pertentangan kepentingan tingkat tinggi di tivi merah. Pertarungan kepentingan sejenis juga terjadi dalam pemberitaan "kasus Bank Century" yang melibatkan salah satu petinggi tivi merah, Erick Thohir. Setelah melalui proses perencanaan, penggalian data, konfirmasi ke pelbagai pihak, dan produksi, berita yang sudah dianggap "aman untuk diangkat" (produk dari para jurnalis bersumber daya tinggi) harus *mandeg* pada detik-detik terakhir penayangannya setelah melalui "pembicaraan dengan atasan." Mungkin seperti yang terjadi di kebanyakan media, aturan tentang batasan mana yang boleh tayang dan mana yang tidak boleh tayang, apalagi jika bersentuhan dengan pemilik media, sering tidak pernah jelas hitam di atas putihnya. Proses pengambilan keputusan final itu kebanyakan dilakukan secara lisan dan informal daripada secara tertulis dan formal dalam rapat redaksi. Proses sensor internal semacam ini terjadi untuk pemberitaan tentang kasus Lapindo di tivi merah.

Secara tertulis dan lisan-formal tidak pernah ada perintah yang "melarang" jurnalis tivi merah untuk meliput kasus Lapindo. Namun, secara hegemonik, para jurnalis tivi merah berada dalam suatu kesadaran kolektif yang serupa bahwa Bakrie sedang berusaha untuk membersihkan nama baiknya dan memperbaiki segala kerusakan yang ditimbulkan oleh Lapindo menggunakan unit usaha medianya, dan tivi merah sebagai salah satu unit usaha *Bakrie & Brothers* merupakan bagian dari usaha tersebut. Oleh karena itu, muncul kesadaran kolektif bahwa pemberitaan tentang lumpur yang boleh muncul di tivi merah adalah tentu saja berita-berita yang menguntungkan Bakrie dan Lapindo. Sementara itu, berita tentang, misalnya, demonstrasi warga menuntut Bakrie, walaupun juga direkam dan dikirim, kemungkinan tayang akan sangat jarang. Dari sebab itu,

dibandingkan yang terjadi di media lain yang tidak punya afiliasi dengan Lapindo, dalam pemberitaan kasus Lapindo, menjadi jurnalis di tivi merah merupakan posisi yang paling dilematis. Pada satu sisi, "integritas" mereka sebagai jurnalis profesional yang berperan sebagai penyambung lidah dengan memberitakan informasi yang dibutuhkan publik secara akurat dan berimbang sedang diuji betul. Sementara itu, pada sisi lain, "loyalitas" mereka sebagai karyawan tivi merah yang merupakan salah satu unit usaha *Bakrie & Brothers*, yang berusaha membersihkan nama baiknya, juga sedang diuji. Bagaimanapun juga setiap karyawan, termasuk jurnalis, "berperan sebagai *public relations*" bagi perusahaan tempatnya bekerja.

Bagaimanapun juga, para jurnalis tivi merah bukanlah individu yang pasif dan tunduk begitu saja demi loyalitas pada perusahaan. Atas nama profesi jurnalis, mereka tetap memproduksi berita yang menurutnya punya nilai berita tinggi, termasuk berita tentang Lapindo. Mereka tetap memproduksi berita sesuai dengan kapasitas dan tanggung jawab masing-masing; entah berita itu ditayangkan atau tidak ditayangkan, itu merupakan otoritas penuh produser di Jakarta. Tidak ada aturan tertulis tentang mana yang layak tayang atau tidak, namun para jurnalis menyadari bahwa atasannya memiliki "penilaiannya sendiri", yang terkadang berbeda dengan penilaian mereka. Ketika berita sudah disusun baik, pihak produser memiliki otoritas untuk mengubah berita tersebut, mengganti naskah, bahkan mengubah sudut *(angle)* berita tanpa perlu konfirmasi terlebih dahulu pada reporter di lapangan.[5] Kondisi ini bertolak belakang saat produser memberi perintah pada jurnalis untuk membuat "liputan dewa", sebuah istilah untuk mengidentifikasi penugasan istimewa, yaitu penggalian informasi untuk kepentingan pemilik modal. Untuk membuatnya, produser sudah menentukan peristiwa yang diliput dan *angle* yang dibutuhkan demi mendukung bingkai liputan dewa. Dalam konteks kasus Lapindo, biasanya yang muncul adalah tayangan yang kebanyakan menonjolkan dan menguntungkan nama keluarga Bakrie. Ruang untuk membuat berita kritis terhadap Lapindo dan Bakrie yang

[5] "Aturan" seperti itu tidak hanya berlaku pada berita tentang Lapindo, tapi berlaku untuk semua berita, khususnya berita "dari daerah".

tertutup rapat, sekalipun ada kesadaran kolektif bahwa hal semacam itu adalah percuma, akibatnya berita kritis atas Lapindo tetap diproduksi, diproses, dan dikirim seperti biasa, lalu dikirim ke meja produser. Namun, sekali lagi, berdasarkan aturan (tidak tertulis) yang berlaku, keputusan suatu berita tayang atau tidak dilimpahkan sepenuhnya pada tangan para produser di kantor Jakarta.

Situasi ini jamak dijumpai di setiap organisasi media, yang sekaligus memiliki fungsi sosial dan fungsi ekonomis. Tarik-ulur antara fungsi sosial dan fungsi ekonomis merupakan ”dualitas” yang harus dihadapi jurnalis. Apakah seorang jurnalis lebih memilih menjalankan fungsi sosial (sebagai pilar demokrasi)? Ataukah dia lebih condong untuk mengutamakan fungsi ekonomis (sebagai akumulator kapital)? Dalam konteks kasus Lapindo sebenarnya ada beberapa jurnalis – dari level reporter sampai produser di tivi merah – yang cukup punya sumber daya untuk tetap memproduksi berita kritis atas kasus Lapindo, namun sayang aturan di tivi merah telah menonberitakan tayangan semacam itu. Berita tentang Lapindo adalah berita yang ”selalu diawasi” oleh petinggi di kantor tivi merah di Jakarta. Akibatnya, apa pun yang terjadi di Sidoarjo terkait dengan insiden lumpur tersebut, para petinggi tivi merah akan mengambil keputusannya sendiri untuk mengamankan pemilik modal tivi merah, yang menjadi sorotan dalam insiden tersebut.

Jejak Lapindo di Layar ”Tivi Merah”

Insiden lumpur di Sidoarjo jelas bukan bencana biasa. Posisi Aburizal Bakrie, yang ketika semburan awal terjadi berdiri di atas dua kaki yang berbeda: kaki pertama di pemerintahan (sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat) dan kaki kedua di perusahaan (sebagai pemilik *Bakrie & Brothers*), mengubah insiden lumpur di Sidoarjo sekaligus menjadi ”kasus Lapindo”. Posisi tivi merah menjadi lebih kompleks jika dibandingkan media lain karena media satu ini, dan artinya semua jurnalisnya berada di bawah bendera *Bakrie & Brothers*. Akan tetapi, di luar faktor politik dan Aburizal, bencana lumpur panas di Sidoarjo jelas sebuah realitas dengan tingkat layak berita tinggi. Buktinya, sekalipun beritanya

dibingkai agar membela korporasinya, lumpur tetap muncul di layar kaca tivi merah. Pada 29 Mei 2010, misalnya, tivi merah menayangkan ”paket berita” berjudul ”Empat Tahun Semburan Belum Juga Terhenti” dalam rangka memperingati empat tahun semburan lumpur panas.

Paket berita adalah berita televisi yang mencakup wawancara, visual, dan narasi reporter dalam satu kemasan (Tuggle et al., 2001: 137; bdk. Gamson & Modigliani, 1989). Pada hari itu, paket berita ”Empat Tahun Semburan” ditayangkan dua kali dalam satu hari itu: pada sesi siang, antara 12.00-13.00 WIB, dan sesi petang, antara 17.30-19.00 WIB, tanpa proses editing. Pada siang hari, paket berita tersebut disiarkan setelah presenter tivi merah di studio pusat membacakan *lead* dan *intro*. Sedangkan pada petang hari, berita itu diberi pengantar oleh presenter dari biro Surabaya. Sesi tersebut merupakan sesi laporan langsung dari tiga biro (Surabaya, Makasar, dan Medan) yang menjadi ciri khas sesi petang dari tivi merah. Selain teknis penyajian paket berita yang disesuaikan dengan karakter program (siang dan petang), tidak muncul perbedaan lainnya. Berita yang ditayangkan tetap merupakan ”paket berita” yang identik, berdurasi 2 menit 17 detik. Materi berita, urutan visual, dan suara narator persis sama. Artinya, setelah melalui jeda sekitar lima jam (dari siang sampai petang) tidak terdapat penambahan informasi baru tentang kondisi teraktual semburan lumpur di Porong. Sebagai televisi berita, hal semacam ini adalah aneh karena haram hukumnya bagi sebuah televisi berita untuk menayangkan kembali materi yang sudah tayang sebelumnya tanpa tambahan informasi apa pun. Rupanya, *tagline* ”terdepan mengabarkan” tidak berlaku dalam kasus paket berita ”Empat Tahun Semburan”.

”Empat Tahun Semburan” dibuka dengan visual *establishing shot* kolam penampungan lumpur di Sidoarjo. Teknik yang dipilih untuk membuka berita adalah VLS *(very long shot).* Pilihan *establishing shot* sebagai pembuka adalah umum, yaitu untuk memberi gambaran pada pemirsa tentang situasi umum. Namun, *establishing shot* yang dipilih bukanlah *high profile* atau *eye catching* yang lebih berpotensi segera memikat penonton untuk terus menonton keseluruhan berita. Visual pembuka yang disajikan tidak memunculkan aktivitas apa pun, padahal karakter utama visual televisi bukanlah ”gambar mati”, melainkan ”gambar gerak”, setiap

visual mensyaratkan adanya aktivitas (Lury, 2005: 7; Thompson, 2000: 70). Sebagian besar jurnalis televisi yakin bahwa pemirsa harus segera dipikat dengan visual awal yang menarik perhatian, tema besar tentang keseluruhan berita harus sudah tampak pada visual pembuka berita.

Setiap berita, apa pun jenis kemasannya, mengandung ”tema berita” yang dimunculkan dalam bentuk visual OTS *(over the shoulder)* untuk menambah informasi dan memberi makna pada berita yang akan dihadirkan (Tuggle et al., 2001: 151). Tema yang diangkat dalam paket berita ”Empat Tahun Semburan” adalah ”Lumpur Sidoarjo”, seperti tertulis jelas dalam visual.[6] Tema berita itu muncul pada awal berita ketika presenter membaca pembuka berita:

> Pemirsa, hari ini tepat empat tahun peristiwa semburan lumpur di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Hingga kini, semburan lumpur belum juga terhenti. Sementara itu, PT Minarak Lapindo Jaya telah menuntaskan sejumlah pembangunan rumah tinggal baru bagi warga yang terdampak semburan lumpur.

Dari pembuka berita semacam ini terdapat usaha eksklusi ”Lapindo Brantas” di ruang publik dan menggantinya dengan ”Minarak Lapindo Jaya”. Dua entitas tersebut jelas berbeda. Lapindo Brantas adalah perusahaan yang bergerak dalam industri eksplorasi minyak dan gas alam, yang dituduh sebagai penyebab dari insiden itu. Sementara itu, Minarak Lapindo Jaya adalah perusahaan yang dibentuk belakangan pasca insiden lumpur, yang berfungsi untuk membeli tanah dan bangunan warga yang terendam lumpur sesuai Perpres No. 14 Tahun 2007. Penekanan pada Minarak Lapindo Jaya jelas sebuah usaha pembingkaian pada usaha yang

---

[6] Istilah ”lumpur Sidoarjo” juga digunakan secara konsisten dalam naskah berita yang merujuk pada bencana lumpur panas di Sidoarjo. Tentang penggunaan terminologi ”lumpur Sidoarjo”, Karni Ilyas, Direktur Pemberitaan tivi merah pernah menyatakan alasannya ketika masih menjadi Pemimpin Redaksi Anteve pada 2007 (dlm. Ambarwati, 2007). Menurutnya, nama bencana itu seharusnya diatribusikan pada wilayah, bukan perusahaan. Dia mencontohkan nama beberapa bencana seperti: Tragedi Bhopal, Chernobyl, dan Buyat. (Tentu saja ada bencana industri yang merujuk pada nama perusahaan, seperti: Exxon Valdez.) Penggunaan istilah ”lumpur Sidoarjo”, menurut Karni, bukan atas perintah pemilik tivi merah, namun, lanjutnya, penggunaan kata ”lumpur Lapindo” berarti melimpahkan tanggung jawab penuh akibat insiden lumpur itu pada Lapindo, dengan kata lain: Bakrie & Brothers.

sudah dilakukan, ”respons”, bukan pada ”penyebab” semburan — ketika menyebut Lapindo Brantas. Usaha untuk menggeser wacana dari penyebab menuju respons juga tampak dalam narasi berita yang menyoroti dua hal, yaitu tentang upaya Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) yang belum berhasil menutup semburan, dan tentang upaya yang dilakukan oleh Minarak Lapindo Jaya, yaitu membangun rumah bagi warga terdampak lumpur, berikut kutipan narasi berita:

> Empat tahun sudah bencana lumpur di Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur ini berlangsung. Berbagai upaya telah dilaksanakan Badan Pelaksana Penanggulangan Lumpur Sidoarjo atau BPPLS, namun semburan belum juga terhenti. Sejumlah rumah bagi warga terdampak lumpur tuntas dibangun oleh PT Minarak Lapindo Jaya.

Struktur berita masuk pada wawancara dengan salah seorang ”warga terdampak Lumpur Sidoarjo”, Rina. Pemilihan narasumber representasi korban dalam paket berita ini pun menarik karena kehadiran Rina otomatis mengeksklusi setidaknya dua kelompok warga lain, yaitu kelompok warga yang masih belum mendapatkan pembayaran kompensasi secara lunas dan kelompok warga di sembilan desa lain yang belum ”masuk peta”. Pendapat dari dua kelompok warga tersebut dieliminasi dengan petikan wawancara dengan Rina yang seakan berterima kasih pada Lapindo yang telah menyelamatkannya dari kondisi ketidakpastian tanpa rumah dengan akhirnya mendapatkan rumah di KNV.

- Saya sudah hampir dua tahun.

+ Dua tahun, Bu? Bu, perasaannya tinggal di sini gimana Bu?

- Senang sekali. Apalagi selama beberapa tahun kita, dua tahun kita mengembara ke mana-mana karena *nggak* ada rumah. Setelah itu langsung ada rumah yang seperti ini. *Kan* bukan main *gitu loh*. Seperti yang *nggak* pernah dibayangkan. Kita *nggak* pernah bayangin punya rumah di sini, ternyata sangat istimewa.

Visual Rina mengikuti VLS perumahan Kahuripan Nirwana Village (KNV).[7] VLS ini merupakan pengantar dari narasi keberhasilan Minarak Lapindo Jaya[8] yang telah mengelola perumahan baru bagi korban lumpur. Tidak ada variasi visual lain, bahkan untuk *detail shot* tentang kondisi fisik unit rumah di KNV yang membuat pemirsa dapat melihat langsung keberhasilan selain yang disampaikan dalam narasi. Visual KNV itu diberi teks: ”Sejumlah rumah bagi terdampak lumpur tuntas dibangun oleh PT Minarak Lapindo Jaya.”

Berita kemudian bergeser pada visual kolam dan tanggul lumpur dengan narasi sebagai berikut:

> Sejak dua tahun lalu PT Minarak telah menyerahkan rumah kepada warga. Dari 13.000 berkas warga terdampak lumpur, 7.000 di antaranya telah dirampungkan.

Rupanya, pemirsa dibingkai pada usaha yang telah dilakukan Minarak dan capaiannya. Berita bergeser lagi pada kemunculan kutipan wawancara dengan Andi Darussalam Tabusala, yang ditulis sebagai ”Direktur PT Minarak Lapindo Jaya”, sebagai berikut:

> Kita memperingati masalah lumpur di Sidoarjo ini selalu kita menundukkan kepala, melihat suatu keprihatinan terhadap warga korban terdampak. Sungguh pun demikian di dalam proses empat tahun Minarak Lapindo Jaya diberikan kuasa oleh Lapindo Brantas untuk menyelesaikan permasalahan lumpur di Sidoarjo sesuai dengan amanah Perpres No. 14 Tahun 2007 itu tetap kita jalankan. Walaupun, sungguh pun, di sana-sini ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Minarak,

---

[7] Kahuripan Nirvana Village (KNV) adalah kawasan perumahan modern yang merupakan salah satu unit usaha properti Bakrie & Brothers dalam bendera Bakrielands. Dalam proses jual-beli tanah dan bangunan yang terendam lumpur sesuai peta area terdampak 22 Maret 2007 (Perpres No. 14 Tahun 2007), Lapindo hanya menerima sertifikat tanah (hak milik atau hak guna) dari BPN, dan menolak surat Letter C dan Pethok D. Bagi warga yang tidak memiliki sertifikat tanah semacam itu, Lapindo menawarkan skema relokasi, cash-and-resettlement, ke KNV. Logika dari skema ini adalah ”barter” nilai jual tanah dan bangunan warga yang terendam lumpur dengan nilai jual tanah dan bangunan di KNV.

[8] Minarak Lapindo Jaya adalah perusahaan yang didirikan khusus untuk mengurusi jual-beli tanah dan bangunan warga yang terendam lumpur sesuai Perpres No. 14 Tahun 2007. Dari dokumen transaksi jual-beli yang ada, tertulis bahwa warga sebagai penjual dan Minarak Lapindo Jaya (bukan Lapindo Brantas) sebagai pembeli.

> terutama masalah keuangan yang beberapa kali terjadi fluktuasi terhadap pendanaan yang kami dapatkan sampai saat sekarang.

Bingkai yang ingin disampaikan adalah bahwa dalam perjalanan mencapai itu semua, Minarak Lapindo Jaya harus menghadapi kondisi keuangan yang sulit. Paket berita ”Empat Tahun Semburan” ditutup dengan narasi tentang penyebab semburan, seperti mudah ditebak sebelumnya, yang menyalahkan gempa bumi, dan bingkai status peristiwa itu sebagai ”bencana (alam)”.

> Semburan lumpur terjadi empat tahun lalu setelah gempa mengguncang Yogyakarta dan sebagian wilayah di Pulau Jawa. Kasus ini telah diproses secara hukum, gugatan perdata dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia ditolak hingga kasasi karena dianggap sebagai bencana.

Status insiden lumpur di Sidoarjo sebagai ”bencana alam”, rupanya, sangat penting bagi tivi merah. Jauh-jauh sebelumnya, pada malam 25 September 2009, tivi merah menayangkan *talk show* satu jam (21.00-22.00 WIB) dengan tema suasana politik menjelang Musyawarah Nasional Partai Golkar yang akan berlangsung di Riau, Pekan Baru, 5-7 Oktober 2009,[9] dengan menghadirkan presenter Tina Talisa dan sebagai narasumber Yorrys Raweyai, Ketua DPP Partai Golkar, langsung dari Wisma Nusantara, Jakarta. Di sela-sela perbincangan selama satu jam tersebut, pada segmen kedua (21.25-21.36 WIB) terdapat satu paket berita bertajuk ”Korban Lumpur Sidoarjo Hidup Layak”. Paket berita itu merupakan liputan tentang sebuah agenda yang ditulis di layar tivi merah: ”Kunjungan Kenegaraan SBY *(sic)* – JK ke perumahan Kahuripan Nirvana Village, Sidoarjo, Jawa Timur”. Dalam paket berita tersebut Andi Darussalam Tabusala mendapatkan ruang cukup panjang ketika menekankan bahwa insiden lumpur di Sidoarjo adalah ”bencana alam”. Andi Darussalam, yang kali ini ditulis sebagai ”Vice Presiden *(sic)* Minarak Lapindo Jaya”, mengatakan:

---

[9] Dalam Musyawarah Nasional (Munas) di Riau tersebut, Aburizal Bakrie terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golongan Karya.

> Ini adalah sebuah proses sejarah. Kita telah melalui proses hukum yang jelas. Seluruh LSM di Indonesia ini mengatakan demikian (kesalahan Lapindo), tapi hukum telah mengatakan ”Bakrie tidak bersalah”. Tetapi keluarga besar Bakrie mengatakan, ”Kami tetap, apa yang telah menjadi kesepakatan di dalam Perpres 14 itu kami akan jalankan.”

Sebelum pernyataan Andi Darussalam tersebut, paket berita menghadirkan pernyataan dari Emha Ainun Najib, yang ditulis sebagai ”budayawan”, sebagai narasumber yang menjelaskan tentang pemberian ”sedekah” dari keluarga Bakrie kepada warga terdampak lumpur.

> Yang sudah dibayarkan sekarang keseluruhan dicicil 15 juta per bulan dan seterusnya itu sudah 6,2 triliun. Dan kira-kira akan sampai 8,9 triliun. Dan itu posisinya *shodaqoh sebenernya*. Posisinya *infak*.

Mengiringi pernyataan Emha dan Andi Darussalam, paket berita menghadirkan beberapa penggalan kalimat dari penghuni Kahuripan Nirvana Village, yang intinya berterima kasih karena telah *diberi* kehidupan yang lebih baik daripada sebelumnya. Program kembali ke Jakarta, menghadirkan perbincangan dengan narasumber awal.

Dalam perbincangan tersebut, pembawa acara berusaha mengarahkan pembicaraan yang menghubungkan bahwa bencana lumpur di Sidoarjo yang dijadikan kampanye negatif bagi Aburizal Bakrie, yang juga mencalonkan diri sebagai ketua umum Partai Golkar. Dalam menyusun pertanyaannya, pembawa acara sempat keseleo lidah dengan mengatakan ”isu Lapindo” yang kemudian secara spontan langsung meralat menjadi ”lumpur Sidoarjo”, dan menggunakannya secara konsisten sampai akhir.

> *Ngomong-ngomong* pencerahan, kemudian isu Lapindo ini *eee* ... didekatkan, Lumpur Sidoarjo, kepada salah satu kandidat Aburizal Bakrie sebagai salah satu kampanye negatif.

Sang narasumber sendiri, berulang kali menggunakan frase ”lumpur Lapindo” bukan lumpur Sidoarjo dalam usahanya menekankan bahwa uang yang digunakan untuk membayar tanah dan bangunan di Sidoarjo adalah uang pribadi dari keluarga Bakrie, bukan uang perusahaan.

Sementara itu, menurut narasumber, status hukum Lapindo sudah *inkrah*[10]: perusahaan itu tidak bersalah. Bencana ini adalah karena *force majeure*, dengan tambahan bahwa hal serupa sudah menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi dan Mabes Polri. Menutup segmen kedua *talk show*, tivi merah menghadirkan wawancara langsung dari Biro Surabaya dengan Bambang Sukri, perwakilan korban lumpur dari Gabungan Korban Lumpur Lapindo (GKLL), kelompok terbesar dari warga terdampak yang sebagian besar memilih untuk tinggal di KNV. Dalam kesempatan itu, narasumber menyampaikan bahwa keluarga Bakrie memiliki tanggung jawab yang besar dan memiliki komitmen terhadap korban lumpur. Segmen ditutup dengan sebuah pernyataan bahwa kelompok-kelompok ”yang lain” — yang tidak puas dengan keluarga Bakrie — jumlahnya tidak sampai 5%.

Segmen ketiga (21.38—21.47 WIB) juga masih menghadirkan wawancara dengan korban lain, Pujiono, dari Biro Surabaya. Narasumber ini mengatakan bahwa kendala yang dialami oleh para korban bukan berasal dari Minarak Lapindo, tetapi dari birokrasi (pemerintah). Narasumber menyampaikan dulunya dia berada dalam kelompok yang menentang Lapindo, tetapi kemudian setelah mengalami pelbagai proses administrasi dia mengatakan bahwa permasalahan justru di birokrasi, bukan pada Lapindo. Dialog kembali bergeser dengan narasumber di Jakarta untuk memberi penafsiran bahwa ”suara” sekelompok kecil korban yang tidak puas dengan Lapindo telah dipolitisasi oleh LSM, pengamat politik, dan juga sesama kader Golkar dengan cara yang tidak etis. Bahkan, usaha untuk mengangkat isu Lapindo menjelang Munas Partai Golkar oleh ”kandidat lain”[11], menurut narasumber, tidak menguntungkan bagi Partai Golkar sendiri, namun usaha tersebut tidak akan berpengaruh bagi kemenangan Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum pada Munas Partai Golkar tersebut.

---

[10] Dalam dunia hukum di Indonesia terdapat istilah ”inkrah” yang berarti sudah berkekuatan hukum tetap atau pasti. Jadi, ketika hakim sudah memutuskan dalam pengadilan, dan tidak ada yang banding, statusnya sudah ”inkrah”. Berasal dari bahasa Belanda ”in krach” yang secara lugas berarti ”berlaku tetap”.

[11] Di sini baik narasumber dan presenter tidak menyebut nama, mereka hanya menggunakan istilah ”kandidat lain”. Namun jelas yang dimaksudkan dengan kandidat lain adalah Surya Paloh, yang juga pemilik ”tivi biru”. Jadi talk show ini merupakan pertarungan antara ”tivi biru” vs. ”tivi merah”, yang pemilik dari keduanya kala itu sedang bersaing untuk merebut posisi Ketua Umum Partai Golongan Karya dalam Musyawarah Nasional di Riau, 5-7 Oktober 2009.

Penghujung segmen ketiga ditutup dengan wawancara langsung dengan Andi Darussalam Tabusala, kali ini ditulis sebagai ”juru bicara PT Minarak Lapindo”, dari Biro Makasar tentang penyelesaian pembayaran pada warga terdampak, yang menurutnya akan selesai pada awal 2012. Menurut narasumber ini, komitmen dari keluarga Bakrie untuk membayarkan pada warga ditunjukkan ketika Nirwan Bakrie berjumpa dengan Emha Ainun Najib, yang memfasilitasi warga dan Lapindo untuk mencapai titik temu.

Rupanya, dua segmen dalam *talk show* tersebut belum cukup untuk menormalisasikan isu Lapindo menjelang Munas Partai Golkar. Segmen terakhir (21.50—22.00 WIB) dibuka oleh wawancara dengan Andi Darussalam, yang menjelaskan tentang pelbagai kendala yang dihadapi oleh Minarak dalam ”menyelesaikan berkas”. Disebutkan, dari 12 ribu lebih berkas masih tersisa sekitar 350-an berkas yang belum tuntas karena berkas ini baru dimasukkan oleh BPLS setelah tenggat waktu yang sudah ditentukan oleh Minarak (November 2007). Kesimpulan yang diambil oleh presenter bahwa yang masih bermasalah hanyalah ”jumlah yang kecil” jika dibandingkan dengan korban yang sudah ditangani oleh Minarak.

Baik paket berita ”Empat Tahun Semburan” (29 Mei 2010) dan *talk show* (25 September 2009) merupakan bukti bahwa dalam peristiwa-peristiwa tertentu Lapindo masih meninggalkan jejak di layar tivi merah. Dalam *talk show* menjelang Munas Partai Golkar, misalnya, kasus Lapindo dibingkai sedemikian rupa agar sesuai dengan kepentingan pemilik saham tivi merah dalam rangka memenangi pencalonan Ketua Umum Partai Golkar. Secara jelas, tidak dihadirkan narasumber dari kubu yang berseberangan; suara dari kelompok dalam jumlah kecil itu, meskipun secara faktual ada, telah dieksklusi dari layar tivi merah.

Catatan Penutup

Televisi (dan radio) memiliki karakter berbeda dengan media cetak. Televisi menggunakan ”frekuensi” yang adalah milik publik, dan ketersediaannya sangat terbatas. Merujuk pada Pedoman Perilaku Penyiaran

dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI, 2009), penggunaan frekuensi harus senantiasa ditujukan untuk kemaslahatan rakyat Indonesia, bukan untuk kepentingan dari pemilik modal perusahaan televisi. Namun, KPI sendiri tidak memiliki kewenangan yang bisa memberikan sanksi tegas bagi praktik-praktik yang menyalahgunakan frekuensi untuk kepentingan sekelompok orang saja, khususnya dalam pemberitaan tentang kasus Lapindo. Satu hal yang tidak bisa dimungkiri, ”nilai berita” kasus Lapindo bakal menjadi semakin tinggi justru ketika aspek politis semacam itu masuk di dalamnya. Pencalonan Aburizal menuju kursi RI-1 pada Pemilu Presiden 2014 nanti merupakan faktor yang membuat nilai berita kasus Lapindo tidak akan pernah hilang. Bagi banyak pengamat politik, khususnya lawan politiknya, seperti yang terjadi menjelang pemilihan Ketua Umum Partai Golkar, kasus Lapindo bakal menjadi salah satu amunisi bagi kampanye negatif terhadap Aburizal pada 2014 nanti. Aburizal dan tim sukses di belakangnya, mau tidak mau, tidak bisa tidak, *harus* mengelola jejak Lapindo di media miliknya, termasuk tivi merah, agar tidak menjadi bumerang bagi pencalonannya.

Struktur budaya organisasi media di tivi merah masihlah sangat baru mengingat media ini baru didirikan pada 2008. Bahkan bisa dikatakan belum ada aturan yang paten di tivi merah sebagai televisi berita sekaligus juga unit usaha sebuah konglomerasi bisnis. Dalam situasi semacam ini, para jurnalis tivi merah telah terjebak dalam dualisme: menjadi jurnalis profesional, pada satu sisi, dan pada sisi lain, menjadi karyawan yang loyal. Jurnalis profesional akan menyajikan fakta-fakta yang dianggap penting bagi publik tanpa ada urusan dengan pemilik modal. Sementara itu, karyawan loyal akan cenderung menyajikan fakta yang tidak mengganggu posisi pemilik modal dari media tempatnya bekerja. Rupanya, ”hukum anjing penjaga” *(watchdog)* memang berlaku untuk kasus tivi merah: anjing penjaga hanya akan menggonggong ketika ada ancaman mendekati sang pemiliknya, dan tanpa pernah melihat si pemilik sebagai ancaman.

REFERENSI

——, (2008). ”Lativi Ganti Nama Jadi *TvOne*.” Majalah *Gatra* (13 Februari 2008).

Ambarwatie, T.R., (2007). *Konglomerasi Media dan Keberagaman Berita Media Televisi (Studi Ekonomi Politik Grup Media Nusantara Citra)*, Tesis Master, Departemen Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia.

Arvian, Y. & Aryanto, Y.T., (2006). ”Berujung Pada Dua Dinasti.” Majalah *Tempo* (2 Juli 2006).

Bagus, W., (2008). ”IPO Holding TV One Diundur.” *Seputar Indonesia* (26 Mei 2008).

Gamson, W.A. & Modigliani, A. (1989). ”Media Discourse and Public Opinion on Nuclear Power.” *American Journal of Sociology,* Vol. 95, 1-37.

Giddens, A., (1981). *Central Problems in Social Theory*, London: McMillan.

——, (1984). *The Constitution of Society*, Cambrigde: Polity Press.

Griffin, E.M., (2006). *A First Look At Communication Theory,* Singapore: McGraw-Hill International Edition.

Komisi Penyiaran Indonesia [KPI], (2009). *Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) & Standar Program Siaran (SPS)*.

Lestari, P., (2009). ”Bakrie Telecom Jajaki Oblogasi Global.” *Bisnis Indonesia* (10 Desember 2009).

Lury, K., (2005). *Interpreting Television*. London: Hodder Arnold.

Nugroho, Y., Putri, D.A., & Laksmi, S., (2012). *Mapping the landscape of the media industry in contemporary Indonesia*. Report series: Engaging media, empowering society: assessing media policy and governance in Indonesia through the lens of citizens' rights. Research collaboration of *Centre for Innovation Policy and Governance* and *HIVOS Regional Office Southeast Asia*, funded by Ford Foundation. Jakarta: CIPG and Hivos.

Nursanti, K., (2007). *Media dan Konstruksi Permasalahan Sosial: Suatu Analisis Terhadap Konstruksi Pemberitaan Surat Kabar Nasional Pada Kasus Semburan Lumpur di Sidoarjo*, Tesis Master, Departemen Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia.

Thompson, R. (2000). *Grammar of The Shot* (3rd Ed.), Oxford: Focal Press.

Tuggle, C.A., Carr, F., & Huffman, S., (2001). *Broadcast News Handbook*. Singapore: McGraw-Hill International Editions.

Kasus Lapindo oleh Media Arus Utama[1]

Anton Novenanto

Sebelum 29 Mei 2006 tidak ada yang memperkirakan apa yang bakal terjadi di Porong setelah tanggal itu. Kebocoran gas di tengah sawah Desa Siring berubah menjadi sebuah gunung lumpur. Sekitar 150-200 meter dari titik itu terjadi aktivitas pengeboran oleh Lapindo Brantas di sumur Banjar Panji 1. Sekarang, lumpur telah mengubur lebih dari tujuh desa di Kecamatan Porong, Kecamatan Jabon, dan Kecamatan Tanggulangin. Gunung lumpur ini bukan sekadar fenomena alam yang unik, dia merupakan bencana sosial-ekologis.

Bencana, dalam banyak kasus, tidak hanya telah menghancurkan ruang fisik tempat tinggal masyarakat manusia tetapi juga mempengaruhi ruang sosial karena "bencana menandakan kegagalan suatu masyarakat beradaptasi dengan karakter unik lingkungan alam dan lingkungan sosial dalam suatu cara yang layak (Oliver-Smith, 1996: 303)." Dalam bencana,

[1] Versi asli artikel ini muncul dalam bahasa Inggris ("Lapindo Case by Mainstream Media," Indonesian Journals of Social Sciences, Vol. 1(1), 2010), diindonesiakan dengan beberapa penyesuaian dengan tujuan penerbitan bunga rampai ini dan perkembangan terbaru tentang kasus Lapindo.

masyarakat sedang diuji apakah mereka akan bertahan atau tidak dari bencana. Bencana berpotensi memperkuat solidaritas atau, sebaliknya, memicu konflik dalam masyarakat. Pada beberapa kasus, bencana membongkar selubung yang menyembunyikan problem masyarakat yang belum pernah terungkap sebelumnya. Beberapa masyarakat, bagaimanapun juga, tidak pernah terlatih untuk menangani masalah-masalah tersebut. Gunung lumpur di Sidoarjo, bagaimanapun juga, adalah fenomena luar biasa bukan saja bagi masyarakat Jawa Timur, tetapi juga masyarakat Indonesia secara umum. Fenomena ini menarik perhatian, baik media nasional maupun internasional.

Sejak awal, jelas bahwa semburan tidak akan berhenti dalam tempo yang singkat. Beberapa geolog memperkirakan bahwa semburan akan berlangsung sampai 30 tahun. Terlepas dari fakta bahwa dampak dari gunung lumpur terus membesar dan memburuk hari demi hari, insiden ini mungkin adalah fenomena alam terburuk di dunia. Bencana ini mengancam ribuan keluarga di Porong, mempengaruhi ekonomi Jawa Timur, mengubah rencana pembangunan nasional, dan bahkan membongkar skandal politik tingkat tinggi di pemerintahan. Dalam penelitian sebelumnya, insiden ini telah menarik secara politik karena terdapat perbedaan versi tentang penyebab, sifat bencana, dan solusi yang dibutuhkan untuk memperbaiki situasi. Akbar (2007) berpendapat bahwa bencana yang sesungguhnya dimulai ketika pemerintah pusat berusaha melindungi Lapindo Brantas. Perhatian publik secara mudah terfokus pada posisi ambigu Aburizal Bakrie, yang pada saat itu menjabat Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat. Schiller et al. (2008) menyatakan bahwa usaha dari Lapindo, organisasi pemerintah, dan non-pemerintahan kebanyakan tidak terkoordinasi dan cenderung tidak terfokus, sehingga tidak berhasil memenuhi kebutuhan dasar korban. Masalah ini memicu kondisi lebih buruk bagi para korban. Muhtada (2008) juga menyebutkan kelemahan kelembagaan dalam menangani bencana, dan mengusulkan pendekatan "*whole-of-government*"[2] untuk menyelesaikan masalah yang

[2] Management Advisory Committee (MAC) menyusun konsep whole-of-government pada April 2004 sebagai sebuah respons atas kebutuhan integrasi kebijakan dan koordinasi antar pelbagai badan dalam pemerintahan.

ditimbulkan oleh lumpur. Bab ini memfokuskan perhatian pada proses konstruksi narasi kasus Lapindo oleh media arus utama dan respons warga terdampak terhadap konstruksi tersebut.

Membingkai Bencana

Bencana adalah mengerikan. Namun, mengikuti hukum media "bad news is good news", kisah tentang bencana selalu mendapat perhatian besar dari publik. Ini adalah peluang bagi organisasi media: semakin parah sebuah bencana, semakin banyak berita dibuat. Survei *American Newspaper Publisher Association* pada 1973 menemukan bahwa "kecelakaan dan bencana" dibaca oleh 39% pembaca (dalam Sood et al., 1987). Bencana berada pada peringkat teratas dibandingkan berita politik (25%), sementara itu berita umum dan *human interest* mendapatkan 25% perhatian pembaca. Bencana selalu menguntungkan secara ekonomis bagi industri media karena semakin banyak orang yang ingin tahu tentang bencana, semakin banyak media dikonsumsi. Melaporkan bencana merupakan kesempatan langka untuk menyediakan jasa berharga bagi korban lokal, untuk meningkatkan *rating* siaran dan sirkulasi surat kabar, dan untuk menilai manajemen lembaga pasca-bencana. Imaji-imaji penderitaan memicu emosi bagi penonton. Singkatnya, bencana adalah komoditas bernilai berita tinggi, sebuah *facticity*.

Beberapa penelitian tentang peran media massa dalam bencana alam dan bencana buatan-manusia *(man-made)* menunjukkan permasalahan marjinalisasi suara korban di media. Button (2002) melihat media populer gagal mengartikulasikan suara korban. Keheningan korban bukanlah kebetulan, tetapi dikonstruksikan secara sosial dan politik. Dia menganalisis buku Jonathan Harr, *A Civil Action* (1996), dan sebuah film Disney's Touchstone Pictures yang diadaptasi dari buku itu.[3] Buku dan

---

MAC mendefinisikan whole-of-government sebagai "agensi layanan publik bekerja melampaui batas-batas portofolio untuk mencapai tujuan bersama dan sebuah respons intergratif pemerintahan terhadap isu-isu khusus". Konsep ini serupa dengan perhatian joined groups di Inggris dan horizontalism di Kanada (Muhtada, 2008).

[3] Film A Civil Action dirilis di Amerika pada 27 Desember 1998. Film itu disutradarai oleh Steven Zailian dengan bintang utama John Travolta.

film itu berbicara tentang pencemaran air bawah tanah, yang dipercaya menyebabkan kematian beberapa anak di Woburn, sub-urban Boston. Penyebab bencana tetap menjadi perdebatan karena Kementerian Kesehatan Publik berpendapat bahwa kejadian leukemia tidak korelatif dengan pencemaran air bawah tanah. Kasus itu dibawa ke pengadilan, tetapi tuntutan ditolak, dan pada 1990 Mahkamah Agung Amerika Serikat menolak kasus tersebut.

Eliminasi suara korban juga terjadi dalam pemberitaan kasus Exxon Valdez, kebocoran minyak di Alaska. Dalam liputan dua minggu pertama, media gagal memunculkan pengalaman dan kontribusi dari penduduk Alaska dalam berita mereka (Daley & O'Neill, 1991 dalam Widener & Gunter, 2007). Situasi ini berlanjut sampai enam bulan ketika berita media didominasi oleh elite di negara bagian Alaska, pemerintah federal, dan industri minyak (Smith, 1993 dalam Widener & Gunter, 2007). Serupa, Button (1999) membandingkan liputan media lokal dan internasional tentang kebocoran minyak di Inggris. Sekalipun penyebab kebocoran diperdebatkan, apakah itu akibat alam (cuaca buruk) atau kesalahan manusia, Button menemukan bahwa media lokal membuat liputan panjang lebar tentang kebocoran itu selama beberapa bulan setelah media internasional pergi dan melupakannya (1999: 127-8). Sekalipun begitu, media cenderung menaruh perhatian lebih pada konflik sosial yang muncul pasca kebocoran minyak dan gagal membahas efek jangka panjangnya. Dan, dalam kasus kebocoran minyak media gagal merekam suara korban terdampak langsung.

Membuat berita bukanlah sekadar merekonstruksi sebuah peristiwa, tetapi tlebih dari itu, dia adalah sebuah pembentukan pengetahuan, konstruksi opini publik. Melihat pada proses pembuatan bencana pada saat yang bersamaan adalah menganalisis konstruksi opini publik. Pada awalnya, berita adalah alat untuk memberikan dan mendapatkan informasi tentang sebuah peristiwa. Sebagai sebuah alat, berita disadari sebagai jendela, yang tidak hanya "melihat" apa yang terjadi di luar rumah, tetapi, yang lebih penting, "memahami" mereka. Berita adalah pengetahuan yang dibagikan, lalu pembaca memahami tentang "yang lain" tergantung pada "besar-kecilnya jendela, banyak-sedikit kacanya, buram-bening kaca-

nya, apakah jendela menghadap langsung ke jalan atau ke pekarangan belakang" (Tuchman, 1978: 1). Pengetahuan masyarakat tentang sebuah peristiwa dikonstruksikan oleh bingkai media dalam pemberitaan media atas peristiwa itu. Orang yang berbeda membaca berita yang berbeda dari media yang berbeda mungkin memahami sebuah peristiwa secara berbeda. Padahal berita merupakan hasil dari proses penyuntingan dan tentang bagaimana membingkai sebuah peristiwa. Media memiliki kuasa mengonstruksi realitas masyarakat. Bagaimanapun juga, tidak semua pekerja media bebas membuat beritanya. Seperti manusia lain, pekerja media memiliki rutinitas sebagaimana orang biasa, selain pekerjaan profesional mereka. Sebagaimana Erickson et al. mencatat "berita adalah produk dari transaksi antara jurnalis dan sumber-sumbernya" (1989 dalam Anderson, 2002: 11). Realitas berita berakar dari sifat dan tipe relasi sosial dan budaya yang dibangun antara jurnalis dan narasumber.

Kemudian, tentang "bingkai", saya berada pada posisi melihat dua jenis bingkai, "bingkai media" dan "bingkai individu" (Scheufele, 1999). Konsep "bingkai media", dikembangkan oleh Gamson dan Modigliani (1987 dalam Scheufele, 1999), didefinisikan sebagai "sebuah ide sentral atau alir yang menyediakan makna untuk mengurai serangkaian peristiwa; bingkai menyarankan kontroversi, esensi dari permasalahan". Singkatnya, bingkai media adalah cara media merepresentasikan sebuah peristiwa dalam bentuk realitas media. Terdapat tiga aspek dalam pembingkaian media: insting jurnalistik dari jurnalis, ekonomi politik media (kepemilikan dan iklan), dan kebijakan editorial. Di lapangan, insting jurnalis diuji untuk melihat setidaknya lima ciri penting (Entman, 1993 dalam Scheufele, 1999): a) nilai berita, apakah sebuah peristiwa punya nilai berita; b) agensi, informan mana yang paling tepat untuk merepresentasikan sebuah peristiwa; c) identifikasi korban potensial mereka yang paling rentan; d) kategorisasi, atau pelabelan peristiwa; dan e) generalisasi pada konteks lebih luas, yang berkonsekuensi pada penyederhanaan fakta. Secara teori, produk jurnalistik yang bagus akan dicapai ketika jurnalis mampu memisahkan fakta dari opini ketika menulis berita. Pada banyak kasus, idealisme ini harus dikesampingkan ketika kepentingan pemilik media dan pasar turut campur dalam kebijakan redaksi. Kepemilikan media,

yang berkembang menjadi lebih sentralistik sekarang, dan iklan dipercaya mempengaruhi pembuatan imaji di media. Pembuatan imaji di sini bukan hanya dalam berita, tetapi juga materi media yang lain, termasuk iklan. Dua variabel itu, "rutinitas jurnalis" dan "kepemilikan media dan iklan", beradu di tangan redaksi yang dapat dilihat dalam kebijakan redaksional. Redaksi harus mengombinasikan materi berita mentah sebagai hasil dari rutinitas jurnalis mengumpulkan data dan kepentingan pemilik dalam sebuah berita yang dipublikasikan.

Sementara itu, konsep "bingkai individual", dikembangkan oleh Entman (1993 dalam Scheufele, 1999), didefinisikan sebagai "kluster mental ide yang memandu individu memproses informasi". Lebih lanjut, Gerhards dan Rucht (1992 dalam Scheufele, 1999) mengembangkan konsep ini dan mengategorikan tiga jenis bingkai individual: a) bingkai diagnostik, cara audiens mengidentifikasi dan mengatribusi permasalahan bencana; b) bingkai prognostik, cara audiens menyeleksi informasi sesuai kebutuhan mereka; dan c) bingkai motivasional, cara audiens melibatkan permasalahan tersebut dalam beberapa tindakan (termasuk memproduksi media alternatif). Bingkai individual tersebut berfungsi ketika pembaca membaca berita sebagai preferensi tambahan dalam memahami sebuah peristiwa. Singkatnya, audiens bukanlah kelompok yang pasif mengonsumsi dan menerima mentah-mentah informasi yang dikonstruksi oleh media, bahkan audiens berkuasa untuk memilah dan memilih informasi di media untuk mengonstruksi realitasnya atas sebuah peristiwa sendiri.

Situasi Awal

Pagi-pagi sekali, Laksana, seorang reporter *Kompas*, menerima pesan singkat (SMS) dari sesama wartawan tentang kebocoran gas di Porong. Segera dia berangkat ke lokasi. Hari itu, Senin 29 Mei 2006.[4] Begitu sampai di lokasi, dia mendeteksi bau belerang yang sangat kuat, bersamaan dengan melihat asap putih keluar dari tengah sawah dan cairan yang

[4] Kisah ini dirangkai dari wawancara dengan Laksana dan pemberitaan Kompas seminggu pertama setelah semburan 29 Mei 2006.

keluar dari titik yang sama. Bau menyengat itu datang dari asap putih. Dua warga telah dibawa ke puskesmas terdekat. Pagi itu, *External Relation Coordinator* Lapindo, Arief Setyo Widodo, menggelar konferensi pers. Lokasi eksplorasi Lapindo terletak beberapa ratus meter dari kebocoran gas tersebut. Arief mengatakan bahwa terjadi kebocoran gas dari dalam bumi, dan perusahaan masih menyelidiki penyebab kebocoran. Setelah konferensi pers, para jurnalis pergi. Laksana mampir ke sebuah warung di desa untuk membeli kopi. Mengetahui pelanggannya adalah wartawan, pemilik warung mengantarnya ke rumah kontrakan para pekerja Lapindo. Di sana Laksana bertemu Syahdun, mandor pengeboran. Syahdun tidak bekerja langsung di bawah Lapindo, tetapi bekerja untuk PT Tiga Musim Mas Jaya, perusahaan subkontrakor pengeboran untuk Lapindo Brantas. Syahdun mengatakan padanya bahwa kebocoran gas dipicu oleh rusaknya formasi sumur pengeboran. Argumen tersebut membuka artikel pertama *Kompas* tentang kasus Lapindo berjudul ”Sumur Gas Bocor, Penduduk Diungsikan” (30 Mei 2006). Pernyataan ”alternatif” dari Syahdun memicu perdebatan publik tentang pemicu semburan. Berita itu muncul di rubrik Nusantara memosisikan kebocoran gas di Porong sebagai perhatian nasional, bukan lokal (Jawa Timur). Saat itu, *Kompas* masih memiliki lembar daerah yang didistribusikan hanya di Jawa Timur, dan tidak dimunculkan di ”bendel nasional”. Beberapa hari setelah berita itu dimuat, Laksana mendapat kabar bahwa Syahdun diberhentikan dari tempat kerjanya.

Sebelum masuk pada diskusi lebih lanjut tentang pemberitaan bencana lumpur, saya perlu memberi gambaran wacana media pada saat itu. Dua hari sebelum lumpur menyembur, pada 27 Mei 2006 pukul 05:54 WIB gempa sebesar 6,3 SR menggoncang Yogyakarta dan beberapa kota di Jawa Tengah. Lokasinya sekitar 400 kilometer ke arah Barat sumur Banjar Panji 1. Gempa itu menyebabkan ribuan orang meninggal. Pemerintah menyatakan gempa 27 Mei 2006 sebagai ”bencana nasional”. Media nasional dan beberapa media lokal mengalokasikan ruang khusus untuk pemberitaan tentang kondisi pasca bencana dan proses rekonstruksi. Kisah gempa Yogyakarta seketika mengubur kisah-kisah lain, dan menjadi isu sentral media dari akhir Mei sampai sekitar dua bulan setelahnya. Dalam konteks

ini, kebocoran gas dan semburan lumpur di Porong, Sidoarjo, menjadi sebuah kisah alternatif bagi media Jawa Timur, yang mana kebanyakan audiens targetnya tidak terdampak langsung oleh gempa Yogyakarta. Beberapa media Jawa Timur memberikan ruang khusus bagi cerita bencana lumpur, seperti *Surya*, surat kabar di bawah Kelompok Kompas Gramedia, memberi ruang tentang kebocoran gas sebagai berita utama sejak hari pertama, dan *Suara Surabaya Media* menugaskan seorang reporter khusus di Porong.[5] Bagaimanapun juga, begitu waktu berjalan dan dampak bencana semakin besar, cerita tentang gunung lumpur menjadi berita utama pada media nasional selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun.

Rutinitas Jurnalis

Setiap hari jurnalis dibatasi oleh waktu *(deadline)* dan ruang (ekonomi kata) saat dia menulis berita. Oleh karena itu, pekerja media harus sangat selektif terhadap apa yang akan mereka tulis. Hal ini dapat berdampak pada penyederhanaan fakta karena tidak semua fakta tentang peristiwa dapat dimasukkan dalam berita. Realitasnya, jurnalis cenderung menggunakan sumber informasi terpusat, informan *czar* (seseorang dengan status resmi atau ahli yang relevan menjelaskan), sebagai informan yang otoritatif menginterpretasikan dan mengklarifikasikan kompleksitas sebuah bencana (Sood et al., 1987: 35). Button juga melihat kecenderungan ini, bahwa media cenderung ”tergantung pada pernyataan resmi dan ahli memperkuat pembedaan kultural antara pengetahuan profesional dan awam” (Button 2002: 157). Dengan kata lain, cerita media tentang peristiwa mungkin melegakan, tetapi pada saat yang sama melupakan kisah-kisah orang biasa atau dalam kasus bencana, kisah para korban. Dalam kasus Lapindo, reportase jurnalis juga dipengaruhi oleh rutinitas keseharian mereka dalam mengumpulkan fakta.

---

[5] Wawancara dengan Dhimam Abror Djuraid (Pemred Surya sampai September 2008, sebelumnya pindah ke Surabaya Post) dan Errol Jonathans (Direktur Operasional Suara Surabaya Media)

Porong cukup jauh dari Surabaya, pusat dari seluruh biro media nasional di Jawa Timur. Hal ini membuat tidak semua jurnalis mudah pergi ke situs bencana lumpur di Porong. Tidak semua media nasional memiliki perwakilan untuk Sidoarjo, apalagi di Porong. Media nasional biasanya membagi wilayah kerja Jawa Timur dalam beberapa wilayah. Di setiap wilayah itu media hanya membutuhkan satu wartawan, kecuali Surabaya dan Malang yang mana lebih banyak orang dibutuhkan. Dari wartawan di kedua wilayah ini biasanya liputan tentang Sidoarjo dibuat.

Selain itu, tidak semua media memiliki jurnalisnya sendiri. Beberapa organisasi media menggunakan jasa ”koresponden”, yang bekerja tanpa kontrak kerja tertulis. Secara umum, koresponden tidak punya gaji dasar secara layak dan hak sebagai karyawan tetap, sehingga sekalipun mereka bekerja di bawah nama konglomerasi media nasional, bahkan cukup ternama, upah yang mereka dapatkan jauh di bawah standar hidup layak. Kebanyakan dari mereka dibayar sesuai jumlah berita yang dimuat, tidak ada jaminan sosial, asuransi kesehatan, atau pensiun. Sekalipun terdapat diskusi dalam perencanaan berita, tetapi karena dibayar sesuai cerita yang dimuat, beberapa dari mereka tidak dapat menolak penugasan redaktur. Penugasan berarti uang. Ketimbang merencanakan liputan sendiri dengan resiko tidak disetujui redaktur, jurnalis cenderung melakukan apa yang diminta redakturnya. Sebagai tambahan, jurnalis televisi terkadang tidak dapat menyaksikan tayangan karya mereka karena mendokumentasikan materi video bukanlah hal yang mudah seperti materi cetak, selain juga mereka kadang tidak tahu kapan karya mereka akan tayang. Berita yang mereka buat bisa muncul di program reguler, tetapi kadang muncul di berita sekilas *(flash news)*. Pada banyak kasus, koresponden televisi mengirimkan materi gambar mentah dan jarang menyertakan naskah berita bersamanya karena redaktur sangat mungkin untuk menulis naskah berita baru tanpa konfirmasi dengan koresponden yang bertugas di lapangan.

Kondisi yang tidak menguntungkan tersebut membuat kebanyakan jurnalis malas untuk mengumpulkan data dari informan di lapangan. Kondisi material tersebut mendorong banyak jurnalis pada kebiasaan *copy-paste*: jurnalis mendapatkan berita dari sesama jurnalis, bukan hasil wawancara dengan informan. Terkadang, beberapa jurnalis menggunakan

materi lama bagi berita mereka. Kebiasaan ini terjadi pada beberapa jurnalis televisi. Sebagai contoh, ketika terjadi tanggul jebol, beberapa jurnalis televisi tidak pergi ke lokasi tetapi menggunakan ”stok lama” sebagai ilustrasi berita tanggul jebol. Bagaimanapun juga, audiens nasional tidak tahu apakah stok gambar itu diambil dari tanggul yang jebol baru-baru saja atau dari tanggul yang jebol beberapa minggu lalu. Semua tanggul tampak serupa, jadi mereka tidak perlu mengambil gambar baru.

Keinginan mengangkat cerita tentang pengungsi atau korban harus berhadapan dengan kondisi-kondisi teknis dari jurnalis saat mengumpulkan data tersebut. Setiap jurnalis biasanya memiliki *fixer*, informan yang dia percaya. Setiap jurnalis memiliki lebih dari seorang *fixer* untuk merepresentasikan masing-masing kelompok, seperti kelompok korban, Lapindo, BPLS, dan Pemkab Sidoarjo. Pemilihan seorang *fixer* juga dilematis, khususnya dari kelompok korban. Jurnalis biasanya melakukan kontak dengan pemimpin kelompok korban, terkadang tidak semua kelompok (padahal korban lumpur terbagi menjadi beberapa kelompok, yang mana setiap kelompok memiliki kepentingan dasar yang berbeda, lih. Novenanto, 2009). Dari para pemimpin inilah para jurnalis mendapatkan informasi tentang kehidupan dan kondisi korban. Lalu, dalam berita, pemimpin ini merepresentasikan korban. Informasi dari korban telah tersaring bahkan sejak jurnalis mengumpulkan data pertama. Kebiasaan memilih informan *czar* ini mengeliminasi kemungkinan untuk mendapatkan kisah korban langsung.[6]

Hal lain yang juga terjadi adalah ”rotasi jurnalis”. Perilaku ini dapat menguntungkan atau merugikan bagi konstruksi sosial tentang bencana yang terjadi selama menahun. Rotasi jurnalis adalah hal biasa dalam siklus organisasi media. Rotasi ditujukan untuk menyegarkan jurnalis sehingga mereka tidak bosan bekerja di satu lokasi atau di satu *desk*. Namun, rotasi jurnalis telah membuat keterputusan konstruksi tentang kejadian bencana, sehingga tidak ada konstruksi tunggal dibangun tentang kasus Lapindo.

[6] Suatu hari dalam fieldwork, seorang reporter media cetak nasional mengunjungi tempat pengungsian, mengetahui bahwa asisten saya sedang mengumpulkan data tentang pengungsi perempuan, reporter tersebut menanyakan banyak pertanyaan pada asisten saya dalam rangka menulis berita tentang kehidupan para pengungsi perempuan di Pasar Porong.

Imaji-imaji konstruksi kasus Lapindo tercampur-aduk ketika jurnalis baru mengulangi informasi dasar yang telah dipublikasikan oleh jurnalis yang bertugas sebelumnya. Sekalipun beberapa media telah memberi ruang khusus bagi berita bencana ini, tetapi faktanya media tersebut tidak mempersiapkan jurnalis mereka dengan pengetahuan tentang gunung lumpur atau rekonstruksi pasca-bencana.

Beberapa jurnalis tergolong beruntung mendapatkan *brainstorming* tentang penjelasan geologis tentang gunung lumpur dan mekanisme pengeboran dari para ahli. Akan tetapi, tidak ada transfer pengetahuan secara resmi dari jurnalis lama ke jurnalis baru. Transfer pengetahuan di sini tidak hanya dimaksudkan pengetahuan tentang kasus Lapindo, tetapi lebih tentang hal-hal teknis seperti kontak lokal pada korban. Jurnalis baru harus mencari sendiri jaringan baru di antara komunitas lokal, pemerintah, dan perusahaan. Yang ingin saya katakan adalah rotasi jurnalis kadang memutus jaringan yang telah dibuat oleh jurnalis sebelumnya. Akan tetapi, semua ada tujuannya. Jurnalis baru harus dilatih untuk menggali informasi dalam kondisi apa pun apalagi bila mereka belum pernah ke wilayah itu sebelumnya. Tantangan baru memungkinkan melatih nalar kritis jurnalis tentang sebuah kasus ketika mereka menggali informasi dari nol. Dalam beberapa kasus, berita mereka terkadang merupakan repetisi dari laporan jurnalis sebelumnya. Hal ini logis karena jurnalis baru sedang mengonstruksi pengetahuannya tentang kasus Lapindo berdasarkan fakta-fakta yang pernah digali jurnalis sebelumnya. Dengan kondisi semacam ini, tidak mudah untuk menggali data lebih dalam tentang bencana lumpur karena begitu seorang jurnalis mulai masuk pada diskusi utama tentang kasus Lapindo ini, dia harus rotasi ke wilayah lain, dan digantikan oleh jurnalis baru.

Masalah lain yang muncul adalah kebanyakan media tidak menuliskan kebijakan redaksionalnya, termasuk tentang kasus Lapindo. Prinsip-prinsip kebijakan redaksi ditransferkan secara informal dari jurnalis senior ke yunior, atau oleh redaktur pada jurnalis, mana yang boleh dan tidak boleh. Internalisasi macam ini dilakukan, terkadang, dalam praktik saat redaktur menyunting dan memilih berita mana yang layak dan mana yang tidak.

Godaan lain bagi jurnalis adalah ”amplop”. Amplop sendiri sudah menjadi simbolis, lebih dari sekadar uang, tetapi juga bentuk materi yang lain, yang bagi jurnalis yang secara ekonomi tidak stabil kehadirannya selalu menggoda. Pada sisi ini, terdapat dua kategori jurnalis: yang termotivasi menjadi seorang jurnalis dan yang tidak memiliki pilihan pekerjaan lain. Kesejahteraan jurnalis adalah permasalahan bagi profesionalisme jurnalis. Karena media tidak dapat memenuhi kebutuhan jurnalisnya, jurnalis merasa bebas untuk mencari uang dari sumber-sumber lain, bahkan dari informan mereka. Integritas jurnalis tidak serta-merta tercipta ketika dia menulis beritanya, tetapi melalui proses yang tidak pernah usai. Beberapa jurnalis melakukan perkerjaannya karena mereka hanya butuh uangnya dan tak peduli dengan prinsip dan etika jurnalisme. Ketika jurnalis ini tidak puas dengan gaji mereka, mereka akan mencari cara lain untuk meningkatkan pendapatan, dengan mengesampingkan etika, seperti menerima (atau berburu) amplop atau meminta fasilitas dari informan untuk tujuan personalnya. Beberapa pemangku kepentingan dalam kasus Lapindo menyadari situasi ini dan berpikir bahwa mencampuri konstruksi opini publik melalui media terkadang tidak perlu bermain dengan media sebagai organisasi besar, tetapi cukup pada level jurnalis, titik awal konstruksi wacana di media. Memberi jurnalis beberapa materi (uang, jaket, kaos, dan benda-benda lain) terkadang cukup efektif untuk ”menjinakkan” nalar kritis jurnalis tentang kasus Lapindo dalam berita mereka. Akan tetapi strategi ini bukanlah satu-satunya yang dilakukan untuk pencitraan.

Intervensi Kapital

Pada 27 Agustus 2008 saya menikmati makan malam dengan seorang kawan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta. Dia bekerja sebagai seorang jurnalis di salah satu stasiun televisi di bawah keluarga Bakrie. Dia bercerita tentang editornya yang menolak usulan liputan tentang lumpur Lapindo. Kami berkelakar, stasiun televisi tempatnya bekerja tidak akan mengangkat berita tentang lumpur Lapindo karena grup

Bakrie adalah juga pemilik saham terbesar dari Lapindo. Kami tertawa dan menghabiskan makanan kami.

Percakapan singkat itu yang terjadi hanya beberapa menit masih melekat. Bagaimanapun juga, kelakar kami hanyalah bukti lain dari argumen Gamson et al. (1992) bahwa kepemilikan media mempengaruhi yang (non-) berita. Tidak diragukan, media adalah organisasi bisnis, yang tidak dapat dipisahkan dari pasar. Industri media hidup dari pasar melalui iklan. Terdapat situasi ketika media harus berhati-hati dan tetap ”diam” menulis berita tentang pasar potensialnya yang mungkin berdampak pada pembatalan atau pengurangan kontrak iklan. Sebagai contoh, permasalahan etis muncul ketika media meliput konflik antara buruh dan perusahaan. Beberapa pekerja media mundur sejenak dari tugas pengawasannya *(watchdog)* dengan menulis berita yang mendukung suatu perusahaan yang telah memasang iklan di medianya.

Bagi Lapindo (dan keluarga Bakrie), reportase media tentang kasus Lapindo sangat tidak proporsional dan cenderung memojokkan Lapindo. Tendensi semakin kuat ketika Tim Investigasi (bentukan Menteri ESDM) mengumumkan bahwa aktivitas pengeboran Lapindo memicu semburan lumpur. Timnas Investigasi, yang dipimpin Rudi Rubiandini (sekarang Kepala SKK Migas, lembaga pengganti BP Migas), menemukan bahwa Lapindo tidak menggunakan selubung pengaman, yang memicu *kick* (lumpur masuk ke dalam sumur eksplorasi). Opini yang beredar adalah usaha Lapindo menutup sumur setelah *kick* menyebabkan *blow-out* (lumpur keluar ke permukaan bumi). Spontan, publik dan media massa menyalahkan Lapindo dalam bencana ini. Apalagi, dengan fakta bahwa Lapindo didukung oleh tokoh kuat dalam politik nasional, Aburizal Bakrie, Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat dan pimpinan Partai Golongan Karya (Golkar). Opini yang muncul: keluarga Bakrie harus bertanggung jawab penuh atas segala dampak dari bencana lumpur, segala usaha untuk melepaskan tanggung jawab merupakan praktik negosiasi politik Keluarga Bakrie (baca: Aburizal) dengan pemerintah.

Pada Maret 2007, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Perpres No. 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan

Lumpur Sidoarjo (BPLS) yang memerintahkan Lapindo untuk membeli tanah dan bangunan warga terdampak. Perpres tersebut membagi tanggung jawab antara pemerintah dan Lapindo dalam penanganan lumpur. Menurut Perpres tersebut, pemerintah membiayai beban operasional BPLS dan seluruh beban dari penanganan lumpur, sementara Lapindo hanya mengganti biaya kerusakan fisik di wilayah yang masuk pada peta area terdampak 22 Maret 2007.[7] Pada saat itu, segala masalah yang berhubungan dengan pembayaran kompensasi korban diatribusikan pada Lapindo. Bagi korban, fakta bahwa pemerintah menyuruh Lapindo mengganti tanah dan bangunan mereka yang terendam lumpur sudah cukup sebagai bukti bahwa Lapindo memang bersalah dalam menyebabkan bencana ini, dan media massa masuk dalam "bingkai mayoritas" semacam ini dalam pemberitaannya. Pada situasi semacam ini, Lapindo dan keluarga Bakrie mulai berpikir bahwa mereka adalah "korban" dari pemberitaan media dan opini publik yang tak berimbang.

Pasca lahirnya Perpres No. 14 Tahun 2007, pimpinan Lapindo mulai lebih sering melakukan kunjungan media. Perhatian mereka adalah agar tidak membawa masalah lumpur ini ke ranah politik.[8] Mereka menyampaikan berita dan dokumen tentang perkembangan terbaru penanganan lumpur. Pendekatan Lapindo berubah setiap kali media merespons kunjungannya. Intervensi Lapindo untuk mengendalikan opini publik melalui media sangat serius. Lapindo menawarkan pada setiap media di Surabaya sejumlah uang untuk "pendekatan komersial". Tampaknya, pendekatan komersial cukup sukses di beberapa media. Lapindo mulai membeli iklan, seperti pengumuman daftar korban, dan juga *advertorial*. Pada 8 November 2007, iklan Minarak Lapindo Jaya muncul di *Kompas* bendel Nasional (h. 21). Teks iklan tersebut menunjukkan usaha Lapindo mengendalikan opini publik bahwa penyebab semburan lumpur bukanlah akibat aktivitas pengeboran mereka. Dengan menggunakan kalimat:

[7] Pembagian pembiayaan dalam Perpres No. 14 Tahun 2007 ini kontras dengan Keppres No. 13 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa seluruh biaya akibat luapan lumpur ditanggung oleh Lapindo. Pada Perpres No. 48 Tahun 2008, yang keluar setahun kemudian, dan seluruh Perpres yang dikeluarkan setelah itu, biaya akibat lumpur ditanggung oleh APBN tanpa ada lagi keterlibatan Lapindo sama sekali.

[8] Wawancara Dhimam Abror Djuraid.

”Para ahli meyakinkan bahwa kejadian semburan lumpur yang terjadi di Sidoarjo adalah kejadian alam, bukan akibat pengeboran yang dilakukan oleh Lapindo Brantas Inc.,” Lapindo berusaha membangun sebuah pemahaman bahwa: semburan lumpur di Sidoarjo adalah fenomena alam yang mana tidak berhubungan dengan aktivitas eksplorasi gas alam dari Lapindo. Usaha ini dapat dipahami karena Lapindo berusaha membatasi tanggung jawab dalam musibah ini (Schiller et al., 2008). Dengan mengatakan bahwa semburan dipicu oleh gempa, gunung lumpur akan diklasifikasikan sebagai bencana alam, sehingga pemerintah akan mengambil seluruh tanggung jawab penanganan korban dan memasukkan Lapindo sebagai salah satu dalam ”daftar korban”. Namun, apabila bencana lumpur diakui sebagai bencana industri, sebagai konsekuensi dari aktivitas pengeborannya, Lapindo harus bertanggung jawab penuh. Bagi Lapindo, biaya ”belanja media” untuk membangun citra masih lebih murah bila dibandingkan dengan yang akan dikeluarkan jika bencana ini dikategorikan sebagai bencana industri. Dengan belanja media, Lapindo dengan mudah mengendalikan diskusi publik tentang penyebab gunung lumpur dan siapa yang harus bertanggung jawab terhadap dampaknya.

Harian *Surya* merupakan satu media lokal yang mengambil tawaran Lapindo dalam bentuk *advertoriali* (iklan berbentuk berita). Lapindo membayar untuk satu halaman penuh Harian *Surya* dan mengisinya dengan segala berita tentang lumpur sesuai dengan sudut pandang Lapindo. *Advertorial* didesain sebagaimana layaknya ”halaman biasa”; pilihan jenis huruf, warna, judul, desain kolom, dan foto mengindikasikan itu. Bagi orang awam, halaman itu sama dengan halaman biasa Harian *Surya*, padahal itu adalah *advertorial* satu halaman penuh dari Lapindo. Meskipun mengambil tawaran *advertorial* tersebut, Dhimam Abror Djuraid, Pemred *Surya* kala itu, mengklaim bahwa *Surya* masih independen dalam pemberitaan bencana lumpur dan kritis terhadap Lapindo.[9] *Advertorial*, atau segala macam bentuk iklan, menurutnya, merupakan urusan divisi marketing, bukan redaksi. Jadi, apa pun keputusan marketing tidak mempengaruhi kebijakan redaksional. Bagaimanapun juga, ruang bagi ”berita normal”,

[9] Wawancara Dhimam Abror Djuraid.

sekitar satu atau dua dalam sehari, tidak sebanding dengan *advertorial* satu halaman penuh, yang muncul setiap hari selama beberapa bulan.

Pada Juli 2008, keluarga Bakrie mengakuisisi *Surabaya Post* (surat kabar yang didirikan oleh keluarga Azis dan kolaps sejak meninggalnya Toeti Azis). Belum cukup, grup Bakrie menaruh dua eksekutif Lapindo, Bambang Prasetyo Widodo dan Gesang Budiarso, dalam manajemen surat kabar itu (Tapsell, 2010). Dhimam Abror Djuraid mulai bekerja sebagai Pemred *Surabaya Post* sejak 1 Oktober 2008, setelah sebelumnya menjabat Pemred *Surya*. Dhimam melihat bahwa bekerja di *Surabaya Post* dapat berkesempatan mencapai visinya tentang jurnalisme.[10] Dia juga diyakinkan bahwa *Surabaya Post* tidak akan menjadi ”corong Bakrie” dalam bencana lumpur. Menurutnya, terlalu mahal bagi keluarga Bakrie untuk membeli *Surabaya Post* jika hanya digunakan untuk tujuan menjadikannya sebagai pencitraan tandingan dalam kasus Lapindo. Namun, Dhimam dengan inisiatifnya sendiri sangat berhati-hati dalam memutuskan kebijakan redaksional tentang kasus Lapindo. Pilihannya adalah apakah *Surabaya Post* menulis berita tentang kasus Lapindo tetapi dengan bahasa yang ”lebih halus”? ataukah tidak menulis sama sekali? Pada masa itu, yang mana Dhimam menyebutnya sebagai periode rehabilitasi *Surabaya Post*, dia memilih untuk ”tidak menulis” sama sekali tentang kasus Lapindo. Keputusan itu menurut pengakuannya diambil bukan atas permintaan langsung dari pemilik. Akan tetapi, menurut saya, pilihan itu problematis karena ”tidak menulis” dapat diinterpretasikan sebagai ”penjinakan media”.

Pemusatan kepemilikan media dalam sebuah konglomerasi industri media global dalam produksi informasi berdampak pada monopoli konstruksi opini publik tentang sebuah peristiwa karena ”ketika perusahaan memiliki baik rumah-rumah produksi dan distributor imaji-imaji media, mereka dapat menjamin penawanan audiens pada produk mereka (Gamson et al., 1992: 378).” Di Indonesia, media massa di level nasional terpolarisasi pada beberapa kelompok (Lim, 2012; Nugroho, et al. 2012). Bahkan industri media multinasional telah mengokupasi beberapa per-

[10] Wawancara Dhimam Abror Djuraid.

usahaan media nasional dan lokal. Kemudian, produksi imaji tidak dapat dilepaskan dari tekanan hegemonik pemilik media, yang berarti juga perubahan bingkai media. Pembingkaian tidak dapat ditarik keluar dari permasalahan utamanya, atau mengutip Erving Goffman, ”kerentanan utama proses pembingkaian membuatnya sebagai lokus perjuangan potensial, bukan realitas suram yang mana kita semua harus alami” (dalam Gamson et al., 1992: 384). Media kemudian adalah ”arena”, tempat kuasa sedang dipertarungkan secara simbolis (Bourdieu, 1992). Sepenggal cerita di tengah makan malam dengan seorang kawan yang bekerja bagi media keluarga Bakrie, ”belanja media” (iklan dan *advertorial*) dan akuisisi *Surabaya Post* merupakan bukti untuk menegaskan, sekali lagi, kekuatan kapital telah digunakan dalam rangka memenangi pertarungan simbolis, konstruksi opini publik tentang kasus Lapindo.

Respons Korban

Sekalipun media arus utama menawarkan beragam imaji tentang kasus Lapindo, hanya beberapa imaji yang memicu respons korban sebagai audiens media. Bagian ini mendiskusikan dua peristiwa yang dialami kelompok Pagar Rekorlap/Rekontrak[11] dalam merespons realitas media arus utama: ”Peristiwa Bambu Runcing” (Agustus 2008) dan ”*Advertorial Surabaya Post*” (23 Februari 2009).

”Peristiwa Bambu Runcing” terjadi pada Agustus 2008. Kala itu, berita media melaporkan rencana Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk memfungsikan ”Paspor” (Pasar Baru Porong) menurut rencana semula sebagai pasar. Rencana ini kemudian menjadi wacana di beberapa media.

[11] ”Pagar Rekorlap” adalah singkatan dari ”Paguyuban Warga Renokenongo Korban Lapindo”. Renokenongo adalah nama desa tempat Sumur Banjar Panji 1 berada. Nama Pagar Rekorlap adalah nama terbaru kelompok ini. Sebelumnya mereka bernama ”Pagar Rekontrak”, atau ”Paguyuban Warga Renokenongo Menolak Kontrak”. Beberapa warga membuat ungkapan satir, ”Renokenongo sekarang telah menjadi Renokenangan.” Seluruh anggota Pagar Rekorlap berasal dari Desa Renokenongo. Setelah terusir paksa pasca-ledakan pipa Pertamina 22 November 2006, kebanyakan mereka hidup bersama di ”Paspor”, Pasar Baru Porong, tempat pengungsian sementara. Dibandingkan kelompok korban lainnya, Pagar Rekorlap tampak tampil lebih solid. Mereka punya rencana bagi masa depan bersama, membeli tanah baru, dan tinggal bersama di lokasi baru itu. Sejak Juni 2009, mereka menempati lokasi baru, dan menamainya dengan ”Renojoyo”.

Sebelumnya, Bupati Sidoarjo mengizinkan penggunaan Paspor sebagai tempat pengungsian sementara bagi korban. Akan tetapi, Pasar Porong lama sudah penuh dengan penjual, sehingga pada malam hari para penjual ini meluber di Jalan Raya Porong dan menambah kemacetan. Para penjual ini direncanakan untuk pindah dari pasar lama di akhir 2006, tetapi Pemkab Sidoarjo menunda rencana ini karena lokasi pasar yang baru digunakan sebagai tempat pengungsian sementara para korban lumpur. Waktu itu, ratusan keluarga dari Desa Renokenongo (masih sebagai Pagar Rekontrak) yang masih tinggal di Paspor menganggap rencana Pemkab Sidoarjo sebagai tindakan memaksa mereka untuk segera pergi dari tempat pengungsian itu. Situasinya dilematis. Pagar Rekontrak tidak punya kepastian dari Lapindo tentang kapan mereka akan mendapatkan uang jual-beli tanah karena mereka masih belum menerima kontrak sesuai Perpres No. 14 Tahun 2007 (Novenanto, 2009). Pagar Rekontrak merasa mereka telah kehilangan tanah dan rumah mereka, dan mereka akan melakukan apa pun untuk mempertahankan satu-satunya yang masih mereka miliki: nyawa mereka.

Sekalipun wacana itu ”masih rencana”, tetapi karena media menjadikan ”rencana” itu sebagai wacana utama selama beberapa hari, rumor ”pengusiran dari Paspor” menyebar di warga Pagar Rekontrak dan memicu emosi dan reaksi. Rumor ini menyebar di bulan Agustus, bulan sakral bagi warga Indonesia. Warga Pagar Rekorlap mereproduksi simbol kemerdekaan Indonesia itu ketika rumor pengusiran dari Paspor menyebar. Secara spontan, mereka membuat bambu runcing dan menatanya mengelilingi Paspor, seperti sebuah benteng. Beberapa informan mengatakan bahwa atmosfer di Paspor pada waktu itu seperti medan perang. Setiap orang siap mati untuk mempertahankan pasar karena mereka tidak punya kepastian tentang status kompensasi. Sebagai tambahan, rencana pemerintah dianggap sebagai pengabaian hak mereka sebagai ”warga negara”. Hari Kemerdekaan, kemudian, menjadi sebuah momentum bagi korban ini untuk mendeklarasikan bahwa mereka belum merdeka.

”Peristiwa Bambu Runcing”, yang dipicu oleh pemberitaan media, kemudian menjadi perhatian media selama beberapa hari. Tindakan ini menjadi perhatian publik karena para korban mengatakan mereka akan

bertarung sampai mati. Selama beberapa hari, intel polisi dan militer berdatangan ke Paspor, tujuan mereka hanya agar tidak terjadi kerusuhan di Sidoarjo. Saat itu, Pagar Rekontrak masih bernegosiasi dengan Lapindo tentang kompensasi. Lapindo menolak membeli tanah warga Pagar Rekontrak karena kebanyakan tanah itu tidak memiliki sertifikat tanah. Lapindo hanya membeli tanah dengan sertifikat. Bagi mereka yang hanya memiliki ”pethok D” atau ”letter C”, Lapindo menawarkan opsi *cash-and-resettlement* di Kahuripan Nirvana Village [KNV], unit usaha *Bakrieland*. Pagar Rekontrak tidak menghendaki tawaran itu karena dinilai tidak punya dasar hukum, mereka menginginkan skema *cash-and-carry* seperti tertulis dalam Perpres. Pada saat yang bersamaan, Pagar Rekontrak membutuhkan uang untuk membeli tanah baru bagi permukiman baru mereka. Bagaimanapun juga, Pagar Rekontrak berhasil mencuri perhatian media arus utama dengan membangun benteng bambu runcing, yang kemudian reaksi mereka itu membuka kembali diskursus bahwa persoalan kompensasi korban lumpur belum tuntas.

Realitas media terkadang tidak merepresentasikan realitas, bahkan realitas media terkadang adalah realitas yang sama sekali berbeda. Imaji-imaji media, bagaimanapun, dapat memicu reaksi dari audiens. Hal ini terjadi pada 23 Februari 2009 malam. Malam itu konflik di antara anggota Pagar Rekorlap nyaris meletus.

Senin sore, 23 Februari 2009, dua orang masuk Paspor. Mereka ingin mendistribusikan sekitar 500 eksemplar *Surabaya Post* edisi hari itu secara gratis di Paspor. Rencana itu gagal karena pengurus Pagar Rekorlap menahan kedua orang itu dan menahan surat kabarnya. Para pengurus curiga dengan pembagian gratis surat kabar bagi anggotanya. Mereka tahu bahwa *Surabaya Post* berafiliasi dengan keluarga Bakrie (lihat diskusi tentang akuisisi *Surabaya Post*). Mereka juga tahu bahwa Komisaris Utama *Surabaya Post*, Andi Darussalam, adalah orang penting di Minarak Lapindo Jaya, perusahaan yang didirikan Lapindo Brantas untuk membeli tanah dan bangunan warga terdampak. Hari itu, *Surabaya Post* mengangkat berita, di halaman depan, berjudul ”250 Rekening Diserahkan”, tentang Minarak yang telah menyerahkan 250 rekening BRI kepada korban lumpur Senin pagi. Namun, bukan itu yang memicu

reaksi, tetapi *advertorial* satu halaman penuh di sampul belakang oleh Minarak. *Advertorial* itu mencantumkan daftar 250 korban yang telah menerima buku tabungan BRI. Terdapat tiga foto ilustrasi proses serah-terima buku tabungan. Di salah satu foto terhadap gambar seorang warga Pagar Rekontrak yang menerima buku tabungan. Beberapa korban Pagar Rekontrak telah menerima dan membaca *Surabaya Post*. Mereka cemburu, menuduh orang yang terpampang dalam foto itu mengingkari anggota yang lain yang belum mendapatkan kepastian tentang kompensasi. Rumor tentang orang yang menerima buku tabungan menyebar di antara anggota Pagar Rekorlap.

Malam itu nyaris terjadi konflik fisik karena orang-orang menyerang tempat tinggal si penerima buku tabungan. Pengurus Pagar Rekorlap menghalangi usaha itu dan segera mengadakan pertemuan malam itu. Si tertuduh mengatakan bahwa dia belum menerima buku tabungan. Dia punya alibi dan saksi bahwa dia berada di tempat lain pagi itu. Pengurus Pagar Rekorlap melihat lagi foto dalam advertorial itu, mereka menemukan bahwa foto tersebut bukanlah foto yang diambil pagi itu, tetapi gambar anggota Pagar Rekorlap menandatangani kontrak awal pada September 2008. Lalu, segalanya menjadi jelas. Konflik dalam masyarakat tidak dipicu oleh perbedaan akses atas moda produksi, sebagaimana diungkapkan Marxisme klasik, tetapi dipicu oleh ”misinformasi dan kecurigaan yang menyebar di masyarakat” (Spyer, 2002).

Penutup

Prinsip utama jurnalisme adalah bagaimana menulis berita seobjektif mungkin. Hal ini membutuhkan akurasi dan kemampuan menjaga keseimbangan. Media berperan melayani hak publik untuk tahu dan hak publik untuk berekspresi. Secara ideal, kebebasan media adalah milik masyarakat, bukan milik pemilik media. Kebebasan itu akan hilang begitu terdapat intervensi untuk mengendalikan berita media sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Sengaja atau tidak, media dan pekerja media telah menggunakan kekuasaan mereka dalam mengonstruksi pengetahuan audiensnya.

Gunung lumpur merupakan fenomena luar biasa bagi warga Jawa Timur, juga bagi rakyat Indonesia. Peristiwa ini menarik perhatian media nasional dan internasional. Bencana yang terjadi tidak hanya akibat semburan lumpur (kerusakan fisik), tetapi terkait erat dengan struktur dan proses sosial di pelbagai level dalam masyarakat (bencana sosial). Hukum media *bad news is good news* membuat bencana menjadi komoditas berita tingkat satu *(facticity)*. Namun, secara umum, media gagal merekam suara korban bencana, kecenderungan yang juga terjadi dalam pemberitaan tentang kasus Lapindo. Suara korban lumpur terlupakan sebagai konsekuensi dari rutinitas jurnalis (mengumpulkan data, rotasi, dan kondisi material lainnya) dan intervesi kapital (belanja media dan pembelian saham media). Lapindo, dan keluarga Bakrie, sebagai salah satu audiens media, berpikir bahwa mereka adalah korban dari pemberitaan media, sehingga mereka mulai melakukan strategi untuk membangun citra di media. Biaya untuk ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang mungkin dikeluarkan Lapindo jika bencana dikategorikan sebagai bencana industrial. Dengan melakukan belanja media, Lapindo dapat dengan mudah mengendalikan diskusi publik tentang penyebab semburan dan siapa yang harus bertanggung jawab atas bencana yang ditimbulkannya. Dengan kata lain, keinginan untuk mengangkat cerita tentang pengungsi atau korban harus berhadapan dengan kondisi teknis internal organisasi media.

Namun, berbicara tentang bingkai, tidak hanya media yang punya bingkai, "bingkai media", tetapi audiens juga memiliki bingkai berbeda ketika membaca media yang disebut "bingkai individual". Audiens bukanlah kelompok pasif yang mengonsumsi dan menerima begitu saja seluruh informasi yang dibangun media. Audiens secara aktif memilah dan memilih informasi di media dalam rangka membangun kesadaran atas sebuah peristiwa. Imaji media dapat memicu reaksi dari audiens, salah satunya adalah memicu konflik di dalam masyarakat. Konflik tidak dipicu oleh perbedaan akses atas moda-moda produksi, seperti Marxisme klasik, tetapi dipicu kesalahpahaman karena realitas media terkadang tidak merepresentasikan yang nyata, melainkan realitas yang betul-betul berbeda. Dua contoh reaksi kelompok Pagar Rekontrak/Rekorlap, ditambah usaha

grup Bakrie melakukan belanja media, menunjukan pada kita bahwa media memang memiliki kekuatan mengonstruksi realitas tentang sebuah peristiwa, sekalipun realitas tersebut dibuat-buat, atau dalam bahasa Jean Baudrillard: *hyperreality*, yang menjadi bencana lain bagi para korban bencana.

Referensi

——, (2006a). "Sumur Gas Bocor, Penduduk Diungsikan." *Kompas* (30 Mei 2006).

——, (2006b). "PT Lapindo dan Warga Belum Capai Titik Temu." *Kompas* (31 Mei 2006).

——, (2006c). "Lumpur Merusak Areal Sawah." *Kompas* (1 Juni 2006).

——, (2006d). "Bergelut Tanah dan Lumpur Rawa." *Kompas* (2 Juni 2006).

——, (2006e). "Sudah Sepekan Gas Ganggu Warga". *Kompas* (3 Juni 2006).

Akbar, A.A., (2007). *Konspirasi di Balik Lumpur Lapindo*, Yogyakarta: Galang Press.

Anderson, A.G., (2002). "The Media Politics of Oil Spills." *Spill Science & Technology Bulletin*, Vol. 7(1-2), 7-15.

Button, G.V., (1999). "The Negation of Disaster: the Media Response to Oil Spills in Great Britain." Dalam: A. Oliver-Smith & S. M. Hoffman (Eds.), *The Angry Earth. Disaster in Anthropological Perspective*, New York & London: Routledge.

——, (2002). "Popular Media Reframing of Man-made Disasters: A Cautionary Tale." Dalam: A. Oliver-Smith & S. M. Hoffman (Eds.), *Catastrophe and Culture. The Anthropology of Disaster*, Santa Fe: School of America Research Press.

Gamson, W.A., (1989). "News as Framing: Comments on Graber." *American Behavioral Scientist*, Vol. 33, 157-166.

Gamson, W.A., Croteau, D., Hoynes, W., & Sasson, T., (1992). §Media Images and the Social Construction of Reality." *Annual Review of Sociology*, Vol. 18, 373-393.

Muhtada, D., (2008). "Ethics, Economics and Environmental Complexity: the Mudflow Disaster in East Java." *Systems Research and Behavioural Science*, Vol. 25, 181-191.

Novenanto, A., (2009). *Mediated Disaster. The Role of Mainstream and Alternative Media in East Java Mud Volcano Disaster*. Tesis Master, Department of Cultural Anthropology and Development Sociology, Leiden University.

Oliver-Smith, A., (1996). "Anthropological Research on Hazards and Disasters." *Annual Review Anthropology*, Vol. 25, 303-328.

Scheufele, D.A., (1999). "Framing as a Theory of Media Effects." *Journal of Communication*, Vol. 49(1), 103-122.

Schiller, J., Lucas, A., & Sulistiyanto, P., (2008). "Learning from the East Java Mudflow: Disaster Politics in Indonesia." *Indonesia*, Vol. 85, 51-77.

Sood, R., Stockdale, G., & Rogers, E.M., (1987). "How the News Media Operate in Natural Disaster." *Journal of Communication*, Vol. 37(3), 27-41.

Spyer, P., (2002). "Fire without Smoke and Other Phantoms of Ambon's Violence: Media Effect, Agency and the Work of Imagination." *Indonesia*, Vol. 74, 21-36.

Tuchman, G., (1978). *Making News. A Study of the Construction of Reality*, New York & London: Free Press.

Widener, P. & Gunter, V.J., (2007). "Oil Spill Recovery in the Media: Missing an Alaska Native Perspective." *Society and Natural Resources*, Vol. 20, 767-783.

Bab 6

Public Relations dalam Manajemen Krisis Lapindo

RACHMAT KRIYANTONO

DALAM SETIAP KRISIS yang dihadapi organisasi, *Public relations*[1] perlu menyupervisi implementasi manajemen krisis agar berjalan efektif. Tugas seorang *Public relations*, menurut Seitel (2001: 202) adalah *helping to manage crisis is the ultimate assignment for Public relations professional. Smart managements value Public relations advice in developing an organization's response not only to crisis but to issues in general*. Krisis lumpur telah menyebabkan interkoneksi antara strategi manajemen Lapindo Brantas mengelola krisis tersebut, persepsi publik, *power* dan kontrol yang dimiliki manajemen dan publik. Artinya, meningkatnya atau menurunnya eskalasi krisis sangat dipengaruhi interaksi antara beberapa elemen di atas. Dari interkoneksi ini, tampak peran *Public relations* sangat penting untuk

[1] Dalam tulisan ini, untuk mengurangi kerancuan antara "public relations" sebagai aktivitas atau sebagai orang/praktisi, saya perlu memberi catatan kecil tentang penggunaan istilah tersebut sebagai berikut. "Public relations" ("P" besar, "r" kecil) saya gunakan untuk merujuk kepada orang, yaitu praktisi. Sementara "Public Relations" atau "public relations" (konsisten besar semua atau kecil semua) merujuk kepada proses aktivitasnya.

harmonisasinya relasi antar tiga elemen tersebut. Peran itu dapat terwujud melalui upaya proaktif *Public relations* membangun perspektif baru pada manajemen[2] tentang bagaimana berkomunikasi dengan publik. *Public relations* mendorong penyediaan saluran komunikasi yang memungkinkan berbagai pihak yang terlibat menyampaikan ”suaranya” dalam proses pengambilan keputusan yang mengakomodasikan berbagai kepentingan.

Public relations sangat diperlukan dalam manajemen krisis lumpur karena krisis tersebut telah berkembang dari ”isu” menuju ”krisis akut”. *Public Relations* adalah fungsi manajemen untuk mengelola komunikasi yang ditujukan untuk menjalin relasi positif antara organisasi dan publiknya. Dapat diartikan bahwa pendekatan *Public Relations* adalah menerapkan atau mengikutsertakan prinsip-prinsip komunikasi dalam menjalin relasi dengan publik dalam strategi atau kebijakan untuk mengatasi krisis. Peristiwa bencana lumpur telah menjadi bagian dari kesadaran dan pemahaman publik, yang menjadi perbincangan publik. Luapan lumpur, dengan demikian, merupakan krisis yang mempunyai dampak luas, baik bagi para korban maupun kehidupan sosial di Indonesia secara umum. Setelah berjalan selama beberapa tahun, lumpur masih membanjiri sejumlah kawasan dan masalah-masalah yang timbul akibatnya belum dapat diselesaikan sepenuhnya, sehingga memicu beberapa dampak negatif dan yang tidak diharapkan. Beberapa isu muncul di permukaan seperti isu kehilangan pekerjaan, lingkungan hidup, hak asasi manusia, regulasi dan hukum yang tidak adil, tanggung jawab perusahaan, pemindahan-paksa, hilangnya kehidupan sosial kultural, kerusakan fasilitas sosial, relasi bisnis-kuasa, dan ketidakadilan distribusi ganti-rugi. Semua isu di atas berkombinasi membuat krisis semakin rumit dan secara gradual menstimuli kemarahan publik, atau setidaknya ketidakpuasan publik, yang terjadi dalam komunitas sosial melalui aksi-aksi demonstrasi massal. Situasi-situasi inilah yang menyebabkan krisis lumpur ini bersifat krisis akut karena tidak dikelola dengan baik.

[2] ”Manajemen” di sini merujuk para pengambil kebijakan di organisasi/tim manajemen, atau ”koalisi dominan”. Sementara itu, ”manajemen krisis” adalah proses mengelola dan mengatasi krisis, yang dibentuk oleh tim manajemen.

Mengadopsi pemikiran Coombs (2010) dan Devlin (2007) tentang tahapan krisis, penyebab semburan sudah menjadi ”pra-krisis”, yaitu ketika situasi serius mulai muncul dan organisasi menyadarinya. Pada 29 Mei 2006, pada pagi hari, sesaat setelah semburan, Lapindo Brantas menggelar konferensi pers, yang menyatakan bahwa terdapat kebocoran gas dari bumi dan masih diinvestigasi. Pada sore hari, beberapa jam setelah kejadian, Radio *Suara Surabaya* menyiarkan pernyataan Dias Roychan (*Community Development Coordinator Lapindo Brantas*) bahwa telah terjadi *force majeure* yang dipicu oleh gempa bumi di Yogyakarta, dua hari sebelumnya. Dinyatakan bahwa gempa bumi menyebabkan patahan di dalam bumi dan menciptakan lubang di luar sumur Banjar Panji 1 (Prasetyo, 2006a). Tetapi, terdapat perbedaan pernyataan dari seorang staf *Public relations* Lapindo, yang mengakui:

> Luapan lumpur disebabkan oleh gempa bumi adalah pernyataan yang salah dari tim kami. Tim seharusnya mengatakan bahwa kedua peristiwa (erupsi lumpur dan gempa) sama-sama disebabkan pergerakan tektonik di bawah bumi, yang menyebabkan terjadi gempa di Yogyakarta dan erupsi lumpur panas di Sidoarjo. Erupsi lumpur di Sidoarjo karena di bawah wilayah ini terdapat gunung, sehingga pernyataan yang benar seharusnya tidak ada relasi antara erupsi dan gempa.[3]

Dalam waktu seminggu, isu tentang penyebab ini menjadi pengetahuan dan perbincangan publik yang cenderung menyalahkan Lapindo. Dengan cepat, selama 2007-2008, penyebab semburan berkembang menjadi ”krisis akut” terjadi ketika situasi tidak dapat dikelola dengan baik oleh organisasi sehingga situasi tersebut semakin menyebar luas *keluar* organisasi, menjadi fokus diskusi publik ketika para pemimpin opini terlibat di dalamnya. Para pemimpin opini memberikan pernyataan-pernyataan, yang mempengaruhi publik, melalui media massa. Krisis semakin akut ketika pengadilan memutuskan bahwa semburan adalah fenomena alam karena publik terpecah menjadi dua: yang setuju dan yang tidak setuju.

[3] Wawancara 16 November 2009.

Tetapi, saat ini, krisis dalam keadaan ”pasca-krisis” *(dormant stage)* karena pemerintah dan lembaga hukum formal memandang penyebab semburan adalah bencana alam. Perbincangan yang mengandung pro-kontra tentang isu pun pelan-pelan meredup tetapi akan muncul lagi ke permukaan, biasanya, saat memperingati terjadinya semburan pertama, yaitu pada setiap 29 Mei. Pada masa ini, organisasi berupaya untuk memperbaiki segala akibat yang ditimbulkan krisis *(recovery)*.

Manajemen Krisis yang Tidak Efektif

Dalam artikel sebelumnya, berdasarkan temuan data di lapangan, saya berpendapat bahwa manajemen krisis dalam menangani bencana lumpur tidak efektif (Kriyantono, 2012). Ada beberapa alasan mengapa saya menyebut manajemen krisis yang tidak efektif. *Pertama*, manajemen krisis berjalan lambat. Upaya sistematik menangani persoalan baru tampak setelah 3 bulan lumpur menyembur dan menenggelamkan beberapa desa, yaitu dengan adanya Keppres No. 13 Tahun 2006 tentang pembentukan Tim Nasional Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (Timnas PLS), yang disusul dengan regulasi yang lain. Persoalan sosial yang diatur dalam aturan-aturan tersebut baru dijalankan setelah korban berdemonstrasi beberapa kali, dan dalam perjalanannya pun beberapa kali tidak dipatuhi, seperti molornya jadwal pembayaran sisa 80% oleh Lapindo, skema pembayarannya pun tidak lagi kontan (seperti tercantum dalam Perpres No. 14 Tahun 2007) tetapi dicicil. Sebelum menerima uang kontrak dan jatah hidup, para korban berada dalam kondisi ketidakpastian nasib selama berbulan-bulan.

Bagi korban, yang mereka tunggu adalah kepastian pemberian ganti-rugi. Penderitaan lebih karena menunggu dalam ketidakpastian, meskipun telah mendapatkan bantuan uang sewa rumah selama dua tahun maupun uang jatah hidup. Bahkan sekarang pun, ketika pemberian ganti-rugi diberikan secara cicilan, ketidakpastian itu belum juga hilang. Misalnya, ada korban warga Siring yang total nilai tanah dan bangunannya sebesar Rp 2 miliar. Mengikuti skema cicilan, sisa 80%-nya baru akan lunas dalam waktu 10 tahun. Apakah ada jaminan pembayaran cicilan akan tetap

lancar? Apakah ada jaminan kepastian hukum? Kita tidak tahu perubahan-perubahan selama masa itu, mungkin ada perubahan kebijakan akibat pergantian kekuasaan.

Kedua, manajemen krisis telah gagal mereduksi ketidakpastian. Data lapangan menyebutkan masalah mendasar yang dialami para korban lumpur adalah ”ketertutupan informasi”. Ini menimbulkan ketidakpastian pada korban. Mereka *merasa* Lapindo dan pemerintah kurang memberikan cukup informasi yang jelas tentang apa yang terjadi. Misalnya, banyak warga yang bingung apakah rumahnya akan terkena lumpur atau tidak, bagaimana dengan evakuasi barang, lalu biayanya dari mana. Tidak ada peringatan dini kepada korban atau setidaknya informasi tentang apa yang perlu dilakukan warga dalam situasi ketidakpastian tersebut. Setiap krisis pasti memunculkan krisis informasi, yang semakin memicu munculnya ketidakpastian. Teori *Uncertainty Reduction* dari Charles Berger (1975, dikutip dalam Littlejohn & Foss, 2008) menyebutkan bahwa semakin tidak pasti sebuah situasi, semakin informasi dibutuhkan. Krisis informasi inilah yang menyebabkan meningkatnya perasaan was-was dan curiga pada diri korban. Dalam konteks ini, Lapindo dan pemerintah telah gagal menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu. Kegagalan dalam menyediakan dan mengontrol arus informasi adalah kegagalan terbesar dalam upaya mengelola krisis (Duke & Masland, 2002). Terbukti, alih-alih membaik, krisis lumpur semakin parah.

Kurangnya sosialisasi dan informasi yang dibutuhkan juga menimbulkan kurang efektifnya beberapa program sosial yang disampaikan. Program-program pelatihan maupun bantuan UKM kurang merakyat karena banyak korban yang tidak mendapatkan sosialisasi tentang program tersebut. Seperti disampaikan seorang warga Desa Siring,

> *Nggak* ada informasi sebelum atau sesudah lumpur *nyembur*. Kita biasanya cari informasi dari Pak Lurah atau RT. Kita selalu yang aktif cari informasi. Lapindo kalau nggak *digetak*, *nggak* gerak. Kita mesti demo. Informasi yang diberikan ya hanya soal ganti-rugi.

Ketiga, fokus utama pada citra korporat. Manajemen krisis yang dijalankan lebih sebagai upaya pencitraan. Beberapa bukti menunjukkan,

misalnya, para korban hidup di pengungsian tanpa kepastian selama berbulan-bulan, sementara perusahaan tampak sibuk membingkai dan memengaruhi bingkai publik. Hal ini tampak dari berbagai strategi komunikasi yang dilakukan Lapindo (baik melalui presentasi seminar, wawancara dengan wartawan, iklan di media massa, atau publikasi lain, misalnya buku dan surat berita) yang lebih fokus pada bingkai konstruksi bahwa bencana ini disebabkan oleh gempa Yogyakarta. Dengan kata lain, ini bukan lumpur Lapindo, tetapi lumpur Sidoarjo. Pesan kunci yang disampaikan satu, yaitu semburan lumpur merupakan fenomena alam yang dipicu oleh gempa. Sejak minggu-minggu pertama lumpur menyembur, pesan kunci ini sudah dikampanyekan. Yang terjadi adalah politik pencitraan. Akibatnya, pemenuhan kebutuhan para korban terabaikan.

Memang, menentukan sumber penyebab krisis merupakan hal krusial dalam manajemen krisis. Informasi tentang krisis akan dapat mempengaruhi opini publik terhadap perusahaan. Adalah hal yang wajar jika dalam setiap situasi krisis, setiap orang mencoba mencari penyebab krisis. Informasi tentang penyebab ini akan menjadi dasar argumen untuk menentukan aktor utama yang harus bertanggung jawab mengatasi krisis. Selanjutnya, akan menentukan kuantitas dari bentuk tanggung jawab itu sendiri, apakah penuh atau tidak. Namun demikian, baik perusahaan maupun pemerintah harus memberikan prioritas atas keselamatan publik. Mengadopsi teori *Situational Crisis Communication* dari Coombs (2007), perusahaan seharusnya menekankan pada upaya melindungi publik dari berbagai kerusakan dan bahaya daripada memfokuskan pada upaya melindungi citra dan reputasi perusahaan. Prioritas pertama dalam krisis adalah menjamin keselamatan publik dan menyintas dari krisis.

Public Relations: Stimulator Orientasi ke Publik

Dapat disimpulkan bahwa *Public relations* dalam krisis lumpur tidak proaktif dalam penyediaan informasi. Dengan memberikan ganti-rugi tidak seperti yang dijanjikan dan memberikan informasi tentang apa yang terjadi secara tidak jelas dan cepat, perusahaan memunculkan ketidakpastian baru. *Public relations* tidak mampu mengatasi krisis informasi karena

gagal menyediakan informasi dan mengontrol arus informasi secara akurat dan efisien. Kondisi ini menyebabkan krisis semakin memburuk. Akibatnya, para korban cenderung memberikan atribusi negatif, khususnya atribut terhadap ”tanggung jawab krisis” dan ”perjalanan krisis”. *Public relations* cenderung fokus untuk mengonstruksi bingkai penyebab semburan. Hal ini memang sangat masuk akal ketika strategi komunikasi bertujuan untuk meyakinkan publik bahwa perusahaannya tidak bersalah sebagai penyebab bencana ini. Namun demikian, aktivitas *public relations* seharusnya mempertimbangkan kemungkinan konstruksi realitas yang berbeda dari ideologi yang dominan sebagai penerapan konsep batas-cakupan *(boundary-spanning)* untuk memfasilitasi dan memonitor lingkungan. Memonitor lingkungan dimaknai sebagai fungsi *public relations* untuk mengumpulkan data-data tentang isu-isu yang berkembang dan opini-opini publik yang terjadi. Dalam krisis lumpur ini, sebaliknya, manajemen krisis menerapkan strategi ”informasi satu arah”, yang mana *Public relations* hanya mendiseminasi pandangan-pandangannya dan mendominasi pihak lain, publik. Manajemen krisis diterapkan atas nama kepentingan perusahaan dan beberapa kali terjadi distorsi dan aversi kebenaran.

Tampak bahwa dalam proses informasi pendekatan yang digunakan lebih pada pendekatan strategik *(strategic approach)* seperti yang dimunculkan Leitch & Neilson (1997). Artinya, korban dianggap entitas yang pasif, menunggu pesan-pesan dari perusahaan. Padahal idealnya mereka perlu dianggap sebagai entitas yang aktif dan setara dengan perusahaan. Selama ini, korban diarahkan hanya untuk menikmati konstruksi dari pihak perusahaan tentang apa yang terjadi, seperti konstruksi bahwa ”Lapindo adalah korban juga”, ”para korban kehidupannya membaik”, ”penyebab semburan adalah gempa”, atau bahkan ”empati Lapindo terhadap korban”. Pendekatan semacam ini perlu diubah, apalagi, berdasarkan teori *Situational of the Public* dari James Grunig (1979), fakta di lapangan membuktikan bahwa para korban adalah publik yang aktif, yang menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dari permasalahan yang dihadapinya *(problem recognition)*, tetapi, pada sisi lain, korban juga mempersepsi kendala-kendala komunikasi saat korban ingin mendapatkan informasi *(constraint recognition)*. Kendala komunikasi ini antara lain mencakup adanya

limitasi ideologi yang mempengaruhi konstruksi korban atas realita. Misalnya, menurut pengakuan seorang warga Perumtas sewaktu demonstrasi di Jakarta, Desember 2008, seorang pejabat mengatakan bahwa kelompok-kelompok korban (Tim 16, GKLL, dll.) sebagai refleksi kemauan warga yang aneh-aneh. Dia juga mengatakan adanya tim-tim yang *door-to-door* ke setiap warga. Menurut saya, ini bisa diartikan sebagai bentuk kendala-kendala komunikasi yang menyebabkan tingginya level *constraint recognition* dari korban.

Tidaklah mengherankan jika semua partisipan dan informan memberikan atribut krisis ini sebagai *intentional cluster*, yaitu perusahaan dipersepsi sebagai aktor utama yang seharusnya bertanggung jawab mengatasi segala masalah, termasuk membayar ganti-rugi secara penuh. Terkait kronologis krisis, segala macam regulasi dan persetujuan tidak selalu ditepati. Ada ketidaktegasan negara dalam melindungi regulasinya sendiri. Pembayaran ganti-rugi menjadi berbelit-belit. Alih-alih membayar kontan, *cash-and-carry*, perusahaan memilih menawarkan skema relokasi, *cash-and-resettlement*. Perusahaan pun menstimuli munculnya kemarahan publik ketika kelompok korban yang memilih relokasi dan menandatangani perjanjian memperoleh rumah baru lebih awal daripada korban yang bersikukuh meminta pembayaran tunai – yang sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku Perpres No. 14 Tahun 2007. Isu *cash-and-resettlement* dan *cash-and-carry* berkembang menjadi level kritis karena situasi memicu perpecahan di kalangan korban.

Situasi ini juga memunculkan ketidakpercayaan pada perusahaan dan pemerintah. Walaupun beberapa korban merasa memperoleh kehidupan baru yang mencukupi setelah menerima uang ganti-rugi, mereka tetap merasa perusahaan tidak memperlakukan mereka dengan baik. Alasannya adalah mereka hidup menderita dan menunggu dalam ketidakpastian selama berbulan-bulan; ganti-rugi merupakan tanggung jawab yang dengan sendirinya melekat pada perusahaan; dan mereka kehilangan kehidupan sosio-kultural yang tidak dapat dengan mudah diganti dengan uang, sebesar apa pun.

Adalah tugas *Public relations* untuk meyakinkan agar publik dilayani dengan baik oleh perusahaan dengan membantu merencanakan strategi

komunikasi yang akan memungkinkan perusahaan beradaptasi dengan lingkungannya. *Public relations*, sebagai contoh, mesti bertanggung jawab membantu manajemen mengatasi krisis. Data di lapangan memberikan bukti bahwa *Public relations* mempunyai kewajiban utama menciptakan pesan dan mengomunikasikannya secara terbuka agar tercipta pemahaman bersama dengan publik. Strategi komunikasi tersebut akan membantu mengelola isu yang berkembang selama krisis.

Ekonomi-Politik *Public Relations* dan Pertarungan Konstruksi

Namun demikian, sebagai bagian dari sistem sosial yang luas, implementasi peran *Public relations* pada bahasan di atas tidak dapat dipisahkan dari sistem sosial politik lainnya. Saya menemukan bahwa manajemen krisis lumpur sangat dipengaruhi oleh konteks ekonomi-politik: krisis ini mencakup pertarungan relasi kuasa dalam masyarakat. Relasi-relasi kuasa ini, kemudian, menentukan pembentukan dan penyebaran regulasi, saluran komunikasi, dan ganti-rugi selama krisis, dan konstruksi kebenaran.

Beberapa faktor ketidakefektifan manajemen krisis yang dijelaskan dalam tulisan ini memicu rumor adanya relasi unik antara perusahaan dan pemerintah dalam konteks politik tingkat tinggi. Para korban pun berupaya memahami mengapa peristiwa ini terjadi. Di mata publik, tampak adanya konflik kepentingan karena sulit memisahkan antara peran pebisnis dan peran pemerintahan. Sementara itu, konstruksi kebenaran individual dapat didefinisikan sebagai cara yang mana individu-individu mempunyai standar-standarnya sendiri tentang kebenaran saat mereka mempersepsi realitas. Hal ini sangat dipengaruhi oleh latar ekonomi politiknya. Perusahaan mengonstruksi manajemen krisis yang meliputi strategi komunikasi dan regulasi pemerintah; berita media massa serta tuntutan korban juga merupakan hasil konstruksi. Namun demikian, berbagai konstruksi yang berbeda ini dapat memunculkan konflik dan berpotensi memunculkan persoalan serius. Konstruksi atas realitas adalah bersifat subjektif dan tergantung pada kepentingan individu. Segala cara untuk mempromosikan (apalagi jika memaksakan) konstruksi kepada pihak lain berpotensi memicu kontroversi. Pada akhirnya, siapa pun yang

mempunyai *kuasa*, kemampuan, dan saluran komunikasi mempunyai kemungkinan besar dapat mempengaruhi pihak lain agar mau menerima konstruksinya.

Krisis lumpur sendiri adalah realitas objektif. Tetapi, setiap individu mempunyai bingkainya masing-masing yang terkonstruksi secara subjektif dari pengalaman dan informasi tentang krisis tersebut. Keberagaman atribusi tentang krisis, dengan demikian, terbentuk dan terkonstruksi secara sosial. Individu mempunyai latar belakang pendidikan, pengalaman, norma keluarga, pilihan-pilihan, lingkungan sosial tertentu, kepentingan, dan pola interaksi sehingga mereka menginterpretasi krisis ini berdasarkan konstruksinya sendiri. Melalui proses eksternalisasi, individual kemudian menyerap informasi-informasi tertentu tentang krisis lumpur yang telah dikonstruksi oleh pemerintah, *Public relations* Lapindo, media massa, akademikus ataupun kolega-koleganya. Pada titik ini, krisis lumpur berkembang menjadi ”realitas objektif”.

Konstruksi mana yang akan berpeluang menjadi realitas objektif ditentukan dua faktor: 1) cara membentuk konstruksi dan 2) kemampuan untuk mengomunikasikan bahwa konstruksinya itu sendiri merupakan sesuatu yang dipercaya masyarakat sebagai realitas sosial. Dalam usaha mengakuisi beberapa media dan membelanjakan sejumlah uang untuk strategi beriklan di media massa lokal dan nasional Lapindo mempunyai *kuasa* untuk mengomunikasikan konstruksi ”lumpur Sidoarjo”. Media massa menjadi alat diseminasi pandangan-pandangan perusahaan. Berita adalah realitas tangan kedua yang merupakan hasil dari konstruksi media massa. Pendekatan kritis memandang ”kuasa dan pengetahuan tidak dapat dipisahkan untuk menciptakan kebenaran”. Dapat disimpulkan bahwa *kuasa* adalah bagian yang melekat dalam pesan-pesan perusahaan. Periklanan, surat berita, dan regulasi-regulasi – sebagai hasil ekspresi bahasa – mentransmisikan kuasa. Akibatnya, kuasa dapat mempersuasi persepsi publik terhadap realitas, yang pada akhirnya menciptakan pengetahuan, misalnya perusahaan adalah ”pahlawan” dan berbaik hati pada korban, sedangkan para korban adalah ”pengacau”. Mengutip Littlejohn & Foss (2008:324), *power is a creative force that pervades all human activity which includes crisis management*.

Kuasa terasa lebih kuat karena posisi politik Aburizal Bakrie sebagai (mantan) menteri, ketua partai politik besar, dan sekretaris gabungan partai koalisi. Melihat konteks politik tingkat tinggi, konstruksi ”lumpur Sidoarjo” bakal menjadi realitas objektif. Konstruksi ini tidak hanya tampak pada pesan-pesan perusahaan, tetapi juga dalam pelbagai regulasi formal dari negara. Konstruksi ini dapat dibaca sebagai representasi kepentingan elit-elit politik dan ekonomi. Menarik dilihat adalah bagaimana pejabat publik pemerintahan, dalam pernyataan publiknya, cenderung, pada satu sisi, menuntut Lapindo untuk membayar ganti-rugi pada korban, namun, pada sisi lain, mereka mengonstruksi ”lumpur Sidoarjo” dalam regulasi formal. Dapat dikatakan proses konstruksi berjalan sangat halus dan terkesan ”normal”. Para pejabat publik berupaya menjadi ”bapak” yang melindungi ”anak” (rakyat)-nya. Namun, perusahaan gagal memengaruhi konstruksi rakyat akar rumput. Para korban lebih memilih mengonstruksi bencana itu sebagai ”lumpur Lapindo”.

Selama beberapa tahun krisis berjalan, beberapa kali terjadi konflik kepentingan antara perusahaan, pemerintah, dan korban. Penjelasannya, mengadopsi pendekatan kritis, adalah konflik dan perbedaan selalu terjadi dalam proses sosial. Untuk mengatasinya, negara idealnya memberikan kesempatan bagi semua suara untuk didengarkan. Sebagai hasilnya, dominasi ideologi dari kelompok yang punya relasi-kuasa yang kuat dapat dihindari. Temuan lapangan menunjukkan kondisi ideal ini belum tercapai. Para korban mendapat tekanan dari kelompok yang lebih kuat sehingga para korban mesti melakukan demonstrasi untuk menuntut haknya sebagai warga negara dan sebagai manusia. Situasi ini terjadi karena orientasi profit ekonomi mengarahkan segala cara manajemen krisis. Pada akhirnya, para korban tidak mempunyai peluang untuk mengakses segala alat produksi, seperti saluran komunikasi formal (media massa).

Manajemen Krisis demi Menjaga Reputasi

Pertanyaannya, bagaimana ketidakefektifan manajemen krisis semacam ini dapat terjadi? Ini pertanyaan yang rumit dicari jawabannya. Banyak kepentingan turut bermain, politik maupun ekonomi. Banyak

penulis yang mencoba memberi asumsi-asumsi tentang adanya hubungan khusus antara kekuasaan dan pebisnis, serta para aktor yang terlibat dalam krisis ini (Akbar, 2007; Santoso, 2007; Schiller et al., 2008; Utomo, 2009). Akan tetapi, dari data lapangan, saya menyimpulkan karena manajemen krisis yang dilakukan tidak mendasarkan pada prinsip: "selamatkan publik, reputasi otomatis menyusul *(save the public, the reputation automatically involved)*!"

Teori *Situational Crisis Communication* menekankan bahwa manajemen krisis mesti menjadikan keselamatan publik sebagai prioritas nomor satu daripada fokus pada menjaga reputasi (Coombs, 2007). Artinya, harus ada upaya-upaya konkret melindungi publik – dalam hal ini korban – dari ancaman kerusakan sosial, fisik maupun psikologi. Jika tidak, maka kredibilitas dan reputasi perusahaan akan jatuh.

Dalam perspektif manajemen krisis, reputasi perusahaan sangat ditentukan oleh tiga faktor persepsi publik: *crisis responsibility*, *crisis history*, dan *prior reputational reputation*. *Crisis responsibility* adalah atribusi publik tentang penyebab krisis dan siapa aktor yang mesti bertanggung jawab. Dari wawancara langsung dengan beberapa korban, saya menyimpulkan bahwa sebagian besar korban mempunyai atribusi bahwa krisis lumpur di Sidoarjo adalah termasuk *intentional cluster*. Artinya, Lapindo dipersepsi sebagai penyebab lumpur menyembur dan, oleh karenanya, harus bertanggung jawab atas segala dampak yang ditimbulkan. Atribusi ini disampaikan korban, baik yang telah menerima ganti-rugi maupun yang belum menerima. Menurut Teori *Situational Crisis Communication*, terdapat dua lagi macam atribusi: *victim cluster* dan *accidental cluster*. *Victim cluster* terjadi jika perusahaan dipersepsi sebagai korban karena krisis disebabkan oleh faktor di luar perusahaan. Sementara itu, *accidental cluster* terjadi bila krisis disebabkan karena ketidaksengajaan yang dilakukan perusahaan. Bahkan korban yang sudah menerima 100% ganti-rugi pun tetap mengatribusikan "lumpur Lapindo". Seorang warga Desa Jatirejo mengatakan,

> Saya yakin penyebabnya pengeboran, walau pengadilan *mutuskan* '*nggak* salah'. *Wong* lokasinya saja di dekat pemukiman penduduk yang padat.

Crisis history adalah persepsi publik bahwa perusahaan pernah mengalami kasus yang sama di masa lalu, baik mencakup jenis krisisnya ataupun adanya kesamaan penanganan. Dari sisi ini, timbul krisis kepercayaan dari para korban terhadap langkah-langkah yang ditempuh Lapindo, misalnya apakah skema cicilan akan lancar atau tidak. Karena dari pengalaman sebelumnya, mereka merasakan bahwa aturan-aturan atau kesepakatan-kesepakatan yang dibuat sering tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Seorang warga Perumtas mengatakan,

> Lapindo punya tanggung jawab *ngasih* kita uang kontrak dan jatah hidup. Tapi, sering *nggak nepati* janji. *Kayak* ganti-rugi *nggak* jelas, *trus* katanya *cash* tapi dicicil-cicil.

Prior relational reputation adalah atribusi publik tentang seberapa baik tingkat perhatian perusahaan terhadap publik. Sebagian warga mengatakan bahwa mereka bahagia mendapat uang ganti-rugi yang besar. Seperti yang dikatakan seorang warga Desa Siring, "Perlakuannya cukup baik, ukurannya ya jika mereka *ngasih* ganti-rugi lancar." Walaupun beberapa korban dari Desa Siring mengaku mempunyai kehidupan yang lebih baik setelah menerima ganti-rugi, tetapi mereka merasa perusahaan tidak memperlakukan mereka dengan baik. Alasannya, pemberian ganti-rugi itu merupakan hal yang wajar dan wajib diberikan; mereka telah hidup susah menunggu tanpa kepastian cukup lama; dan ganti-rugi uang tidak dapat mengembalikan kehidupan sosial-budaya sebelumnya. Jadi, dapat disimpulkan, kemunculan atribusi negatif korban terhadap perusahaan dalam tiga faktor di atas disebabkan lambannya penanganan dampak sosial kasus ini.

KESIMPULAN

Pada bagian akhir ini, saya ingin menggarisbawahi lagi tentang peran *Public relations* sebagai fasilitator komunikasi antara organisasi dan publik. Peran fasilitator ini semestinya dimaknai sebagai "satu kaki di pihak manajemen, satu kaki di pihak publik". Bahasan tentang aktivitas manajemen krisis selama krisis lumpur di atas makin meneguhkan

bahwa organisasi dan publik bukanlah entitas yang netral. Organisasi dianggap sebagai arena pertarungan ideologi dan ekonomi, seperti *power*, pengaruh, dan kontrol. Organisasi sebenarnya terdiri dari koalisi-koalisi dan konstituen-konstituen yang mempunyai kebutuhan, nilai-nilai, dan persepsi-persepsi yang berbeda-beda. Karena itu, dalam posisinya sebagai fasilitator komunikasi, *Public relations* didorong untuk selalu melakukan refleksi diri, dengan bertanya apa tujuan suatu program *public relations*, apa maksud komunikasi dengan karyawan, lobi-lobi, relasi dengan komunitas, komunikasi krisis, atau juga promosi produk, karena eksistensi *Public relations* bukan sekadar mempromosikan kepentingan klien, organisasi, produk, atau pelayanan tertentu.

Referensi

Akbar, A.A., (2007). *Konspirasi di Balik Lumpur Lapindo*, Yogyakarta: Galang Press.

Coombs, T., (2007). "Protecting Organization Reputation During a Crisis: the Development and Application of Situational Crisis Communication Theory." *Corporate Reputation Review,* Vol. 10(3), 163-176.

——, (2010). "Parameters for Crisis Communication." Dalam: W.T. Coombs & S.J. Holladay (Eds.), *The Handbook of Crisis Communication*, West Sussex: Wiley-Blackwell.

Devlin, E.S., (2007). *The Crisis Management Planning and Execution*, New York: Auerbach Publication.

Duke, S., & Masland, L., (2002). "Crisis Communication by the Book." *Public Relations Quartely,* Vol. 47(3), 30-35.

Grunig, J., (1979). "A New Measure of Public Opinions on Corporate Social Responsibility." *Academy of Management Journal,* Vol. 22(4), 738-764.

Kriyantono, R., (2012). ”Measuring a Company Reputation in a Crisis Situation: an Ethnography Approach on the Situational Crisis Communication Theory.” *International Journal of Business and Social Science,* Vol. 3(9), 214-223.

Leitch, S., & Neilson, D., (1997). ”Reframing Public Relations: New Directions for Theory and Practice.” *Australian Journal of Communication*, Vol. 24(2), 17-32.

Littlejohn, S.W., & Foss, K.A., (2008). *Theories of Human Communication* (9th ed.), California: Thompson Wadsworth.

Santoso, V., (2007). ”Harga Industrialisasi Sektor Migas. Semburan Lumpur Lapindo sebagai Potret Kelemahan Negara dalam Menghadapi Korporasi Ekstraktif Hidrokarbon.” *CSR Review,* (Mei-Juni), 4-9.

Schiller, J., Lucas, A., & Sulistiyanto, P., (2008). ”Learning from the East Java Mudflow: Disaster politics in Indonesia.” *Indonesia,* Vol. 85, 51-77.

Seitel, F.P., (2001). *The practice of public relations* (8th ed.), New Jersey: Prentice-Hall.

Utomo, P.W., (2009). ”Menggapai mimpi yang terus tertunda: menelusuri proses ‘ganti-rugi’ terhadap korban Lumpur Lapindo.” *Disastrum*, Vol. 1(1), 27-46.
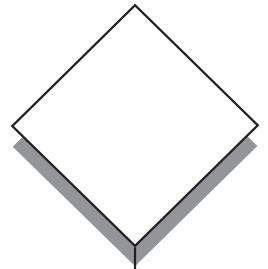
Para Penulis

Anastasya Andriarti adalah jurnalis televisi dan penikmat isu media. Memperoleh gelar Master Komunikasi (Manajemen Media) di Pascasarjana Komunikasi Universitas Indonesia. Sejak 2005 mengajar juga untuk mata kuliah di bidang komunikasi dan *broadcasting* di sejumlah perguruan tinggi di Jakarta, antara lain: Program Vokasi Komunikasi UI, UPN Veteran, dan Fikom Universitas Pancasila.

Bosman Batubara menyelesaikan S-1 di Jurusan Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada dan memperoleh gelar master dari *Interuniversity Programme in Water Reosurces Engineering*, Katholieke Universiteit Leuven dan Vrije Universiteit Brussel, Belgia. Pernah bekerja sebagai *exploration geologist* di PT. Kaltim Prima Coal. Pada tahun 2009-2010, terlibat dalam advokasi korban Lumpur Lapindo. Beberapa karyanya tentang bencana industri dan Lumpur Lapindo, antara lain: *Bencana Industri: Relasi Negara, Perusahaan dan Masyarakat* (sebagai editor dan kontributor) Jakarta: Yayasan Desantara (2010) dan *Kronik Lumpur Lapindo: Skandal Bencana*

Industri Pengeboran Migas di Sidoarjo (sebagai penulis bersama Paring Waluyo Utomo), Yogyakarta: INSIST PRESS (2012).

Rachmat Kriyantono adalah dosen pada Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Brawijaya, Malang.

Abdil Mughis Mudhoffir berasal dari salah satu desa di Porong, Sidoarjo yang tidak jauh dari pusat semburan lumpur Lapindo. Menamatkan kuliah hukum di Universitas Brawijaya pada tahun 2006 dan master di bidang Sosiologi dari Universitas Indonesia pada tahun 2008. Saat ini adalah dosen tetap pada Jurusan Sosiologi, Universitas Negeri Jakarta dan *research associate* di LabSosio, Pusat Kajian Sosiologi, FISIP, Universitas Indonesia dengan minat kajian di bidang studi lingkungan dan gerakan Islam. Beberapa tulisan yang telah dipublikasikan: "*Governmentality* dan Pemberdayaan dalam Advokasi Lingkungan: Kasus Lumpur Lapindo" (*Jurnal Sosiologi Masyarakat*, Vol. 16 [1], Januari 2011). Salah satu penulis buku *Hitam-Putih Tembakau* (FISIP UI Press & LTN PBNU, 2011).

Anton Novenanto adalah dosen pada Jurusan Sosiologi, Universitas Brawijaya. Saat ini sedang menempuh program doktoral pada Institut für Ethnologie, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Jerman.

Yayan Sakti Suryandaru adalah dosen Departemen Komunikasi, Universitas Airlangga. Peneliti dan pengamat media di Puskakom Surabaya.

Membingkai Lapindo

Dalam ilmu pengetahuan, "kebenaran" merupakan sesuatu yang sakral, karena produksi pengetahuan merupakan sebuah praktik kuasa. Permasalahan etika menyeruak ketika saya mulai melakukan penelitian tentang insiden lumpur di Sidoarjo: "kebenaran" versi mana yang perlu saya ikuti? Alih-alih memilih salah satu versi "kebenaran", pertarungan kuasa untuk membangun suatu rezim kebenaran merupakan hal lain yang tak kalah menarik untuk dikaji. ...

Secara umum usaha Grup Bakrie memenangi konstruksi kebenaran tentang bencana gunung lumpur sesuai sudut pandang mereka cukup berhasil, tapi pada saat yang sama keberhasilan itu menandakan pembungkaman da n eksklusi konstruksi alternatif tentang insiden ini. Oleh karena itu, mungkin, intensi penelitian sosial tentang kasus Lapindo adalah mengungkap: bagaimanakah praktik pembungkaman dan eksklusi tersebut dilakukan?

ISBN 978-979-21-3580-0

9 789792 135800

PENERBIT KANISIUS
Jl. Cempaka 9, Deresan
Yogyakarta 55281

072355